

**PENGARUH AKUNTABILITAS, TRANSPARANSI DAN PARTISIPASI
MASYARAKAT TERHADAP PENGELOLAAN KEUANGAN
DESA DI KECAMATAN GLENMORE,
KABUPATEN BANYUWANGI**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Akuntansi (S. Akun)
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam
Program Studi Akuntansi Syariah



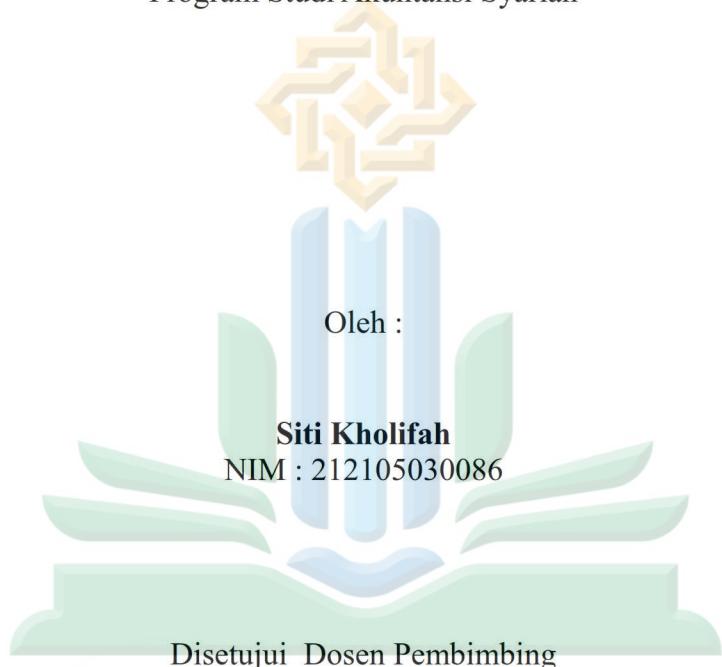
SITI KHALIFAH
NIM: 212105030086
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
2025**

**PENGARUH AKUNTABILITAS, TRANSPARANSI DAN PARTISIPASI
MASYARAKAT TERHADAP PENGELOLAAN KEUANGAN
DESA DI KECAMATAN GLENMORE,
KABUPATEN BANYUWANGI**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Akuntansi (S. Akun)
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam
Program Studi Akuntansi Syariah



Disetujui Dosen Pembimbing

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

Dr. Moh. Haris Balady, S.E., M.M.
NIP. 197907132023211007

**PENGARUH AKUNTABILITAS, TRANSPARANSI DAN PARTISIPASI
MASYARAKAT TERHADAP PENGELOLAAN KEUANGAN
DESA DI KECAMATAN GLENMORE,
KABUPATEN BANYUWANGI**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Akuntansi (S. Akun)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Akuntansi Syariah

Hari: Rabu

Tanggal: 10 Desember 2025

Tim Pengaji :

Ketua

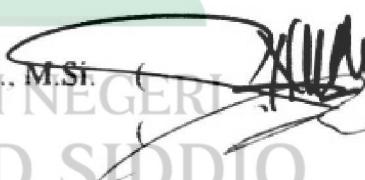

Agung Parmono, S.E., M.Si.
NIP. 197512162009121002

Sekretaris


Luluk Muhibah, M.Ak.
NIP. 198804122019032007

Anggota:

1. Dr. Hj. Nurul Widyawati Islami Rahayu, S.Sos., M.Si.
2. Dr. Moh. Haris Balady, M.M.


KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

J E M B E R
Menyetujui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



MOTTO

يَأَيُّهَا الَّذِينَ إِيمَانُكُمْ كُوْنُوا قَوَّمٌ
لِّلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجِرُّنَّكُمْ شَنَآنُ
قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا أَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ حَبِيرٌ بِمَا

تَعْمَلُونَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan” (Surat Al-Ma’idah Ayat 8)¹



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemah*, (Jakarta: Saifuddin Zuhri, 2019).

PERSEMBAHAN

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT atas segala nikmat, berkah dan limpahan rahmat-Nya yang selalu memberikan kemudahan dalam setiap langkah menjalani kehidupan, sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi saya. Sholawat serta salam semoga tetep tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Oleh karena itu, dengan rasa syukur dan bahagia saya persembahkan skripsi ini kepada:

1. Cinta pertama dan panutanku, ayahanda tercinta Saha. Terima kasih atas setiap tetes keringat yang telah tercurahkan dalam setiap langkah ketika mengembangkan tanggung jawab sebagai seorang kepala kelurga, yang tiada hentinya memberikan motivasi, perhatian serta kasih sayang dan dukungannya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi hingga selesai. Beliau tidak pernah duduk di bangku kuliah namun karna kerja kerasnya beliau dapat mengantarkan penulis sampai sarjana.
2. Pintu surgaku, ibunda tercinta Poninten. Terima kasih atas doa yang selalu dilangitkan di setiap sholatmu demi keberhasilan penulis dalam mengenyam pendidikan sampai menjadi sarjana , terima kasih ibu atas berkat dan ridhomu penulis dapat menyelesaikan pendidikan ini.
3. Kakak kandungku, Halimatus Sa'diyah. Terima kasih atas dukungan dan doanya, terima kasih telah menjadi bagian dari proses penulis dalam menyelesaikan pendidikan

4. Terima kasih saya ucapkan kepada seluruh keluarga besar yang telah memberikan doa dan dukungannya sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan ini.
5. Terimakasih kepada Mohammad Rohib Hasani, S.M. yang telah memberikan dukungan, doa, serta motivasi selama proses penyusunan skripsi ini. Semoga apa yang kita perjuangkan hari ini menjadi awal dari hal-hal baik di masa depan.
6. Sahabat seperjuangan saya yang juga sangat banyak membantu selama ini, Riza Agustiana, Sherly Handayani Safitri, dan Devi Safitri. Terimakasih atas dedikasinya selama ini membersamai saya hingga detik ini.
7. Terima kasih kepada almamaterku, UIN KHAS Jember yang telah memberikan kesempatan untuk belajar dan menimba ilmu kepada para ahli kompeten dibidangnya, sehingga memberikan banyak pembelajaran dan pengalaman yang sangat berharga. Terimakasih yang tak terhingga untuk kalian semua bahkan yang tidak tertulis kedalam lembar ini. Dan terimakasih juga untuk semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu atas bantuan hingga terselesainya skripsi ini dengan baik. Semoga skripsi ini bermanfaat dan berguna untuk progres ilmu pengetahuan di masa yang akan datang.
8. Siti Kholidah, ya! Diri saya sendiri. Apresiasi sebesar-besarnya karena telah bertanggung jawab untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai. Terimakasih karena terus berusaha dan tidak menyerah, serta senantiasa menikmati setiap prosesnya yang bisa dibilang tidak mudah. Terimakasih sudah bertahan.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, nikmat, dan karunia-nya. Berkat pertolongan, serta dengan usaha, doa, dan kerja keras, penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: “Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa di Kecamatan Glenmore Kabupaten Banyuwangi,” Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa umat manusia dari zaman kegelapan menuju zaman yang penuh ilmu pengetahuan dan cahaya kebenaran.

Skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan, dukungan, dan doa dari berbagai pihak. Untuk itu, penulis menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember.
2. Dr. H. Ubaidillah, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember.
3. Dr. M.F. Hidayatullah,S.H.I.,M.S.I., selaku Ketua Jurusan Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember.
4. Dr. Nurul Widyawati I.R., S.Sos., M.Si., selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember.

5. Dr. Nur Ika Mauliyah, M.Ak selaku Koordinator Program Studi Akuntansi Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember.
6. Siti Indah Purwaning Yuwana, S.Si., MM, selaku Dosen Penasehat Akademik (DPA) yang telah memberikan bimbingan, nasihat, dan dukungan selama masa studi.
7. Dr. Moh. Haris Balady, S.E., M.M, selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah dengan sabar memberikan arahan, masukan, dan bimbingan berharga dalam menyusun skripsi ini.
8. Seluruh dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan ilmu kepada penulis selama perkuliahan.

Penulis menyadari dengan sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini masih banyak kekurangannya. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan masukan dari pembaca. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua para pembaca. Besar harapan skripsi ini dapat memberikan kontribusi yang positif bagi pihak-pihak yang memberikan bantuan penulis, untuk segala kerendahan hati penulis memohon maaf apabila ada kesalahan dan diucapkan terimakasih. Semoga segala amal baik yang telah Bapak/Ibu berikan kepada penulis mendapatkan balasan yang baik dari Allah SWT.

Jember, Desember 2025

Siti Kholifah

ABSTRAK

Siti Kholifah, Moh. Haris Balady, 2025: Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa Di Kecamatan Glenmore Kabupaten Banyuwangi.

Kata Kunci: Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi Masyarakat, Pengelolaan Keuangan Desa.

Pengelolaan keuangan desa merupakan fondasi utama dalam pelaksanaan pembangunan di tingkat lokal yang menuntut prinsip tata kelola yang baik, terutama dalam hal akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat. Di Kecamatan Glenmore, Kabupaten Banyuwangi, masih ditemukan berbagai persoalan dalam pengelolaan anggaran desa, seperti keterbatasan akses informasi oleh masyarakat serta kurangnya pelibatan warga dalam pengambilan keputusan keuangan desa.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Apakah akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa ? Apakah transparansi berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa? Apakah partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa? Apakah akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa?

Penelitian ini bertujuan 1) Untuk menguji pengaruh akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan desa 2) Untuk menguji pengaruh transparansi terhadap pengelolaan keuangan desa 3) Untuk menguji pengaruh partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan keuangan desa 4) Untuk menguji apakah akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa

Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian asositif kausal. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner kepada seluruh perangkat desa dari tujuh desa di Kecamatan Glenmore dengan metode sampel jenuh. Analisis data dilakukan menggunakan regresi linier berganda yang didahului oleh uji instrumen dan uji asumsi klasik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi dan partisipasi masyarakat berpengaruh secara signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa karena keterbukaan informasi dan keterlibatan masyarakat secara langsung dapat meningkatkan pengawasan serta memastikan penggunaan anggaran desa sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat, sementara akuntabilitas tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan secara parsial karena penerapannya masih bersifat administratif dan formal, sehingga belum memberikan dampak nyata terhadap peningkatan pengelolaan keuangan desa. Namun, secara simultan ketiga variabel tersebut bersama-sama memiliki pengaruh yang bermakna terhadap kualitas pengelolaan keuangan desa.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Ruang Lingkup Penelitian.....	11
1. Variabel Penelitian	11
2. Indikator Penelitian	12
F. Definisi Operasional.....	14
G. Asumsi Penelitian	21
H. Hipotesis	22
I. Sistematika Pembahasan	24
BAB II KAJIAN PUSTAKA	26
A. Penelitian Terdahulu	26
B. Kajian Teori	36

1. Teori Keagenan (<i>Agency Theory</i>)	36
2. Akuntabilitas.....	39
3. Transparansi.....	41
4. Partisipasi Masyarakat.....	44
BAB III.....	51
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	51
B. Populasi dan Sampel.....	51
C. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data.....	53
D. Analisis Data.....	54
BAB IV	61
A. Gambaran Objek Penelitian.....	61
B. Penyajian Data	68
C. Analisis dan Pengujian Hipotesis.....	74
D. Pembahasan	97
BAB V.....	111
A. Kesimpulan.....	111
B. Saran	113
DAFTAR PUSTAKA.....	115
LAMPIRAN.....	121

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Pendukung Dan Data Pembanding	3
Tabel 1.2 Anggaran Dana Desa Kecamatan Glenmore 2024	4
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	33
Tabel 3.1 Tingkat Penilaian Dan Jawaban	54
Tabel 4.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia	69
Tabel 4.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir	70
Tabel 4.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Lama Menjabat	71
Tabel 4.4 Karakteristik Jawaban Responden	72
Tabel 4.5 Hasil Uji Validitas Variabel Akuntabilitas (X1)	74
Tabel 4.6 Hasil Uji Validitas Variabel Transparansi (X2)	76
Tabel 4.7 Hasil Uji Validitas Variabel Partisipasi Masyarakat (X3)	77
Tabel 4.8 Hasil Uji Validitas Variabel Pengelolaan Keuangan Desa (Y)	78
Tabel 4.9 Uji Reliabilitas Variabel Akuntabilitas (X1)	80
Tabel 4.10 Uji Reliabilitas Variabel Transparansi (X2)	80
Tabel 4.11 Uji Reliabilitas Variabel Partisipasi Masyarakat (X3)	80
Tabel 4.12 Uji Reliabilitas Variabel Pengelolaan Keuangan Desa (Y)	81
Tabel 4.13 Uji Normalitas Kolmogorov-Smirnov	84
Tabel 4.14 Uji Multikolinearitas	85
Tabel 4.15 Analisis Regresi Linier Berganda	88
Tabel 4.16 Uji t	92
Tabel 4.17 Uji F	95
Tabel 4.18 Uji Koefisien Determinasi R ²	96

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran	21
Gambar 4.1 Peta Kecamatan Glenmore Banyuwangi.....	61
Gambar 4.1 Uji Normalitas P-Plot	83
Gambar 4.2 Uji Heteroskedastisitas Scatterplot.....	87



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan nasional di Indonesia telah mengalami pergeseran paradigma dari pembangunan yang bersifat sentralistik menuju desentralisasi dengan memberikan otonomi yang lebih luas kepada daerah. Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah memberikan kewenangan yang lebih besar kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Otonomi ini tidak hanya berhenti pada tingkat kabupaten/kota, namun juga merambah hingga ke level pemerintahan terkecil yaitu desa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Regulasi tersebut memberikan posisi strategis bagi desa sebagai subjek pembangunan yang memiliki kewenangan dalam mengelola sumber daya dan keuangannya secara mandiri.²

Desa sebagai entitas pemerintahan terkecil memiliki peran vital dalam pembangunan nasional karena menjadi garda terdepan dalam menyentuh kebutuhan masyarakat secara langsung. Keberadaan desa menjadi sangat penting mengingat sebagian besar penduduk Indonesia masih tinggal di wilayah pedesaan. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa dari 83.820 desa di Indonesia, lebih dari 70% potensi sumber daya nasional berada di wilayah pedesaan. Kondisi ini menegaskan bahwa kemajuan suatu

² Anam Miftakhul Huda Erna Puspitasari, Nur Ika Mauliyah, “Mewujudkan Prinsip Good Governance Dalam Pengelolaan Akuntabilitas Dana Desa,” *Jurnal Pemikiran & Penelitian Ekonomi* Vol. 07, no. 01 (2019): 17–26.

desa akan berkontribusi signifikan terhadap keberhasilan pembangunan nasional secara keseluruhan.

Dalam rangka mendukung pemerintahan desa untuk menjalankan fungsi dan kewenangannya, pemerintah pusat telah mengalokasikan dana yang cukup besar melalui berbagai skema pendanaan seperti Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah, serta Pendapatan Asli Desa (PADes). Dana Desa yang bersumber dari APBN terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, dimana pada tahun 2015 sebesar Rp20,7 triliun dan mencapai Rp72 triliun pada tahun 2023.³ Besarnya alokasi anggaran ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam memajukan pembangunan desa, namun di sisi lain juga memunculkan tantangan dalam pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, dan akuntabel.

Dalam konteks pengelolaan keuangan desa, prinsip-prinsip *good governance* seperti akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat menjadi sangat krusial untuk diterapkan. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, pengelolaan keuangan desa harus dilaksanakan berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif, tertib, dan disiplin anggaran.⁴ Prinsip-prinsip ini menjadi tolok ukur keberhasilan pengelolaan keuangan desa yang

³ Mitra Saputra, Yusranda, Meita Sekar Sari, and Darwin Warisi, "Pengaruh Transparansi Dan Kompetensi Aparatur Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Pada Pemerintah Desa Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan) Yusranda Saputra Meita Sekar Sari Darwin Warisi," *Jurnal Ilmiah Akutansi* 5 (2024): 56–70.

⁴ H Fadilah, A W Lubis, and Nurlaila, "Analisis Penerapan Pengelolaan Perencanaan, Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018," *SEIKO: Journal of Management & Business* Vol 6, no. 2 (2020): 28–40.

bertujuan memastikan bahwa dana yang dialokasikan untuk desa benar-benar dimanfaatkan seoptimal mungkin untuk kepentingan masyarakat desa. Penerapan prinsip-prinsip ini juga menjadi salah satu indikator keberhasilan pemerintah desa dalam melaksanakan amanat undang-undang dan memenuhi harapan masyarakat.

**Tabel 1.1
Data Pendukung dan Data Pembanding**

Variabel	Data Pendukung	Data Pembanding
Akuntabilitas	1. Beberapa desa di Glenmore belum sepenuhnya menyusun laporan keuangan sesuai standar. 2. Pengawasan internal masih terbatas.	Beberapa kecamatan lain seperti Kalibaru dan Genteng juga menghadapi masalah akuntabilitas, misalnya laporan keuangan terlambat dan tidak lengkap.
Transparansi	1. Publikasi laporan keuangan desa belum rutin. 2. Informasi mengenai penggunaan Dana Desa belum mudah diakses masyarakat.	Transparansi juga menjadi masalah di Singojuruh, Genteng, dan kecamatan lain, masyarakat sering mengeluhkan keterlambatan informasi.
Partisipasi Masyarakat	Musyawarah desa dan konsultasi publik masih minim, partisipasi warga dalam perencanaan dan pengawasan terbatas.	Partisipasi masyarakat di kecamatan lain juga rendah, terutama dalam forum musyawarah dan evaluasi penggunaan Dana Desa.

Sumber : Diolah penulis 2025

Kabupaten Banyuwangi memiliki 189 desa yang tersebar di 24 kecamatan, sehingga kebutuhan akan tata kelola keuangan desa yang berkualitas menjadi sangat penting untuk menjaga efektivitas pembangunan daerah. Meskipun pemerintah daerah telah mendorong reformasi tata kelola

desa melalui Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, kenyataannya masih banyak desa yang menghadapi tantangan dalam menerapkan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat. Permasalahan ini tidak hanya ditemukan pada satu kecamatan saja, tetapi juga muncul di beberapa kecamatan lain seperti Kalibaru, Genteng, dan Singojuruh yang dilaporkan mengalami kendala serupa, terutama dalam transparansi laporan anggaran. Hal ini menunjukkan bahwa lemahnya tata kelola keuangan desa merupakan isu umum yang perlu mendapat perhatian, bukan hanya pada lingkup Kecamatan Glenmore.

**Tabel 1. 2
Anggaran Dana Desa Kecamatan Glenmore 2024**

No	Desa	Alokasi Dana Desa 2024 (Rp)
1	Karangharjo	1.287.061.000
2	Tegalharjo	1.510.944.000
3	Bumiharjo	1.686.474.000
4	Sumbergondo	1.385.899.000
5	Margomulyo	1.123.930.000
6	Sepanjang	1.383.496.000
7	Tulungrejo	1.385.899.000

Sumber: Data Dari Kecamatan Glenmore

Kecamatan Glenmore terdiri dari 7 desa, yaitu Karangharjo, Tulungrejo, Sepanjang, Bumiharjo, Tegalharjo, Margomulyo, dan Sumbergondo. Berdasarkan data pada Tabel 1.2, total Dana Desa yang diterima oleh ketujuh desa tersebut pada tahun 2024 mencapai Rp 1,6 miliar, yang menuntut adanya pengelolaan yang disiplin, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Kondisi ini sejalan dengan beberapa kecamatan lainnya di Banyuwangi yang juga menerima dana desa dalam jumlah besar,

namun masih memiliki variasi dalam kualitas akuntabilitas dan keterbukaan informasi. Dengan kata lain, Glenmore bukan satu-satunya wilayah yang menghadapi tantangan, namun menjadi contoh representatif karena besarnya dana serta adanya keluhan masyarakat terkait keterlambatan publikasi laporan dan minimnya partisipasi dalam musyawarah desa.

Meskipun Glenmore memiliki alokasi Dana Desa yang cukup besar dan telah didukung oleh regulasi pemerintah daerah, hasil observasi awal menunjukkan masih adanya persoalan dalam aspek akuntabilitas, transparansi penyampaian informasi, serta kurangnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan. Permasalahan ini juga tercatat pada sejumlah kecamatan lain di Banyuwangi, sehingga memperlihatkan bahwa kualitas pengelolaan keuangan desa masih belum merata di seluruh daerah. Dengan adanya kecenderungan permasalahan serupa di berbagai kecamatan.

Permasalahan-permasalahan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya adalah keterbatasan kapasitas aparatur desa dalam memahami dan menerapkan regulasi terkait pengelolaan keuangan desa, kurangnya sosialisasi dan pendampingan dari pemerintah daerah, belum optimalnya sistem informasi dan komunikasi antara pemerintah desa dengan masyarakat, serta masih terbatasnya kesadaran dan pemahaman masyarakat akan hak dan kewajibannya dalam berpartisipasi aktif dalam pengelolaan keuangan desa. Kondisi geografis dan sosial budaya masyarakat di Kecamatan Glenmore yang beragam juga menjadi tantangan tersendiri dalam upaya penerapan prinsip-prinsip *good governance*. Meskipun demikian, pada praktiknya masih

ditemukan berbagai permasalahan dalam implementasi prinsip-prinsip tersebut.

Akuntabilitas merupakan suatu bentuk kewajiban untuk mempertanggungjawabkan setiap kinerja yang telah dilakukan berdasarkan amanah serta kepercayaan yang telah diberikan. Setiap organisasi, badan, ataupun lembaga, baik yang bersifat publik maupun privat, tidak dapat terlepas dari aspek akuntabilitas, karena memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan berbagai aspek fundamental dalam manajemen dan tata kelola, seperti nilai efisiensi dalam penggunaan sumber daya, efektivitas dalam pencapaian tujuan, keandalan dalam pelaporan dan transparansi, serta prediktabilitas dalam mengukur sejauh mana suatu kebijakan, strategi, atau program telah berhasil dijalankan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.⁵

Transparansi merupakan prinsip dasar dalam tata kelola pemerintahan yang menekankan keterbukaan dan kejujuran kepada masyarakat. Prinsip ini didasarkan pada hak masyarakat untuk memperoleh informasi secara jelas, akurat, dan menyeluruh mengenai kebijakan, pengelolaan sumber daya, serta pelaksanaan program pemerintahan. Transparansi juga mencerminkan bentuk pertanggungjawaban pemerintah dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan amanah yang diberikan oleh masyarakat. Dalam konteks pemerintahan, transparansi tidak hanya berkaitan dengan keterbukaan informasi, tetapi juga

⁵ Abdul Latif and Enni Savitri, "Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi Dan Kualitas Sumber Daya Manusia Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Empiris Pada Pemerintah Desa Di Kabupaten Solok, Sumatra Barat)," *Jurnal Ilmiah Akuntansi* 5, no. 2 (2021): 183–192.

mencakup akses masyarakat terhadap proses pengambilan keputusan, penggunaan anggaran, dan pelaksanaan kebijakan publik.⁶

Partisipasi masyarakat adalah keterlibatan masyarakat didalam pembangunan baik yang berbentuk pernyataan atau kegiatan dengan memberikan masukan atau pikiran, tenaga, modal, keterampilan serta ikut merasakan manfaat dan hasil dari pembangunan.⁷ Dan tujuan adanya partisipasi agar masyarakat dapat ikut serta secara langsung atau tidak langsung pada setiap kegiatan yang berkaitan dengan pembangunan desa melalui keterlibatannya dalam mengambil keputusan dan dapat melakukan pengawasan pada setiap kegiatan.

Penerapan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa di Provinsi Jawa Timur telah menunjukkan perkembangan positif seiring dengan implementasi berbagai regulasi daerah yang mendukung. Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah mengeluarkan Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa yang menekankan pentingnya ketiga aspek tersebut⁸. Selain itu, berbagai program pendampingan dan pembinaan juga

J E M B E R

⁶ Siti Alliyah, Prihasantyo Siswo Nugroho, Panca Wahyuningsih, “Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pada 10 Pemerintah Desa Di Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara),” *Jurnal Akuntansi Dan Pajak* 1, no 2 (2022): 49-56.

⁷ Nita Maina, Johny Subarkah, and Yuwita Ariessa Pravasanti, “Pengaruh Akuntabilitas , Transparansi Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Dana Desa Se- Kecamatan Sambi Boyolali,” *Jurnal Ilmiah Keuangan Akuntansi Bisnis* 1, no. 2 (2022): 51–59.

⁸ Ahmad Khoirul Imaduddin, Maslichah, and Dwiyani Sudaryanti, “Analisis Akuntabilitas, Efektivitas Dan Efisiensi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Pemerataan Pemberdayaan Masyarakat (Studi Di Desa Pucangarum Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro),” *E-Jra* 11, no. 05 (2022): 69–82.

telah dilakukan untuk meningkatkan kapasitas aparatur desa dalam mengelola keuangan desa secara akuntabel dan transparan.

Di sisi lain, tingkat partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah desa di Kecamatan Glenmore juga masih perlu ditingkatkan. Data dari Kecamatan Glenmore menunjukkan bahwa rata-rata kehadiran masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (*Musrenbangdes*) tahun 2024 hanya mencapai 60%, dan didominasi oleh tokoh masyarakat dan aparat desa, sementara keterlibatan kelompok perempuan dan pemuda masih minim. Kondisi ini mengindikasikan bahwa partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan pengelolaan keuangan desa belum optimal.

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji hubungan antara akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat dengan pengelolaan keuangan desa. Penelitian Andreani Avellyni Leda Making menunjukkan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa.⁹ Sejalan dengan itu, penelitian Sri Rahayu menemukan bahwa transparansi dan akuntabilitas berpengaruh positif terhadap pengelolaan Keuangan desa di Kecamatan Maospati Kabupaten Magetan.¹⁰ Sedangkan penelitian Rahmawati Bilatula menyimpulkan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan desa.¹¹

⁹ Andreani Avellyni Leda Making, "Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi Dan Pengawasan Terhadap Pengelolaan Dana Desa," *Jurnal Riset Manajemen Dan Bisnis* 6, no. 1 (2021): 11–18.

¹⁰ Sri Rahayu, "Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi Masyarakat, Dan Efektivitas Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa Pada Desa Se-Kecamatan Maospati Kabupaten Magetan.," (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Ponorogo, 2021).

¹¹ Rahmawati Bilatula, Nilawaty Yusuf, Mulyani Mahmud "Pengaruh Akuntabilitas , Transparansi , Partisipasi Masyarakat Dan Pengawasan Terhadap Pengelolaan Dana Desa

Meskipun demikian, masih terdapat kesenjangan dalam penelitian-penelitian sebelumnya, terutama yang berkaitan dengan konteks lokal di Kecamatan Glenmore, Kabupaten Banyuwangi. Karakteristik sosial-budaya, kondisi geografis, dan struktur pemerintahan desa yang berbeda dapat mempengaruhi implementasi prinsip akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa. Oleh karena itu, penelitian ini akan mengisi kesenjangan tersebut dengan mengkaji secara spesifik bagaimana ketiga variabel tersebut mempengaruhi pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Glenmore, Kabupaten Banyuwangi.

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "**Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi Masyarakat terhadap Pengelolaan Keuangan Desa di Kecamatan Glenmore, Kabupaten Banyuwangi**". Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis maupun praktis dalam upaya meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan desa, khususnya di Kecamatan Glenmore, Kabupaten Banyuwangi.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Glenmore Kabupaten Banyuwangi?
2. Apakah transparansi berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Glenmore Kabupaten Banyuwangi?

Terhadap Pengelolaan Dana Desa Dalam Mewujudkan Good Governance” *SEIKO : Journal of Management & Business* 6, no. 2 (2023): 326–335.

3. Apakah partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Glenmore Kabupaten Banyuwangi?
4. Apakah akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Glenmore Kabupaten Banyuwangi ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Glenmore Kabupaten Banyuwangi
2. Untuk mengetahui pengaruh transparansi terhadap pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Glenmore Kabupaten Banyuwangi
3. Untuk mengetahui pengaruh partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Glenmore Kabupaten Banyuwangi
4. Untuk mengetahui apakah akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Glenmore Kabupaten Banyuwangi

D. Manfaat Penelitian

Bagian ini berisi tentang manfaat apa yang bisa diberikan setelah proses penelitian ini dilakukan. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur mengenai hubungan antara akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa, serta memberikan dasar teoritis

untuk pengembangan kebijakan pengelolaan keuangan desa yang lebih baik.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan menambah wawasan dan pengetahuan dalam bidang akuntansi sektor publik khususnya mengenai prinsip akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan keuangan desa di kecamatan glenmore, kabupaten banyuwangi.

b. Bagi Pemerintah Desa

Penelitian ini diharapkan menjadi bahan evaluasi dalam mengelola dana desa bagi perangkat desa dan pengelola keuangan desa terhadap akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan keuangan desa di kecamatan glenmore, kabupaten banyuwangi.

c. Bagi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq

Penelitian ini diharapkan menjadi referensi dan informasi bagi mahasiswa yang lainnya dan dapat menjadi pertimbangan bagi penelitian serupa pada masa yang akan datang.

E. Ruang Lingkup Penelitian

1. Variabel penelitian

Variabel penelitian hakikatnya Ialah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh penelit untuk dipelajari sehingga diperoleh

informasi tentang hal tersebut yang nantinya akan ditarik kesimpulannya.

Secara teoritis, variabel dapat didefnisikan sebagai seseorang, atau objek yang mempunyai variasi antara satu orang dengan yang lain atau satu objek dengan objek yang lainnya.¹²

Dalam penelitian ini terdiri dari dua variabel, yaitu variabel independen atau variabel bebas dan variabel dependen atau variabel terikat, yang mana variabel ndependen merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terkait).

a. Variabel Indenden (Variabel Bebas)

- 1) Akuntabilitas (X_1)
- 2) Trasparansi (X_2)
- 3) Partisipasi Masyarakat (X_3)

b. Variabel Dependend (Variabel Terikat)

- 1) Pengelolaan Keuangan Desa (Y)

2. Indikator variabel

Indikator variabel adalah ukuran atau ciri khas yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, dan menilai suatu variabel dalam penelitian atau analisis. Indikator berfungsi sebagai alat ukur yang menjembatani konsep abstrak dalam variabel menjadi sesuatu yang dapat diobservasi dan dianalisis secara empiris. Setiap variabel dapat memiliki satu atau lebih indikator tergantung pada kompleksitas dan dimensi yang ingin diteliti.

¹² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013).

A. Indikator dari variabel independen (variabel bebas)

1) Indikator dari variabel akuntabilitas

- a) Tranparansi
- b) Pelayanan
- c) Partisipasi
- d) Profesionalisme
- e) Evaluasi¹³

2) Transparansi

- a) Informasi
- b) Aksesibilitas
- c) Ketepatan
- d) Akuntabilitas
- e) Sistem¹⁴

3) Partisipasi Masyarakat

- a) Forum

- b) Keterlibatan

- c) Akses¹⁵

B. Indikator Indikator dari variabel dependen (variabel terikat)

1) Indikator dari pengelolaan keuangan desa

- a) Perencanaan

¹³ Oktarini Khamilah Siregar et al., “Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Sekolah Terhadap Kinerja Guru Di Smp Negeri 1 Tanjungbalai,” *Jurnal Akuntansi Bisnis & Publik* 10, no. 1 (2019): 57–71.

¹⁴ M. Achsin Aries Iswahyudi, Iwan Triyuwono, “Hubungan Pemahaman Akuntabilitas , Money Dan Good Governance,” *Jurnal Ilmiah Akuntansi* 1, no. 2 (2016): 151–166.

¹⁵ Theodorus L, “Partisipasi Masyarakat Pada Pelaksanaan Dana Desa Di Desa Tuabatu Kecamatan Tampanamma Kabupaten Kepulauan Talaud,” *Jurnal Ilmiah Akuntansi* (2019), 31–41.

- b) Pelaksanaan
- c) Penatausahaan
- d) Pelaporan
- e) Pertanggung jawaban ¹⁶

F. Definisi Operasional

1. Akuntabilitas (X1)

Akuntabilitas adalah prinsip yang mewajibkan individu atau lembaga untuk bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan, khususnya dalam pengelolaan sumber daya, dengan melaporkan, menjelaskan, dan mempertanggungjawabkan hasil kerja kepada pihak terkait guna menjaga transparansi dan mencegah penyalahgunaan wewenang.¹⁷

Variabel akuntabilitas dalam penelitian ini merujuk pada persepsi masyarakat Kecamatan Glenmore terhadap pertanggungjawaban pemerintah desa dalam mengelola keuangan. Semakin tinggi akuntabilitas, semakin besar kepercayaan masyarakat terhadap transparansi dan efektivitas pengelolaan dana desa.

Adapun indikator dari akuntabilitas diantaranya seperti :

¹⁶ Riswati, “Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa,” *JEKP (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Publik)* 8, no. 1 (2021): 13–31.

¹⁷ Septiawati Septiawati, Achmad Hizazi, and Fitriani Mansur, “Akuntabilitas Dan Transparansi Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus Pada Aparat Desa Di Kecamatan Tabir Barat Kabupaten Merangin),” *Jambi Accounting Review (JAR)* 2, no. 1 (2022): 14–29.

a. Transparansi

Transparansi keuangan desa berarti keterbukaan pemerintah dalam menyampaikan informasi anggaran secara jelas, mudah diakses, dan dipahami.

b. Pelayanan

Pelayanan mencakup kualitas aparatur desa dalam administrasi dan keuangan. Layanan yang cepat, mudah, dan sesuai kebutuhan meningkatkan kepuasan serta hubungan dengan pemerintah desa.

c. Partisipasi

Partisipasi masyarakat dalam keuangan desa meliputi keterlibatan warga dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan, seperti musyawarah dan program pembangunan, guna menciptakan kebijakan yang tepat dan rasa memiliki.

d. Profesionalisme

Profesionalisme keuangan desa tercermin dalam kompetensi, integritas, dan etika kerja aparatur desa. Hal ini mencakup pemahaman regulasi, pengelolaan anggaran yang efektif, serta komitmen bekerja jujur dan adil tanpa korupsi atau nepotisme.

e. Evaluasi

Evaluasi menilai efektivitas pengelolaan keuangan desa guna mengidentifikasi kelemahan, memberikan rekomendasi, dan memastikan penggunaan dana yang efisien. Evaluasi dilakukan

secara internal atau melalui audit eksternal untuk menjaga akuntabilitas.

2. Transparansi (X2)

Transparansi adalah prinsip yang menekankan keterbukaan dalam penyampaian informasi serta kemudahan akses bagi pihak berkepentingan untuk memahami berbagai keputusan dan kebijakan yang diambil, terutama dalam konteks pemerintahan dan pengelolaan keuangan.¹⁸

Variabel transparansi dalam penelitian ini mengukur sejauh mana masyarakat Kecamatan Glenmore mendapatkan akses informasi yang jelas dan terbuka tentang pengelolaan keuangan desa. Transparansi mencakup publikasi anggaran, laporan keuangan, dan keterbukaan keputusan, yang dapat meningkatkan kepercayaan dan mencegah penyalahgunaan dana.

Adapun indikator dari transparansi diantaranya seperti :

a. Informasi

Informasi keuangan desa mencakup keterbukaan data penggunaan dana yang jelas, akurat, dan mudah dipahami. Ini meliputi laporan keuangan, rencana anggaran, dan realisasi dana untuk meningkatkan transparansi serta kepercayaan publik.

¹⁸ Achmad dan Misnaini, "Akuntabilitas Dan Trasparansi Pengelolaan Dana Desa Di Desa Duwet Panarukan Situbondo," *Jurnal Al-Idarah* 2, no. 2 (2021): 45–58.

b. Aksesabilitas

Aksesibilitas memastikan kemudahan masyarakat dalam memperoleh informasi keuangan desa melalui media digital, papan pengumuman, atau pertemuan. Dengan akses yang baik, warga dapat mengawasi dan berpartisipasi dalam kebijakan keuangan desa.

c. Ketepatan

Ketepatan keuangan desa mencakup akurasi, transparansi, dan penyampaian informasi tepat waktu. Ini memastikan data sesuai kondisi aktual serta realisasi anggaran selaras dengan rencana yang ditetapkan.

d. Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban pemerintah desa dalam mengelola dana secara transparan dan sesuai aturan. Dengan akuntabilitas tinggi, risiko penyalahgunaan berkurang dan kepercayaan publik meningkat.

e. System

Sistem keuangan desa mencakup mekanisme, prosedur, dan teknologi untuk mengelola anggaran. Penggunaan aplikasi keuangan meningkatkan efisiensi, akurasi, dan transparansi, serta memastikan kepatuhan aturan guna mencegah kesalahan dan penyalahgunaan dana.

3. Partisipasi Masyarakat (X_3)

Partisipasi masyarakat adalah keterlibatan aktif individu atau kelompok dalam proses pengambilan keputusan, perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap kebijakan atau program yang memengaruhi kehidupan mereka, termasuk dalam pengelolaan keuangan desa.¹⁹

Variabel partisipasi masyarakat dalam penelitian ini merujuk pada keterlibatan warga Kecamatan Glenmore dalam perencanaan, pengawasan, dan evaluasi keuangan desa melalui musyawarah, usulan program, dan kontrol sosial. Partisipasi yang tinggi meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Adapun indikator dari partisipasi Masyarakat diantaranya seperti :

a. Forum

Forum adalah wadah diskusi dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa, seperti musyawarah, FGD, atau platform digital. Forum yang efektif meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kedulian warga terhadap dana desa.

b. Keterlibatan

Keterlibatan mencerminkan partisipasi masyarakat dan aparatur desa dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi

¹⁹ Anita Firdaus, Suharno Suharno, and Sunarti Sunarti, "Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Sidoharjo Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen," *Jurnal Akuntansi Dan Sistem Teknologi Informasi* 15, no. 3 (2020): 291–300.

keuangan desa. Partisipasi aktif meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan peluang kontribusi dalam pengambilan keputusan.

c. Akses

Akses keuangan desa memastikan masyarakat mudah memperoleh informasi anggaran, laporan keuangan, dan penggunaan dana. Keterbukaan ini meningkatkan kepercayaan publik dan mencegah penyalahgunaan anggaran.

4. Pengelolaan Keuangan Desa (Y)

Pengelolaan keuangan desa adalah proses perencanaan hingga pertanggungjawaban penggunaan keuangan desa secara transparan dan akuntabel, mencakup berbagai sumber pendapatan untuk mendukung pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.²⁰

Variabel pengelolaan keuangan desa dalam penelitian ini mengacu pada proses perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban anggaran desa khususnya di Kecamatan Glenmore. Pengelolaan yang baik ditandai dengan transparansi, akuntabilitas, serta efektivitas penggunaan dana untuk pembangunan.

Adapun indikator dari pengelolaan keuangan desa diantaranya seperti :

a. Perencanaan

Perencanaan keuangan desa adalah tahap awal untuk menyusun penggunaan dana secara sistematis dan transparan. Ini mencakup

²⁰ Anik Wuriasih, “Akuntabilitas Finansial, Transparansi Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa,” *JFRES: Journal of Fiscal and Regional Economy Studies* 4, no. 2 (2021): 8–14.

identifikasi kebutuhan, Musrenbangdes, RKPDes, dan APBDes agar alokasi dana sesuai prioritas pembangunan.

b. Pelaksanaan

Pelaksanaan adalah penggunaan dana desa untuk pembangunan dan pemberdayaan sesuai aturan. Transparansi dan pengawasan memastikan program berjalan sesuai tujuan dan bermanfaat bagi masyarakat.

c. Penatausahaan

Penatausahaan adalah pencatatan transaksi keuangan desa secara sistematis dan akuntabel. Ini mencakup pembukuan, penyimpanan bukti, serta pelaporan berkala untuk transparansi dan kemudahan audit.

d. Pelaporan

Pelaporan adalah penyusunan dan penyampaian laporan keuangan desa, mencakup realisasi anggaran, sumber dana, dan pertanggungjawaban. Transparansi dan ketepatan waktu meningkatkan kepercayaan dan akuntabilitas.

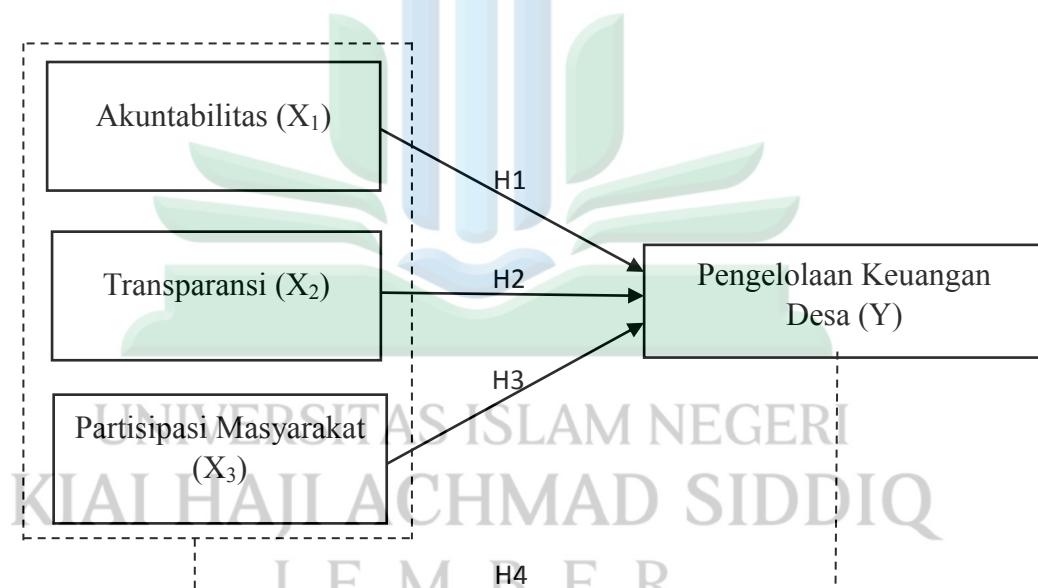
e. Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban adalah tahap akhir pengelolaan keuangan desa, di mana pemerintah desa melaporkan penggunaan dana kepada BPD, masyarakat, dan instansi terkait untuk memastikan kepatuhan, transparansi, dan akuntabilitas.

F. Asumsi Penelitian

Asumsi penelitian adalah gagasan dasar yang harus dijelaskan oleh peneliti sebelum pengumpulan data. Gagasan ini berfungsi sebagai dasar yang kuat untuk masalah yang diteliti, membantu memperkuat variabel yang akan diteliti, dan membantu merumuskan hipotesis.²¹

Pada penelitian ini berasumsi bahwa Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi Masyarakat memiliki pengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa. Untuk memudahkan penelitian ini serta menyamakan persepsi diantara dan juga pembaca tentang alur pemikiran, peneliti membuat kerangka penelitian tersebut.²²



Gambar 1.1
Kerangka Pemikiran

Keterangan :

- = Garis penghubung secara parsial.
- ↔ = Garis penghubung secara simultan.

²¹ Tim Penyusun, “Pedoman Karya Tulis Ilmiah (Jember: Uin Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021).

²² Mohammad Haris Balady, “Analisis Sikap, Norma Subyektif, Kontrol Perilaku Dan Pengalaman Penggunaan Internet Terhadap Niat Dan Perilaku Berbelanja Online Di Kota Malang,” *Jurnal Aplikasi Manajemen* 9, no.4 (2020).

Daftar nomor dibawah ini merujuk pada penelitian-penelitian yang relevan dengan setiap variabel di studi ini.

X₁ Akuntabilitas : 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11

X₂ Transparansi : 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11

X₃ Partisipasi Masyarakat : 2,6,7

1. Andreani Avellyn Leda Making	Tahun: 2021
2. Sri Rahayu	Tahun: 2021
3. Anggi Alfiani, Sri Dwi Estininggrum	Tahun: 2021
4. Abdul Latif, Enni Savitri, Susilatri	Tahun: 2021
5. Faizzatus Solihah, Biana Adha Inapty	Tahun: 2022
6. Sandra Nuzulia Rizqiana	Tahun: 2023
7. Rahmawati Bilatula, Nilawaty Yusuf	Tahun: 2023
8. Fora Susanti, Yenny Ernitawati, Roni Roni	Tahun: 2023
9. Hermanus Reo, Yuliana Sedho	Tahun: 2024
10. Kristi Geovani Tumangger, Muhammad Salman	Tahun: 2025
11. Dasilva Romedios Wakman, Zakaria	Tahun: 2025

G. Hipotesis

Pada dasarnya, hipotesis adalah jawaban dari rumusan masalah; oleh karena itu, hipotesis adalah jawaban sementara yang akan diuji melalui penelitian. Hipotesis harus diuji dengan melihat data lapangan.²³ Hipotesis berikut dapat disimpulkan dari kerangka berfikir di atas;

1. Hubungan Akuntabilitas dengan pengelolaan keuangan desa

dalam penelitian skripsi yang dilakukan oleh Abdul Latif, Enni Savitri, Susilatri, "Pengaruh akuntabilitas, Transparansi Dan Kualitas Sumber Daya Manusia Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Empiris Pada Pemerintah Desa Di Kabupaten Solok, Sumatra Barat),"

²³ Syofian Siregar, *Metode Penelitian Kuantitatif*, 4th Ed. (Jakarta: Kencana, 2017).

memperoleh hasil bahwa akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Solok, Sumatra Barat.²⁴

H1 : Terdapat pengaruh signifikan antara variabel akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan desa

2. Hubungan Transparansi dengan pengelolaan keuangan desa

dalam penelitian skripsi yang dilakukan Anggi Alfiani, "Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Sistem Akuntansi Keuangan Desa Terhadap Pengelolaan Dana Desa," memperoleh hasil bahwa transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa.²⁵

H2: Terdapat pengaruh signifikan antara variabel Transparansi terhadap pengelolaan keuangan desa

3. Hubungan partisipasi masyarakat dengan pengelolaan keuangan desa

Dalam jurnal penelitian yang di tulis oleh Rahmawati Bilatula, "Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi Masyarakat Dan Pengawasan Terhadap Pengelolaan Dana Desa Dalam Mewujudkan Good Governance," memperoleh hasil bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh positif dan sifnifikan terhadap pengelolaan dana desa.²⁶

²⁴ Abdul Latif, Enni Savitri, "Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi Dan Kualitas Sumber Daya Manusia Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Empiris Pada Pemerintah Desa Di Kabupaten Solok, Sumatra Barat)," *Jurnal Ilmiah Akuntansi* Vol 5, no 2, (2021), 183-192

²⁵ Anggi Alfiani and Sri Dwi Estiningrum, "Pengaruh Akuntabilitas And Transparansi Dan Sistem Akuntansi Keuangan Desa Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa," *Ekuitas: Jurnal Pendidikan Ekonomi* 9, no 2 (2021): 222.

²⁶ Bilatula et al., "Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi Masyarakat Dan Pengawasan Terhadap Pengelolaan Dana Desa Dalam Mewujudkan Good Goverance" *SEIKO: Journal of Management & Business*, Vol 6. no. 2 (2023): 326-335.

H3: Terdapat pengaruh signifikan antara variabel Partisipasi Masyarakat terhadap pengelolaan keuangan desa

4. Hubungan Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi Masyarakat dengan pengelolaan keuangan desa

dalam jurnal penelitian yang di tulis oleh Hans Z. Kaiwai, Vanessa Irene Mayor,"Analisis Pengaruh akuntabilitas, Transparansi Dan Partisipasi masyarakat Terhadap Pengelolaan dana Desa Di Kampung Enggros kota Jayapura," memperoleh hasil bahwa Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi Masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap Terhadap Pengelolaan dana Desa Di Kampung Enggros kota Jayapura.²⁷

H4: Terdapat pengaruh signifikan antara variabel Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi Masyarakat terhadap pengelolaan keuangan desa

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN, berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup (variabel dan indikator penelitian), devinisi operasional, asumsi penelitian, hipotesis, dan diskusi sistematik tentang Pengaruh Akuntabilitas, Trsansparansi Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa Di Kecamatan Glenmore Kabupaten Banyuwangi.

²⁷ Hans Z. Kaiwai et al., "Analisis Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Dana Desa Di Kampung Enggros Kota Jayapura," *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Studi Pembangunan* 7, no. 1 (2022): 1–19.

BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN, berisi penelitian sebelumnya dan studi teori yang berkaitan dengan Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa Di Kecamatan Glenmore Kabupaten Banyuwangi.

BAB III METODE PENELITIAN, berisi pendekatan dan jenis penelitian, populasi dan sampel, teknik, instrumen pengumpulan data, dan analisis data yang digunakan dalam meneliti Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa Di Kecamatan Glenmore Kabupaten Banyuwangi.

BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS, berisi gambaran objek penelitian, penyajian data, analisis, pengujian hipotesis, dan pembahasan mengenai Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa Di Kecamatan Glenmore Kabupaten Banyuwangi.

BAB V PENUTUP, berisi kesimpulan dan rekomendasi yang bertujuan untuk membangun dan memperbaiki hubungan antara semua pihak yang terlibat, terutama lembaga yang disurvei.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Peneliti telah memfokuskan penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi terhadap Pengelolaan keuangan desa sebagai berikut :

1. Andreani Avelyni Leda Making. Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi Dan Pengawasan Terhadap Pengelolaan Dana Desa.²⁸

Penelitian ini bertujuan untuk menguji menguji pengaruh akuntabilitas, transparansi, dan pengawasan terhadap pengelolaan dana desa pada desa Dikesare kecamatan Lebatukan kabupaten Lembata. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif. Hasil dari Penelitian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif terhadap pengelolaan dana desa, transparansi tidak berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa, dan pengawasan berpengaruh positif terhadap pengelolaan dana desa.

2. Sri Rahayu. Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi Masyarakat, Dan Efektivitas Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa Pada Desa Se-Kecamatan Maospati Kabupaten Magetan.²⁹

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh akuntabilitas, transparansi, partisipasi masyarakat, dan efektivitas

²⁸ Making, “Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi Dan Pengawasan Terhadap Pengelolaan Dana Desa.” *Jurnal Riset Manajemen dan Bisnis*, Vol 6, no 1, (2021), 11-18

²⁹ Rahayu, “Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi Masyarakat, Dan Efektivitas Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa Pada Desa Se-Kecamatan Maospati Kabupaten Magetan.” (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Ponorogo, 2021).

terhadap pengelolaan keuangan desa pada desa se-kecamatan maospati kabupaten magetan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif. Hasil penelitian hipotesis pertama menunjukkan bahwa secara parsial akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa. Hipotesis kedua menunjukkan bahwa secara parsial transparansi berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa. Hipotesis ketiga menunjukkan bahwa secara parsial partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa. Hipotesis keempat menunjukkan bahwa secara simultan efektivitas berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa.

3. Anggi Alfiani, Sri Dwi Estiningrum. Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Sistem Akuntansi Keuangan Desa Terhadap Pengelolaan Dana Desa.³⁰

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh transparansi, partisipasi masyarakat, kompetensi aparatur desa, dan pemahaman regulasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di kabupaten padang pariaman. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Transparansi berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Kompetensi aparatur desa berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

³⁰ Anggi Alfiani and Sri Dwi Estiningrum, “Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi Dan Sistem Akuntansi Keuangan Desa Dalam Pengelolaan Keuangan Desa,” *Ekuitas: Jurnal Pendidikan Ekonomi* 9, no. 2 (2021): 222.

4. Abdul Latif, Enni Savitri, Susilatri. Pengaruh akuntabilitas, Transparansi Dan Kualitas Sumber Daya Manusia Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Empiris Pada Pemerintah Desa Di Kabupaten Solok, Sumatra Barat).³¹

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruhnya dalam pengelolaan keuangan desa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa analisis regresi linier berganda menunjukkan adanya pengaruh akuntabilitas, transparansi serta sistem akuntansi keuangan desa dalam pengelolaan keuangan desa yang ada di desa Pule, Kecamatan Pule Kabupaten Trenggalek.

5. Faizzatus Solihah, Biana Adha Inapty, Adhitya Bayu Suryantara. Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas Dan Peran Perangkat Desa Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Empiris Pada Desa Se-Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur).³²

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh transparansi, akuntabilitas, dan peran perangkat desa terhadap pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif. Hasil dari penelitian ini

³¹ Abdul Latif, Enni Savitri, “Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi Dan Kualitas Sumber Daya Manusia Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Empiris Pada Pemerintah Desa Di Kabupaten Solok, Sumatra Barat).” *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, Vol 5, no 2, (2021), 183-192

³² Adhitya Bayu Suryantara. Faizzatus Solihah, Biana Adha Inapty, “Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas Dan Peran Perangkat Desa Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Empiris Pada Desa Se-Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur),” *Risma* 2 (2022): 136–154.

menunjukkan bahwa transparansi, akuntabilitas dan peran perangkat desa berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan desa.

6. Sandra Nuzulia Rizqiana. Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Sistem Akuntansi Keuangan Desa Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Empiris pada Desa Tanjungmojo, Kecamatan Kangkung, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah).³³

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas, transparansi, sistem akuntansi keuangan desa dan partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan keuangan desa di Desa Tanjungmojo, Kecamatan Kangkung, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem akuntansi keuangan desa dan partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan desa. Sementara itu, akuntabilitas dan transparansi tidak berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa.

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R**

³³ Sandra Nuzulia Rizqiana, “Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Sistem Akuntansi Keuangan Desa Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Empiris Pada Desa Tanjungmojo, Kecamatan Kangkung, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah).,” (Skripsi, Universitas Islam Indonesia, 2023).

7. Rahmawati Bilatula, Nilawaty Yusuf, SE., Ak., M.Si, Muliyani Mahmud, S.Pd., MSA. Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi Masyarakat Dan Pengawasan Terhadap Pengelolaan Dana Desa Terhadap Pengelolaan Dana Desa Dalam Mewujudkan Good Governance.³⁴

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh dari akuntabilitas, transparansi, partisipasi masyarakat dan pengawasan terhadap pengelolaan dana desa dalam mewujudkan good governance pada Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara. Metode penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Akuntabilitas berpengaruh positif terhadap pengelolaan dana desa dalam mewujudkan good governance, Transparansi berpengaruh positif terhadap pengelolaan dana desa dalam mewujudkan good governance, Partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap pengelolaan dana desa dalam mewujudkan good governance dan Pengawasan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan dana desa dalam mewujudkan good governance, dan variabel bebas Akuntabilitas, transparansi, partisipasi masyarakat dan pengawasan secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan dana desa dalam mewujudkan good governance Pada Pemerintah Desa Di Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara.

³⁴ Bilatula et al., “Pengaruh Akuntabilitas , Transparansi , Partisipasi Masyarakat Dan Pengawasan Terhadap Pengelolaan Dana Desa Terhadap Pengelolaan Dana Desa Dalam Mewujudkan Good Governance.” *SEIKO : Journal of Management & Business*, Vol 6, no 2, (2023), 326-335

8. Fora Susanti, Yenny Ernitawati, Roni Roni. Analisis Transparansi, Akuntabilitas, Dan Peran Aparat Desa Dalam Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus Di Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes).³⁵

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, dan Peran Aparatur Desa, baik secara individu maupun kolektif, terhadap pengelolaan keuangan desa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Transparansi, Akuntabilitas, dan Peran Aparatur Desa secara signifikan dan independen berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa.

9. Hermanus Reo, Yuliana Sedho. Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Sistem Akuntansi Keuangan Desa Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus Pada Desa Ulupulu Kecamatan Nangaroro, Kabupaten Nagekeo).³⁶

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Akuntabilitas, Transparansi Dan Sistem Akuntansi Keuangan Desa terhadap Pengelolaan Keuangan Desa pada Desa Ulupulu, Kecamatan Nangaroro, Kabupaten Nagekeo. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa

³⁵ Roni Roni Fora Susanti, Yenny Ernitawati, “Analysis Of Transparency , Accountability And Role Of Village Officials In Village Financial Management (Case Study In Wanasari District , Brebes Regency),” *Jurnal Ekonomi* 12, no. 03 (2023): 1706–1718.

³⁶ Yuliana Sedho Hermanus Reo, “Sistem Akuntansi Keuangan Desa Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus Pada Desa Ulupulu Kecamatan Nangaroro, Kabupaten Ngegeo),” *JSE: Jurnal Sharia Economica* 4, no. 4 (2025).

Akuntabilitas, Transparansi Dan Sistem Akuntansi Keuangan berpengaruh terhadap Pengelolaan Keuangan Desa.

10. Kristi Geovani Tumanger, Muhammad Salman, Nasrul Kahfi Lubis. Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas Dan Peran Perangkat Desa Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa di Kecamatan Tinada.³⁷

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pengaruh transparansi, akuntabilitas dan peran perangkat desa terhadap pengelolaan keuangan desa di kecamatan Tinada, kabupaten Pakpak Bharat. Metode penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa transparansi berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa, akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa dan peran perangkat desa berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa.

11. Dasilva Romedios Wakman, Zakaria, Fahrudin Pasolo, Abdul Rasyid, Ridwan Rumasukun. Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Pengelolaan Keuangan Dana Desa Distrik Elelim Kabupaten Yalimo.³⁸

Tujuan penelitian ini untuk mengkaji dampak, akuntabilitas, transparansi dan pengendalian internal terhadap pengelolaan dana desa pada Distrik Elelim di Kabupaten Yalimo. Metode yang

³⁷ nasrul Kahfi Lubis. Kristi Geovani Tumanger, Muhammad Salman, “Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas Dan Peran Perangkat Desa Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa Di Kecamatan Tinada,” *Jurnal Mahasiswa Akuntansi Samudra (JMAS)* 6, no. 5 (2025): 293–308.

³⁸ Ridwan Rumasukun. Dasilva Romedios Wakman, Zakaria, Fahrudin Pasolo, Abdul Rasyid, “Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pengelolaan Keuangan Dana Desa Distrik Elelim Kabupaten Yalimo.,” *Economics and Digital Business Review* 6, no. 2 (2025): 1287–1301.

digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, dan sistem pengendalian internal secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana desa di Distrik Elelim, Kabupaten Yalimo.

**Tabel 2. 1
Penelitian terdahulu**

No	Nama dan tahun penelitian	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Andreani Avellyni Leda Making. (2021)	Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi Dan Pengawasan Terhadap Pengelolaan Dana Desa.	Penelitian ini memiliki persamaan dalam membahas pengaruh transparansi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.	Penelitian sebelumnya membahas tentang Pengawasan, sedangkan penelitian sekarang tidak membahas tentang pengawasan.
2	Sri Rahayu. (2021)	Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi Masyarakat, Dan Efektivitas Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa Pada Desa Se-Kecamatan Maospati Kabupaten Magetan	Penelitian ini memiliki persamaan dalam membahas Akuntabilitas, Transparansi dan partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan keuangan desa..	Penelitian terdahulu membahas tentang Efektifitas sedangkan penelitian sekarang tidak membahas Efektifitas.
3	Anggi Alfiani, (2021)	Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Sistem Akuntansi Keuangan Desa Terhadap Pengelolaan Dana Desa	Penelitian ini memiliki persamaan dalam membahas Akuntabilitas, Transparansi terhadap pengelolaan keuangan desa.	Penelitian sebelumnya membahas tentang Sistem Akuntansi Keuangan, sedangkan penelitian sekarang tidak membahas tentang Sistem Akuntansi Keuangan
4	Abdul Latif, (2021)	Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi Dan Kualitas Sumber Daya Manusia Terhadap	Penelitian ini memiliki persamaan dalam membahas Akuntabilitas,	Penelitian sebelumnya membahas tentang Kualitas Sumber

No	Nama dan tahun penelitian	Judul	Persamaan	Perbedaan
		Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Empiris Pada Pemerintah Desa Di Kabupaten Solok, Sumatra Barat)	Transparansi terhadap pengelolaan keuangan desa.	Daya Manusia sedangkan penelitian sekarang tidak membahas tentang Kualitas Sumber Daya Manusia
5	Faizzatus Solihah, (2022)	Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas Dan Peran Perangkat Desa Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Empiris Pada Desa Se-Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur)	Penelitian ini memiliki persamaan dalam membahas Akuntabilitas, Transparansi terhadap pengelolaan keuangan desa.	Penelitian sebelumnya membahas tentang Peran Perangkat Desa sedangkan penelitian sekarang tidak membahas tentang Peran Perangkat Desa
6	Sandra Nuzulia Rizqiana. (2023)	Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Sistem Akuntansi Keuangan Desa Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Empiris pada Desa Tanjungmojo, Kecamatan Kangkung, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah)	Penelitian ini memiliki persamaan dalam membahas Akuntabilitas, Transparansi terhadap pengelolaan keuangan desa.	Penelitian sebelumnya membahas tentang Sistem Akuntansi Keuangan Desa sedangkan penelitian sekarang tidak membahas tentang Sistem Akuntansi Keuangan Desa
7	Rahmawati Bilatula, (2023)	Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi Masyarakat Dan Pengawasan Terhadap Pengelolaan Dana Desa Dalam Mewujudkan Good Governance	Penelitian ini memiliki persamaan dalam membahas Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi Masyarakat terhadap pengelolaan keuangan desa.	Penelitian sebelumnya membahas tentang Pengawasan sedangkan penelitian sekarang tidak membahas tentang Pengawasan
8	Fora Susanti, (2023)	Analisis Transparansi, Akuntabilitas, Dan Peran Aparat Desa Dalam Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus Di Kecamatan	Penelitian ini memiliki persamaan dalam membahas Akuntabilitas, Transparansi terhadap pengelolaan	Penelitian sebelumnya membahas tentang Peran Aparat Desa sedangkan penelitian sekarang tidak

No	Nama dan tahun penelitian	Judul	Persamaan	Perbedaan
		Wanasari, Kabupaten Brebes)	keuangan desa.	membahas tentang Peran Aparat Desa
9	Hermanus Reo, (2024)	Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Sistem Akuntansi Keuangan Desa Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus Pada Desa Ulupulu Kecamatan Nangaroro, Kabupaten Nagekeo)	Penelitian ini memiliki persamaan dalam membahas Akuntabilitas, Transparansi terhadap pengelolaan keuangan desa.	Penelitian sebelumnya membahas tentang Sistem Akuntansi Keuangan sedangkan penelitian sekarang tidak membahas tentang Sistem Akuntansi Keuangan
10	Kristi Geovani Tumangger, (2025)	Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas Dan Peran Perangkat Desa Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa di Kecamatan Tinada	Penelitian ini memiliki persamaan dalam membahas Akuntabilitas, Transparansi terhadap pengelolaan keuangan desa.	Penelitian sebelumnya membahas tentang Peran Perangkat Desa sedangkan penelitian sekarang tidak membahas tentang Peran Perangkat Desa
11	Dasilva Romedios Wakman, (2025)	Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Pengelolaan Keuangan Dana Desa	Penelitian ini memiliki persamaan dalam membahas Akuntabilitas, Transparansi terhadap pengelolaan keuangan desa	Penelitian sebelumnya membahas tentang Sistem Pengenalian Internal sedangkan penelitian sekarang tidak membahas tentang Sistem Pengenalian Internal

Diolah oleh Penulis 2025

Penelitian sebelumnya dan penelitian ini menunjukkan bahwa ada kesamaan dalam pembahasan mengenai pengelolaan keuangan desa,

khususnya dalam aspek transparansi, akuntabilitas, serta partisipasi masyarakat. Namun, terdapat perbedaan dalam penelitian yang digunakan, yaitu beberapa variabel yang berbeda, penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan analisis berbasis data statistik. Selain itu, penelitian sebelumnya cenderung berfokus pada satu atau beberapa faktor tertentu secara terpisah, seperti transparansi, partisipasi masyarakat, atau Pengawasan, sementara penelitian ini mengintegrasikan beberapa faktor sekaligus untuk mendapatkan pemahaman yang lebih menyeluruh. Perbedaan lainnya terletak pada variabel yang dianalisis, di mana penelitian sebelumnya membahas faktor seperti Efektifitas, Sitem Akuntansi Keuangan, Kualitas Sumber Daya Manusia, dan peran perangkat desa, sedangkan penelitian ini lebih menekankan pada transparansi, partisipasi masyarakat, dan akuntabilitas sebagai faktor utama dalam pengelolaan keuangan desa. Dengan adanya perbedaan ini, penelitian ini memberikan kontribusi baru dalam pengembangan studi mengenai pengelolaan keuangan desa dengan pendekatan yang lebih komprehensif dan berbasis data kuantitatif.

B. Kajian Teori

1. Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Menurut Jensen, hubungan keagenan merupakan suatu hubungan di mana satu pihak (prinsipal) memberikan mandat kepada pihak lain (agen) untuk melaksanakan tugas atas nama mereka. Dalam konteks pemerintahan, rakyat berperan sebagai prinsipal yang memberikan kepercayaan kepada pemerintah sebagai agen untuk mengelola sumber

daya publik dan menjalankan kebijakan demi kepentingan masyarakat. Namun, konflik keagenan dapat muncul ketika pemerintah sebagai agen lebih memprioritaskan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu dibandingkan kepentingan publik. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme akuntabilitas dan transparansi agar tindakan pemerintah dapat diawasi serta diarahkan sesuai dengan tujuan utama, yaitu kesejahteraan rakyat. Dengan penerapan prinsip akuntabilitas yang kuat, potensi penyimpangan dalam pengelolaan pemerintahan dapat diminimalkan, dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dapat terjaga.³⁹

Teori ini muncul seiring dengan perkembangan riset akuntansi yaitu perubahan dari perkembangan model ekonomi. Struktur kepemilikan mempengaruhi dalam pengambilan risiko. Sama halnya dengan diversifikasi, hanya pemilik pengendali yang dapat memengaruhi keputusan untuk mengambil risiko guna memaksimalkan pendapatan. Dalam Ghozali, Fama dan Jensen mengklaim bahwa menggabungkan kepemimpinan dengan bantuan dalam mengelola pemegang saham terkonsentrasi mengubah pendapatan menjadi sewa pribadi. Teori ini menunjukkan bahwa kepentingan prinsipal dan agen mungkin bertentangan. Untuk mencegah perilaku oportunistik dari pengawasan agen, prinsipal mengembangkan struktur mekanisme di dalamnya.

Dalam teori agensi, hubungan antara prinsipal seringkali menghadapi masalah informasi asimetris, di mana memiliki informasi

³⁹ Bambang Lesmono, Saparuddin Siregar "Studi Literatur Tentang Agency Theory" *Ekonomi, Keuangan, Investasi dan Syariah (EKUITAS)*" Vol 3, no 2, (2021): 203-210.

lebih mengenai operasional dibandingkan ketidakseimbangan informasi ini dapat menimbulkan konflik kepentingan dan meningkatkan biaya agensi. Untuk mengurangi masalah tersebut, penerapan transparansi dan akuntabilitas menjadi penting.

Transparansi merujuk pada keterbukaan manajemen dalam menyampaikan data yang relevan dan tepat tentang kinerja perusahaan kepada pemangku kepentingan. Dengan transparansi yang baik, pemerintah dapat memantau dan mengevaluasi kinerja secara efektif, sehingga mengurangi kemungkinan penyalahgunaan wewenang. Hal ini sejalan dengan pernyataan bahwa transparansi dapat meningkatkan kepercayaan dan mengurangi ketidakpastian dalam hubungan agensi.⁴⁰

Akuntabilitas berkaitan dengan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keputusan dan tindakan mereka. Akuntabilitas memastikan bahwa pemerintah menjalankan operasional sesuai dengan kepentingan pemilik dan tujuan perusahaan. Peningkatan akuntabilitas dapat dicapai melalui pelaporan keuangan yang tepat waktu dan sesuai standar, serta mekanisme pengawasan yang efektif.⁴¹

Penerapan transparansi dan akuntabilitas yang baik dapat berdampak positif pada pengelolaan keuangan. Dengan informasi yang jelas dan pertanggungjawaban yang terstruktur, pengambilan keputusan

⁴⁰ Idah Rosidah, Priatna Kesumah, and Royke Bahagia Rizka, “Transparasi Dan Akuntabilitas Dalam Pencegahan Fraud Diinstansi Pemerintah (Studi Kasus Kantor Kec. Ciwidey),” *Jurnal Ekonomi Manajemen Bisnis Dan Akuntansi: EMBA* 2, no. 1 (2023): 137–156.

⁴¹ Al Azhar Anggi Risma Warni, Edfan Darlis, “Membangun Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Melalui Kompetensi, Kejelasan Sasaran Anggaran, Dan Sistem Pelaporan,” *Jurnal Kajian Akuntansi Dan Bisnis Terkini* 6, no. 2 (2025): 272–285.

menjadi lebih efektif, efisiensi operasional meningkat, dan kepercayaan dapat terjaga. Sebagai contoh, penelitian menunjukkan bahwa pemahaman akuntansi yang baik berpengaruh positif terhadap kinerja manajerial mereka.⁴²

2. Pengertian Akuntabilitas

- a. Akuntabilitas merupakan prinsip yang menuntut setiap individu atau organisasi untuk bertanggung jawab atas keputusan, tindakan, dan kebijakan yang diambil, terutama dalam kaitannya dengan pemenuhan kewajiban terhadap pemangku kepentingan. Akuntabilitas sering dikaitkan dengan konsep transparansi dan tata kelola yang baik (good governance), di mana pihak yang diberi amanah harus mampu memberikan laporan dan mempertanggungjawabkan segala aktivitas yang dilakukan. Akuntabilitas adalah bentuk kewajiban untuk menjawab atau mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Akuntabilitas tidak hanya berlaku dalam sektor pemerintahan, tetapi juga dalam dunia bisnis, organisasi non-pemerintah, hingga kehidupan sosial masyarakat.⁴³

Dalam konteks pemerintahan, akuntabilitas menjadi dasar dalam penyelenggaraan administrasi negara yang transparan dan

⁴² Pardomuan Ritonga, “Transparansi Dan Akuntabilitas: Peran Audit Dalam Meningkatkan Kepercayaan Stakeholder,” *Equilibrium: Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi* 13, no. 2 (2024): 323–336.

⁴³ Muhammad Fikri Haikal, “Akuntabilitas Dan Transparansi Dalam Pelayanan Publik (Studi Kasus Pelayanan E-KTP Di Kantor Kecamatan Tallo Makassar),” *Jurnal Administrasi Negara* 28, no. April (2022): 89–112.

efisien. Pemerintah dituntut untuk mempertanggungjawabkan kebijakan publik, penggunaan anggaran, serta implementasi program-program pembangunan kepada masyarakat. Hal ini bertujuan untuk menciptakan kepercayaan publik serta memastikan bahwa kebijakan yang dibuat benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat. Akuntabilitas dalam pemerintahan dapat dibedakan menjadi beberapa bentuk, seperti akuntabilitas keuangan, akuntabilitas kinerja, akuntabilitas hukum, dan akuntabilitas politik. Akuntabilitas keuangan berkaitan dengan pengelolaan anggaran secara transparan dan dapat diaudit, sementara akuntabilitas kinerja berfokus pada pencapaian hasil yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Selain dalam pemerintahan, akuntabilitas juga menjadi prinsip utama dalam dunia bisnis dan organisasi. Perusahaan dituntut untuk bertanggung jawab tidak hanya kepada pemegang saham, tetapi juga kepada konsumen, karyawan, dan masyarakat luas. Akuntabilitas dalam bisnis mencakup aspek keuangan, keberlanjutan lingkungan, serta tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility/CSR). Organisasi yang menerapkan prinsip akuntabilitas dengan baik akan lebih dipercaya oleh publik dan memiliki reputasi yang lebih baik. Oleh karena itu, penerapan akuntabilitas yang kuat dalam berbagai sektor akan menciptakan tata kelola yang lebih baik, mengurangi risiko korupsi dan penyalahgunaan wewenang, serta meningkatkan efektivitas dalam pencapaian tujuan.

b. Prinsip-Prinsip Akuntabilitas

Dalam penerapan akuntabilitas pada instansi pemerintahan, terdapat beberapa prinsip penting yang perlu diperhatikan, yaitu:

- 1) Adanya komitmen dari pimpinan serta seluruh pegawai instansi untuk melaksanakan pengelolaan yang berorientasi pada akuntabilitas.
- 2) Diperlukan sistem yang mampu menjamin bahwa penggunaan sumber daya dilakukan secara konsisten sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- 3) Pelaksanaan kegiatan harus dapat menunjukkan tingkat keberhasilan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
- 4) Seluruh aktivitas berfokus pada pencapaian visi, misi, serta hasil dan manfaat yang ingin diwujudkan.
- 5) Menjunjung tinggi kejujuran, objektivitas, transparansi, serta inovasi sebagai wujud peran instansi pemerintah dalam memperbarui metode dan teknik pengukuran kinerja serta penyusunan laporan akuntabilitas.⁴⁴

3. Transparansi

a. Pengertian Transparansi

Salah satu aspek utama dalam mewujudkan pemerintahan yang baik adalah transparansi. Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik

⁴⁴ Evi Yuniarni, Abdul Jabar, "Penerapan Prinsip Akuntabilitas Dalam Pelayanan Publik Untuk Mewujudkan Good Governance," *Jurnal Ekonomi Manajemen Bisnis Dan Akuntansi: EMBA* 4, no. 1 (2025): 131–146.

menuntut adanya keterbukaan, partisipasi, serta kemudahan akses bagi masyarakat terhadap proses penyelenggaraan pemerintahan. Keterbukaan dan kemudahan memperoleh informasi mengenai pelaksanaan pemerintahan berperan penting dalam mendukung tercapainya berbagai indikator good governance lainnya.⁴⁵

Transparansi berarti keterbukaan suatu organisasi dalam menyampaikan informasi yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya publik kepada para pemangku kepentingan. Keterbukaan dalam pengelolaan keuangan dan sumber daya publik merupakan salah satu prinsip utama good governance yang wajib diterapkan oleh organisasi sektor publik. Prinsip ini memiliki peran yang sangat penting karena pemerintah memiliki otoritas untuk menetapkan berbagai keputusan yang berpengaruh terhadap masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat perlu mengetahui kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah agar dapat mencegah terjadinya kebohongan maupun tindakan korupsi dari berbagai pihak.

Transparansi memberikan pengaruh positif terhadap tata kelola pemerintahan. Dengan adanya keterbukaan, tingkat akuntabilitas para pembuat kebijakan akan meningkat, sehingga pengawasan masyarakat terhadap pihak yang memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan dapat berjalan lebih efektif. Beberapa manfaat penting dari transparansi anggaran antara lain dapat mencegah praktik korupsi,

⁴⁵ Mardiasmo, “Akuntansi Sektor Publik” (Yogyakarta: ANDI, 2009).

memudahkan proses identifikasi terhadap kelemahan maupun keunggulan suatu kebijakan, serta meningkatkan akuntabilitas pemerintah. Selain itu, transparansi juga membantu masyarakat dalam menilai kinerja pemerintah, memperkuat kepercayaan terhadap komitmen pemerintah dalam menetapkan kebijakan, membangun kohesi sosial melalui tumbuhnya kepercayaan publik, dan menciptakan iklim investigasi yang kondusif sehingga dapat meningkatkan kepastian dalam dunia usaha.⁴⁶

b. Tujuan Transparansi

Adapun tujuan transparansi terhadap pengelolaan keuangan yang dapat dirasakan oleh stakeholders dan lembaga adalah:

1. Mencegah Mencegah sedini mungkin terjadinya penyimpangan-penyimpangan melalui kesadaran masyarakat dengan adanya kontrol sosial.
2. Menghindari kesalahan komunikasi dan perbedaan persepsi.
3. Mendorong masyarakat untuk belajar bertanggung jawab dan bertanggung gugat terhadap pilihan keputusan dan pelaksanaan kegiatan.
4. Membangun kepercayaan semua pihak dari kegiatan yang dilaksanakan.⁴⁷

⁴⁶ Safrul Rijali Siti Nurbadaliah, "Transparansi Pelayanan Publik Di Desa Kapar Kecamatan Murung," *Jurnal Akuntansi Bisnis & Publik* 6, no. 1 (2023): 276–279.

⁴⁷ Mahle Muhammad Ridwan Nasirwan, "Akuntabilitas Dan Transparansi Berbasis Bagi Hasil (Analisis Terhadap Karyawan Toko Di Kota Beureunuen)," *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 2, no. 2 (2017): 1–20.

c. Prinsip-Prinsip Transparansi

Menurut Humanitarian Forum Indonesia (FHI), terdapat 6 prinsip utama dalam transparansi, yaitu:

1. Tersedianya informasi yang mudah dipahami dan diakses oleh publik, meliputi data mengenai pendanaan, metode pelaksanaan, serta bentuk bantuan atau program yang dijalankan.
2. Adanya publikasi melalui berbagai media yang memuat proses kegiatan serta rincian keuangan secara terbuka.
3. Penyediaan laporan berkala yang dapat diakses masyarakat, mencakup informasi tentang penggunaan sumber daya dan perkembangan proyek.
4. Penyusunan serta penyampaian laporan tahunan sebagai bentuk pertanggungjawaban organisasi.
5. Pemanfaatan situs web atau media publik lainnya untuk menyebarkan informasi organisasi secara transparan.
6. Adanya pedoman atau aturan yang mengatur tata cara penyebaran informasi agar berjalan secara sistematis dan terbuka.

4. Pengertian Partisipasi Masyarakat

a. Pengertian partisipasi masyarakat

Partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses identifikasi masalah dan potensi dimasyarakat, pengambilan keputusan tentang alternatif untuk menangani masalah, mengatasi masalah yang berkaitan dengan pelaksanaan

kegiatan, evaluasi perubahan yang terjadi dan keterlibatan masyarakat dalam proses pelaksanaan kegiatan. Menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa, menyatakan aspirasi, pemikiran dan kepentingan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.⁴⁸

b. Prinsip-prinsip partisipasi masyarakat

Beberapa prinsip partisipasi yang dibentuk oleh Departemen for International Development (DFID) mengenai panduan pendekatan pelaksanaan partisipatif menurut Sumampouw yaitu:

1. Cakupan. Semua orang atau sekelompok orang yang terkena dampak dari hasil suatu kebijakan pembangunan.
2. Kesetaraan dan kemitraan. Setiap orang memiliki kemampuan, keterampilan dan prakarsa serta mempunyai hak untuk menggunakan prakarsa tersebut dalam setiap proses untuk membangun dialog tanpa memperhitungkan jenjang struktur masing-masing pihak
3. Transparansi. Setiap elemen masyarakat harus menumbuh kembangkan komunikasi dan iklim komunikasi yang terbuka dan kondusif sehingga menimbulkan dialog dua arah.

⁴⁸ Wulandari Abdullah, Hartati Tuli, and Nurharyati Panigoro, “Pengaruh Akuntabilitas Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Pada Desa Di Kecamatan Dungaliyo Kabupaten Gorontalo),” *JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi)* 9, no. 5 (2023): 2186–2194.

4. Kesetaraan dan kewenangan. Setiap pihak yang terlibat harus dapat menyeimbangkan pendeklasian kewenangan dan kekuasaan agar tidak terjadi dominasi.
5. Kesetaraan tanggung jawab. Setiap pihak memiliki tanggung jawab yang jelas dalam setiap proses karena adanya kesetaraan kewenangan dan keterlibatannya dalam setiap proses pengambilan keputusan.
6. Pemberdayaan. Keterlibatan seluruh elemen masyarakat tidak terlepas dari kelebihan dan kekurangannya, sehingga melalui keterlibatan aktif dalam setiap kegiatan terjadi suatu proses saling belajar dan memberdayakan.
7. Kerjasama. Diperlukan adanya kerjasama berbagai pihak yang terlibat untuk saling terlepas dari kelebihan untuk mengurangi berbagai kelemahan yang ada khususnya yang berkaitan dengan peningkatan sumber daya manusia.⁴⁹

5. Pengelolaan keuangan desa

a. Pengertian pengelolaan keuangan desa

Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Dalam mewujudkan tata kelola yang baik dalam penyelenggaraan desa, pengelolaan keuangan desa dilakukan berdasarkan hakekat tata kelola yaitu transparan, akuntabel

⁴⁹ Normina , “Partisipasi Masyarakat Dalam Pendidikan,” *Ittihad* 14, no. 26 (2016): 71–85.

dan partisipasi serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Transparansi, akuntabel dan partisipasi dalam pengelolaan keuangan desa merupakan aspek penting dalam menciptakan tata kelola yang baik. Pengelolaan keuangan desa, dikelola dalam masa 1 tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.⁵⁰

b. Prinsip-prinsip pengelolaan keuangan desa

Untuk mencapai efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan desa diperlukan sejumlah asas atau prinsip yang harus dijadikan pedoman. Asas atau prinsip-prinsip dimaksud adalah:

- 1) Asas kesatuan, yaitu asas atau prinsip yang menghendaki agar semua pendapatan dan belanja desa disajikan dalam kesatuan dokumen anggaran desa.
- 2) Asas universalitas, yaitu asas atau prinsip yang mengharuskan agar setiap transaksi keuangan desa ditampilkan secara utuh dalam dokumen anggaran desa.
- 3) Asas tahunan yaitu asas atau prinsip yang membatasi masa berlakunya anggaran untuk suatu tahun anggaran.
- 4) Asas spesialitas, yaitu asas atau prinsip yang mewajibkan agar setiap kredit anggaran yang disediakan terinci secara jelas peruntukannya.

⁵⁰ Sofiyah Yatimah Tahir, Evi Malia, and Imam Agus Faisol, “Pengaruh Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat, Pengetahuan Kepala Desa, Dan Transparansi Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Desa Di Kabupaten Pamekasan,” *Journal of Accounting and Financial Issue (JAFIS)* 1 (2021): 20–29.

- 5) Asas akuntabilitas yaitu asas atau prinsip yang menentukan bahwa setiap kegiatan pengelolaan keuangan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- 6) Asas proporsionalitas yaitu asas atau prinsip yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam pengelolaan keuangan desa.
- 7) Asas profesionalitas yaitu asas atau prinsip yang mengutamakan berdasarkan kode etik dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- 8) Asas keterbukaan yaitu asas atau prinsip yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang pengelolaan keuangan desa dengan tetap memperhatikan perlindungan terhadap hak pribadi dan golongan.
- 9) Asas pemeriksaan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang bebas dan mandiri, yaitu asas atau prinsip yang memberikan kebebasan bagi BPK untuk melakukan pemeriksaan keuangan desa dengan tidak boleh dipengaruhi oleh siapapun.
- 10) Asas *value for money* yaitu asas atau prinsip yang menekankan bahwa dalam pengelolaan keuangan desa harus dilakukan secara ekonomis, efisien, dan efektif.

- 11) Asas kejujuran yaitu asas atau prinsip yang menekankan bahwa dalam pengelolaan dana publik (termasuk APBDes) harus dipercayakan kepada aparat yang memiliki integritas dan kejujuran yang tinggi, sehingga potensi munculnya praktik korupsi, kolusi dan nepotisme dapat diminimalis.
- 12) Asas pengendalian yaitu asas atau prinsip yang menghendaki dilakukannya monitoring terhadap penerimaan maupun pengeluaran anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) sehingga bila terjadi selisih (varians) dapat segera dicari penyebab timbulnya selisih tersebut.
- 13) Asas ketertiban dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yaitu asas atau prinsip yang mengharuskan bahwa dalam pengelolaan keuangan desa wajib berpedoman kepada peraturan perundangundangan yang berlaku.
- 14) Asas bertanggungjawab yaitu asas atau prinsip yang mewajibkan kepada penerima amanah atau penerima mandat untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumberdaya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.
- 15) Asas keadilan yaitu asas atau prinsip yang menekankan perlunya keseimbangan distribusi kewenangan dan pendanaannya dan atau keseimbangan distribusi hak dan kewajiban berdasarkan pertimbangan objektif.

- 16) Asas kepatutan yaitu asas atau prinsip yang menekankan adanya suatu sikap dan tindakan yang wajar dan proporsional.
- 17) Asas manfaat untuk masyarakat yaitu asas atau prinsip yang mengharuskan bahwa keuangan desa wajib digunakan atau diutamakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat desa.⁵¹



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

⁵¹ Riswati, “Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.” *JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik)*, Vol 8, no 1 (2021), 13-31.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif, penelitian dengan pendekatan kuantitatif adalah penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.⁵²

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian asosiatif kausal, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan sebab-akibat antara dua atau lebih variabel. Dalam konteks penelitian ini, peneliti ingin mengetahui apakah terdapat pengaruh signifikan dari variabel akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat (variabel independen) terhadap pengelolaan keuangan desa (variabel dependen) di Kecamatan Glenmore, Kabupaten Banyuwangi.⁵³

B. Populasi Dan Sampel

1. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perangkat desa yang berada di wilayah Kecamatan Glenmore, Kabupaten Banyuwangi. Kecamatan Glenmore terdiri dari 7 desa, dan masing-masing desa memiliki 10 orang perangkat desa, sehingga total populasi dalam penelitian ini

⁵² Sugiyono, *Metode Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013).

⁵³ Karimuddin Abdullah, "Metodologi Penelitian Kuantitatif, (Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2022).

berjumlah 70 orang. Perangkat desa yang dimaksud meliputi kepala desa, sekretaris desa, serta aparat pelaksana teknis lainnya yang terlibat langsung dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pengelolaan keuangan desa. Pemilihan populasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa perangkat desa memiliki peran penting dan pemahaman langsung terhadap penerapan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa.⁵⁴

2. Sampel

Sampel adalah kumpulan dari subjek yang dianggap mewakili populasi, sampel yang diambil harus mempunyai karakteristik yang sama dengan populasinya dan harus mewakili anggota populasi. Metode penyampelan yang dilakukan pada penelitian ini yaitu sampel jenuh. Sampel jenuh adalah teknik penentuan sampel di mana seluruh anggota populasi digunakan sebagai sampel karena jumlah populasi relatif kecil atau masih memungkinkan untuk diteliti secara keseluruhan.⁵⁵ Dengan demikian, penelitian ini akan melibatkan seluruh 70 perangkat desa yang ada di Kecamatan Glenmore, Kabupaten Banyuwangi, sebagai responden penelitian.

Penggunaan sampel jenuh dalam penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data yang lebih akurat dan komprehensif mengenai pengaruh akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan

⁵⁴ Sudaryono, ‘*Metode Kuantitatif, Kualitatif, dan Mix Method,*’ (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017).

⁵⁵ Sugiyono, “*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D,*” (Bandung: Alfabeta, 2019).

keuangan desa. Dengan melibatkan seluruh perangkat desa, hasil penelitian diharapkan dapat mencerminkan kondisi yang sebenarnya di lapangan tanpa adanya bias akibat pemilihan sampel tertentu. Hal ini juga memberikan peluang bagi setiap perangkat desa untuk menyampaikan pandangannya terkait sistem pengelolaan keuangan desa yang diterapkan di Kecamatan Glenmore.

C. Teknik Dan Instrumen Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampel jenuh (atau total sampling) adalah teknik penentuan sampel yang menggunakan seluruh anggota populasi sebagai sampel. Teknik yang digunakan adalah kuesioner dengan cara menyebarluaskan secara langsung dengan beberapa daftar pertanyaan berupa kuesioner kepada responden yang merupakan perangkat desa di Kecamatan Glenmore Kabupaten Banyuwangi.⁵⁶

Pengumpulan data merupakan langkah untuk memperoleh data untuk penelitian. Dilihat dari teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner atau angket maka skala likert digunakan sebagai instrumen penelitian. Skala likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat serta persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Dalam skala likert, maka variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel yang nantinya akan menjadi titik tolak untuk menyusun item-item instrumen yang dapat berupa pernyataan atau pertanyaan.

⁵⁶ Achmad Muri Yusuf, *Metodelogi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif & Penelitian Gabungan* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014).

Data yang digunakan untuk penelitian berasal dari data yang valid serta akurat guna penelitian berhasil. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data sebagai berikut:

1. Pengumpulan data menggunakan kuesioner. Kuesioner merupakan salah satu cara yang digunakan untuk mengumpulkan data yang mana terdiri atas serangkaian pertanyaan untuk mengumpulkan informasi atau data dari responden.
2. Data yang digunakan merupakan data primer yang didapatkan dari kuesioner.
3. Penggunaan skala likert yang dirancang untuk mengukur tingkat persetujuan subjek terhadap suatu pertanyaan

**Tabel 3.1
Tingkat Penilaian Dan Jawaban**

Pernyataan	Skor Pernyataan
Sangat Setuju (SS)	5
Setuju (S)	4
Ragu-Ragu (RR)	3
Tidak Setuju (TS)	2
Sangat Tidak Setuju (STS)	1

Sumber: Penulis 2025

D. Analisis Data

J E M B E R

Teknik analisis data yang digunakan sebagai pengujian data yang diproleh dari hasil jawaban responden yang kemudian dianalisis. Maka dari itu, teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif deskriptif yaitu dengan menganalisis data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku secara umum.

Langkah selanjutnya iakah menyajikan data dari setiap variabel untuk memperoleh peahaman yang lebih mendaam mengenai fenomena yang sedang diteliti. Dalam proses ini, perhitungan yang relevan dilakukan untuk memberikan jawaban yang menyeluruh terhadap pertanyaan penelitian yang diajukan, sehingga memastikan analisis data yang tepat dan informatif.

1. Uji Instrumen Data

Uji instrumen data merupakan langkah dalam penelitian untuk memastikan bahwa alat pengumpulan data memiliki validitas dan reliabilitas yang baik. Uji instrumen data ialah bagian dari tata kelola data untuk memastikan kelengkapan dan keakuratan data. Uji kualitas data ada dua, yaitu uji validitas dan reliabilitas.⁵⁷

a. Uji validitas

Uji validitas Merupakan uji untuk mengukur sah atau tidaknya suatu kuesioner. Pada dasarnya uji validitas mengukur sah atau tidaknya setiap pertanyaan/pernyataan yang digunakan dalam penelitian. Kriteria uji validitas ialah dengan membandingkan Nilai r hitung (*Person Correlation*) dengan nilai r tabel. Dalam menentukan nilai r tabel, dalam kolom df digunakan menggunakan rumus N-2 dengan tingkat signifikansi besarnya 10%. Kriteria pengujian uji validitas sebagai berikut:

1. Jika $r_{\text{hitung}} > r_{\text{tabel}}$, maka instrumen penelitian dikatakan valid

⁵⁷ Elvera and Yesita Astarina, "Metodologi Penelitian "(Yogyakarta: Penerbit ANDI, 2021).

2. Jika $r_{\text{hitung}} < r_{\text{tabel}}$, maka instrumen penelitian dikatakan invalid.⁵⁸

b. Uji reliabilitas

Uji reliabilitas adalah uji untuk mengetahui apakah suatu data memiliki konsistensi atau keteraturan dari hasil pengukuran.⁵⁹

Mengukur variabel yang digunakan melalui pertanyaan/pernyataan yang digunakan. Uji reliabilitas digunakan dengan membandingkan nilai *cronbach's alpha* dengan tingkat/taraf signifikan yang digunakan. Dengan tingkat taraf signifikansi sebesar 0,6. Adapun kriteria pengujian sebagai berikut :

1. Jika nilai *cronbach's alpha* > tingkat signifikan, maka instrumen dikatakan reliabel.
2. Jika nilai *cronbach's alpha* < tingkat signifikan, maka instrumen dikatakan tidak reliabel.

2. Uji asumsi klasik

Uji asumsi klasik ialah persyaratan statistik yang harus dipenuhi pada analisis regresi berganda. Uji asumsi klasik untuk memastikan persamaan regresi yang difungsikan tepat dan valid. Sebelum melakukan analisa regresi berganda dan uji hipotesis, maka harus melakukan beberapa uji asumsi klasik. Tujuan dari pengujian ini ialah memberikan kepastian bahwa persamaan regresi linier yang didapatkan memiliki ketepatan dalam

⁵⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019).

⁵⁹ Aminatus Zahriyah, Suprianik, Agung Parmono, Mustofa, "Ekonometrika: Teknik dan Aplikasi Dengan SPSS" (Jember: Mandala Press, 2021).

estimasi, tidak biasa dan konsisten. Tidak semua uji asumsi klasi harus dilakukan. Pada penelitian ini tidak perlu melakukan uji autokorelasi dikarenakan data dalam penelitian ini ialah data cross section. Uji autokorelasi hanya dilakukan pada data time series.⁶⁰

a. Uji normalitas

Uji normalitas merupakan proses tingkat yang digunakan untuk menentukan apakah sempel data atau distibusi data mengikuti atau mendekati distribusi normal. Tujuan dari adanya uji ini ialah untuk memeriksa apakah data berasal dari populasi yang terdistribusi secara normal atau tidak. Uji normalitas sering kali melibatkan hipotesis nol, bahwa data berasal dari distribusi normal. Hasilnya kemudian digunakan untuk menentukan apakah hipotesis nol dapat diterima atau ditolak. Jika dilihat dari nilai p (p-value) dari uji normalitas lebih besar dari tingkat signifikansinya yang ditentukan 0,05, maka hipotesis nol dapat diterima, yang berarti data dianggap dari distribusi normal, begitu pula sebaliknya. Dalam penelitian ini menggunakan uji normalitas dengan uji Kolmogorov-Smirnov.⁶¹

b. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya korelasi antar variabel-variabel bebas dalam suatu model regresi linier berganda. Jika ada korelasi yang tinggi di antara variabel

⁶⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019).

⁶¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019).

bebas, maka hubungan variabel bebas terhadap variabel terikat menjadi terganggu. Dasar pengambilan keputusan ada 2 cara yaitu apabila nilai *tolerance* > 0,10 maka tidak terjadi multikolinearitas terhadap data yang diuji dan apabila nilai VIF < 10 maka artinya tidak terjadi multikolinearitas terhadap data yang diuji.⁶²

c. Uji heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas adalah untuk melihat apakah terdapat kesamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi yang memenuhi persyaratan adalah di mana terdapat kesamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap atau disebut homoskedastisitas. Dalam penelitian ini, pengujian dilakukan dengan statistik Glejser dan menganalisis grafik scatterplot. Uji statistik Glejser melibatkan transformasi nilai residual menjadi residual absolut dan kemudian meregresinya dengan variabel independen dalam model regresi. Jika nilai signifikansi untuk variabel > dari 0,05, maka dapat disimpulkan tidak ada masalah heteroskedastisitas.

3. Uji Hipotesis

Uji hipotesis merupakan salah satu elemen kunci dalam analisis data kuantitatif yang mana bertujuan untuk membuat inferensi atau kesimpulan tentang populasi berdasarkan sampel data. Dalam konteks penelitian kuantitatif, hipotesis dinyatakan sebagai pernyataan sementara yang

⁶² Sugiyono "Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&D"(Bandung: Alfabeta, 2019).

menggambarkan hubungan dua atau lebih variabel yang diuji secara empiris.⁶³

a. Uji Parsial (Uji T)

Merupakan pengujian kepada koefisien regresi secara parsial, untuk mengetahui signifikansi secara parsial atau masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat. Hipotesis yang digunakan dalam pengujian ini ialah:

- a) Jika nilai $\text{Sig.} < 0,05$, maka variabel independen berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen.
- b) Jika nilai $\text{Sig.} > 0,05$, maka variabel independen tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen.⁶⁴

b. Uji Simultan (Uji F)

Uji ini digunakan untuk mengetahui terdapat pengaruh atau tidaknya dengan cara bersama-sama variabel bebas terhadap variabel terikat.

- a) Jika $F_{\text{hitung}} > F_{\text{tabel}}$, maka H_a diterima dan H_0 ditolak, artinya variabel independen secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen.
- b) Jika $F_{\text{hitung}} < F_{\text{tabel}}$, maka H_a ditolak dan H_0 diterima, artinya variabel independen secara bersama-sama tidak mempengaruhi variabel dependen.

⁶³ Hidayat, Anas, “*Metodologi Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017).

⁶⁴ Sahir, Syarif Hafni, “*Metodologi Penelitian* (Medan: Penerbit KBM Indonesia, 2021).

4. Uji Koefisien Determinasi (R^2)²

Koefisien determinasi ialah melihat besar pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Bila angka koefisien determinasi dalam model regresi terus menjadi kecil atau semakin mendekati nol maka semakin kecil pengaruh semua variabel bebas terhadap variabel terikat begitu pula sebaliknya.

a. Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis Regresi Linier Berganda merupakan suatu model persamaan yang mengambarkan hubungan dua tau lebih variabel bebas dengan satu variabel terikat. Pendekatan regresi linier berganda dimungkinkan karena dalam banyak kasus, penggunaan regresi dengan dua variabel untuk memodelkan hubungan ekonomi disinyalir terlalu sederhana. Adapun rumus model regresi linier berganda.

$$Y = a + B_1X_1 + B_2X_2 + B_3X_3 + e$$

Keterangan :

Y = Pengelolaan Keuangan Desa

a = Konstanta

b_1 = Koefisien Regresi X_1

b_2 = Koefisien Regresi X_2

b_3 = Koefisien Regresi X_3

X_1 = Akuntabilitas

X_2 = Transparansi

X_3 = Partisipasi Masyarakat

e = Residual / Error⁶⁵

⁶⁵ Rifkhan, "Metodologi Penelitian" (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2019).

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kecamatan Glenmore merupakan salah satu dari 25 kecamatan yang berada di wilayah administratif Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur. Secara geografis, Kecamatan Glenmore terletak di bagian barat daya Kabupaten Banyuwangi, berbatasan langsung dengan Kecamatan Kalibaru di sebelah barat, Kecamatan Genteng di sebelah timur, serta wilayah pegunungan yang menghubungkan ke arah selatan. Posisi strategis Glenmore menjadikannya sebagai penghubung antara kawasan dataran tinggi perkebunan dengan kawasan padat penduduk di wilayah tengah Kabupaten Banyuwangi.



Sumber: Google Satelite (2025)

Gambar 1.
Peta Kecamatan Glenmore Banyuwangi

Kecamatan ini berada di dataran tinggi dengan ketinggian sekitar 200–400 meter di atas permukaan laut, membuat iklimnya cenderung lebih sejuk dibandingkan dengan wilayah pantai utara Banyuwangi. Suhu rata-rata berkisar antara 22 hingga 29 derajat Celsius, dengan curah hujan yang cukup tinggi, khususnya pada bulan November hingga Maret. Hal ini menjadikan Glenmore sebagai daerah yang subur, cocok untuk sektor pertanian dan perkebunan yang menjadi tulang punggung perekonomian masyarakat setempat.

Luas wilayah Kecamatan Glenmore mencapai lebih dari 100 km² dan terbagi dalam beberapa desa administratif. Berdasarkan data dari Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2024, terdapat **7 desa di Kecamatan Glenmore** yang menjadi lokasi penelitian, yaitu: Karangharjo, Tegalharjo, Bumiharjo, Sumbergondo, Margomulyo, Sepanjang, dan Tulungrejo. Setiap desa memiliki karakteristik yang unik, baik dari segi sosial, budaya, maupun tingkat pengelolaan pemerintahannya. Pemerintahan di tingkat kecamatan dijalankan oleh seorang camat yang membawahi kepala desa di tiap-tiap wilayah desa. Di tingkat desa, pemerintahan dijalankan oleh Kepala Desa bersama dengan perangkat desa yang terdiri dari sekretaris desa, kepala urusan, kepala seksi, dan unsur pelaksana lainnya. Struktur ini secara fungsional bertanggung jawab dalam menjalankan roda pemerintahan desa termasuk dalam hal pengelolaan keuangan desa, mulai dari perencanaan hingga pelaporan pertanggungjawaban.

Secara sosial masyarakat Kecamatan Glenmore terdiri atas penduduk asli dan pendatang, termasuk komunitas transmigrasi dari Jawa Tengah dan Jawa Barat yang menetap sejak era kolonial perkebunan. Adanya keragaman ini membentuk dinamika sosial yang cukup kompleks. Walau demikian, secara umum masyarakat Glenmore hidup dalam harmoni dan memiliki nilai-nilai gotong royong serta musyawarah mufakat yang masih kental diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

Jumlah penduduk Kecamatan Glenmore pada tahun 2024 diperkirakan mencapai lebih dari 40.000 jiwa, dengan tingkat kepadatan yang bervariasi antar desa. Desa dengan kepadatan penduduk tertinggi adalah Desa Karangharjo dan Bumiharjo, sementara desa yang relatif lebih kecil jumlah penduduknya adalah Sumbergondo dan Sepanjang. Sebagian besar masyarakat menggantungkan hidup dari sektor pertanian, perkebunan (kopi dan cengkeh), serta pekerjaan informal lainnya. Aktivitas keagamaan juga menjadi bagian integral dari kehidupan sosial, dengan keberadaan masjid, mushola, dan kegiatan pengajian rutin yang memperkuat ikatan komunitas.

Kondisi ekonomi masyarakat di Kecamatan Glenmore secara umum masih tergolong dalam kategori menengah ke bawah. Sumber utama penghasilan berasal dari sektor pertanian dan perkebunan, di mana masyarakat menanam komoditas seperti padi, jagung, ketela, kopi, dan cengkeh. Sebagian warga bekerja sebagai buruh tani, petani penggarap, maupun pekerja di pabrik-pabrik kecil yang tersebar di beberapa titik wilayah desa. Dalam beberapa tahun terakhir, sektor UMKM mulai tumbuh, terutama

di bidang olahan pangan dan kerajinan berbasis hasil pertanian. Namun, salah satu tantangan utama yang dihadapi masyarakat Glenmore adalah masih rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan teknis pengelolaan usaha, yang berimplikasi pada rendahnya tingkat pendapatan. Selain itu, sebagian besar penduduk belum memiliki literasi keuangan yang memadai, termasuk dalam aspek pengawasan dan partisipasi terhadap pengelolaan keuangan desa.

Dari segi infrastruktur, hampir seluruh desa di Kecamatan Glenmore telah terhubung dengan akses jalan utama yang layak meski sebagian masih berupa jalan berbatu. Tersedia akses transportasi umum berupa angkutan pedesaan dan ojek yang mempermudah mobilitas masyarakat. Fasilitas dasar seperti air bersih, listrik, dan telekomunikasi telah menjangkau sebagian besar wilayah, meskipun kualitas dan jangkauan layanan masih perlu ditingkatkan, terutama di desa-desa yang berada di wilayah perbukitan seperti Sepanjang dan Sumbergondo. Terdapat pula balai desa di masing-masing desa yang menjadi pusat administrasi, pelayanan masyarakat, dan kegiatan sosial. Balai desa ini menjadi tempat penting dalam penyusunan APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa), musyawarah desa (musdes), serta pusat diseminasi informasi keuangan kepada masyarakat. Namun dalam praktiknya, tidak semua balai desa memaksimalkan fungsi ini secara optimal.

Sejak digulirkannya program Dana Desa oleh pemerintah pusat pada tahun 2015, desa-desa di Kecamatan Glenmore menerima dana yang cukup signifikan setiap tahunnya. Berdasarkan data alokasi tahun anggaran 2024, dana desa di wilayah ini berkisar antara Rp1,1 miliar hingga Rp1,6 miliar per

desa. Misalnya, Desa Karangharjo mendapatkan alokasi sebesar Rp1.287.061.000, sedangkan Desa Bumiharjo memperoleh Rp1.686.474.000.

Pengelolaan dana desa tersebut harus mengacu pada prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, serta berorientasi pada kebutuhan lokal yang berbasis pada hasil musyawarah desa. Pemerintah desa memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan setiap rupiah dana yang dikelola memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, baik melalui pembangunan infrastruktur, program pemberdayaan ekonomi, maupun pelayanan sosial. Namun dalam implementasinya, masih terdapat berbagai tantangan. Berdasarkan observasi dan informasi dari masyarakat serta perangkat desa, sejumlah masalah seperti minimnya pelibatan masyarakat dalam musyawarah anggaran, kurangnya publikasi laporan keuangan, hingga keterlambatan pelaporan pertanggungjawaban masih sering terjadi. Tidak adanya situs web desa sebagai pusat informasi publik di sebagian besar desa menambah rendahnya akses masyarakat terhadap informasi pengelolaan keuangan desa.

Permasalahan lainnya adalah ketergantungan desa terhadap pihak ketiga dalam penyusunan laporan keuangan desa yang mengindikasikan masih rendahnya kompetensi teknis sebagian perangkat desa. Padahal, UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Permendagri No. 20 Tahun 2018 telah menetapkan standar yang cukup ketat terkait tata kelola keuangan desa. Beberapa desa seperti Tulungrejo dan Margomulyo diketahui sudah mulai menerapkan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) untuk pencatatan dan pelaporan keuangan, meski penerapannya belum maksimal. Masih

dibutuhkan pelatihan lanjutan dan supervisi dari pihak kecamatan maupun kabupaten untuk meningkatkan kemampuan teknis aparatur desa.

Salah satu faktor penting dalam mendukung efektivitas pengelolaan keuangan desa adalah tingkat partisipasi masyarakat dalam siklus perencanaan dan evaluasi program pembangunan desa. Di Kecamatan Glenmore, partisipasi masyarakat masih cukup variatif antar desa. Beberapa desa seperti Tegalharjo dan Bumiharjo menunjukkan partisipasi aktif melalui kegiatan musyawarah desa dan forum diskusi warga, sementara di desa lain masih bersifat simbolik, terutama karena minimnya literasi masyarakat tentang keuangan publik dan hak mereka untuk mengakses informasi tersebut. Kultur kelembagaan di tingkat desa juga sangat berpengaruh terhadap penerapan prinsip good governance. Di desa-desa yang memiliki kepemimpinan kepala desa yang inklusif dan terbuka, partisipasi warga cenderung meningkat dan pelaksanaan program desa berjalan lebih efektif. Sebaliknya, di desa dengan struktur hierarkis yang kuat dan minim komunikasi dua arah, pengelolaan keuangan desa rentan terhadap praktik tertutup dan berisiko menimbulkan ketidakpuasan masyarakat.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) seharusnya memainkan peran sentral sebagai lembaga pengawas dan penyeimbang dalam tata kelola desa. Namun, peran BPD di Glenmore belum optimal karena keterbatasan kapasitas dan kurangnya pelatihan terkait pengawasan anggaran. Selain itu, relasi yang terlalu dekat antara BPD dan pemerintah desa dalam beberapa kasus menjadikan fungsi kontrol tidak berjalan secara independen.

Kecamatan Glenmore memiliki potensi yang sangat besar dalam mewujudkan tata kelola keuangan desa yang lebih baik. Dengan dukungan dari Pemerintah Kabupaten Banyuwangi yang tengah menggalakkan digitalisasi desa dan penguatan kapasitas perangkat desa, diharapkan pengelolaan keuangan desa di Glenmore dapat berjalan lebih akuntabel, transparan, dan partisipatif. Penelitian ini menjadi penting sebagai bagian dari upaya identifikasi faktor-faktor penguat maupun penghambat dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa di tingkat lokal. Temuan-temuan dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai dasar evaluasi oleh pemerintah desa dan stakeholder terkait untuk meningkatkan kualitas tata kelola keuangan, memperbaiki sistem informasi publik desa, dan membangun budaya partisipatif yang kuat di masyarakat.

Studi ini dapat mendorong pelaksanaan sistem penganggaran yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat serta memperkuat kapasitas kelembagaan desa untuk melaksanakan prinsip-prinsip good governance secara nyata. Dengan latar belakang geografis, sosial, ekonomi, dan kelembagaan seperti yang digambarkan, Kecamatan Glenmore merupakan wilayah yang sangat representatif untuk melihat sejauh mana variabel akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat mampu membentuk pengelolaan keuangan desa yang efektif dan berintegritas.

B. Penyajian Data

Dalam penelitian ini analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah instrumen dalam bentuk kuesioner (angket) berupa pernyataan. Dalam penelitian ini kuesioner yang digunakan berjumlah 18 pernyataan diantaranya 5 pernyataan dari variabel X1, 5 pernyataan dari variabel X2, 3 pernyataan dari variabel X3, dan 5 pernyataan dari variabel Y. Kuesiner yang dibagikan kepada responden (Perangkat desa di kecamatan glenmore kabupaten banyuwangi) berisikan pernyataan mengenai pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi Masyarakat terhadap pengelolaan keuangan desa di kecamatan glenmore, kabupaten banyuwangi.

1. Responden berdasarkan usia

Karakteristik responden dalam penelitian ini merupakan komponen penting untuk memberikan gambaran umum mengenai latar belakang perangkat desa yang menjadi partisipan dalam studi. Pemahaman terhadap karakteristik ini dapat membantu menjelaskan kecenderungan persepsi, pemahaman, serta tingkat partisipasi mereka dalam proses pengelolaan keuangan desa. Adapun aspek yang dianalisis mencakup usia, pendidikan terakhir, dan lama menjabat sebagai perangkat desa. Informasi ini menjadi dasar untuk menilai sejauh mana kompetensi, pengalaman, serta pemahaman para responden terhadap prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat dalam konteks tata kelola keuangan desa di Kecamatan Glenmore.

Tabel 4.1
Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

Karakteristik Usia	Kategori	Frekuensi (n = 70)	Persentase (%)
	< 30 tahun	8	11.4
	30–39 tahun	21	30.0
	40–49 tahun	24	34.3
	≥ 50 tahun	17	24.3

Sumber : Data Olahan (2025)

Berdasarkan tabel di atas mayoritas responden berada pada rentang usia produktif, khususnya kelompok usia 40–49 tahun yang mencakup 34,3% dari total responden, disusul oleh kelompok usia 30–39 tahun sebesar 30,0%. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar perangkat desa di Kecamatan Glenmore berada dalam fase usia yang relatif matang dan memiliki kapasitas kognitif yang optimal dalam memahami tugas serta tanggung jawab pemerintahan desa, termasuk pengelolaan keuangan. Sementara itu, perangkat desa yang berusia di bawah 30 tahun hanya sebesar 11,4%, yang mengindikasikan bahwa keterlibatan generasi muda dalam pemerintahan desa masih tergolong rendah. Usia yang lebih tua, khususnya kelompok ≥ 50 tahun sebesar 24,3%, tetap memainkan peran penting, kemungkinan karena faktor pengalaman dan kepercayaan dari masyarakat dalam mengelola urusan administrasi desa.

2. Responden berdasarkan pendidikan

Responden yang diambil dalam penelitian ini sebanyak 70 responden. Uraian dari karakteristik responden berdasarkan pendidikan terakhir dapat dilihat pada tabel :

Tabel 4.2
Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Karakteristik Pendidikan Terakhir	Kategori	Frekuensi (n = 70)	Persentase (%)
SMP/Sederajat	6	8.6	
SMA/Sederajat	28	40.0	
Diploma	15	21.4	
Sarjana	18	25.7	
Pascasarjana	3	4.3	

Sumber : Data diolah peneliti, 2025

Dari sisi pendidikan terakhir sebagian besar responden berpendidikan menengah, dengan lulusan SMA/sederajat mendominasi sebanyak 40%. Hal ini mencerminkan bahwa sebagian besar perangkat desa memiliki kemampuan dasar yang cukup untuk memahami regulasi dan prosedur administrasi keuangan desa. Namun, proporsi lulusan diploma (21,4%) dan sarjana (25,7%) juga menunjukkan bahwa terdapat peningkatan kualitas SDM di lingkungan pemerintahan desa yang berpotensi memperkuat penerapan prinsip good governance, khususnya dalam aspek transparansi dan akuntabilitas. Keberadaan responden dengan pendidikan pascasarjana (4,3%) meskipun kecil, menjadi indikator positif atas peningkatan kapasitas aparatur desa yang lebih profesional dalam menjalankan tugas pengelolaan dana desa. Di sisi lain, perangkat dengan latar belakang pendidikan SMP masih ditemukan, meski jumlahnya hanya 8,6%, yang menjadi catatan penting dalam hal kebutuhan pelatihan dan peningkatan kapasitas.

3. Responden berdasarkan lama menjabat

Responden yang diambil dalam penelitian ini sebanyak 70 responden. Uraian dari karakteristik responden berdasarkan lama menjabat dapat dilihat pada tabel :

Tabel 4.3
Karakteristik Responden Berdasarkan Lama Menjabat

Karakteristik Lama Menjabat	Kategori	Frekuensi (n = 70)	Persentase (%)
	< 1 tahun	7	10.0
	1–3 tahun	19	27.1
	4–6 tahun	25	35.7
	> 6 tahun	19	27.1

Sumber : Data diolah peneliti, 2025

Karakteristik berdasarkan lama menjabat menunjukkan bahwa sebagian besar responden telah memiliki pengalaman kerja yang cukup lama di lingkungan pemerintahan desa. Responden dengan masa kerja 4–6 tahun menempati porsi terbanyak yakni 35,7%, diikuti oleh yang telah menjabat lebih dari 6 tahun sebesar 27,1%. Hal ini mencerminkan bahwa sebagian besar perangkat desa telah melewati berbagai siklus perencanaan dan pelaporan anggaran, sehingga diharapkan memiliki pemahaman yang baik tentang mekanisme pengelolaan keuangan desa. Namun, masih terdapat 10% responden yang baru menjabat kurang dari satu tahun, yang menunjukkan adanya regenerasi perangkat desa serta kebutuhan akan pendampingan teknis dalam menjalankan tugas administratif dan pengelolaan anggaran. Kombinasi antara pengalaman lama dan kaderisasi baru ini dapat memberikan dinamika positif sekaligus menjadi tantangan dalam

menjaga konsistensi pengelolaan dana desa yang efektif, transparan, dan partisipatif.

4. Karakteristik Jawaban Responden

Tabel 4.4
Karakteristik Jawaban Responden

Variabel	Pernyataan	STS (1)	TS (2)	N (3)	S (4)	SS (5)
Akuntabilitas	X1.1	16.4%	21.9%	16.4%	13.7%	31.5%
	X1.2	17.8%	20.5%	15.1%	15.1%	31.5%
	X1.3	15.1%	24.7%	12.3%	37.0%	11.0%
	X1.4	11.0%	19.2%	9.6%	39.7%	20.5%
	X1.5	12.3%	11.0%	13.7%	19.2%	43.8%
Transparansi	X2.1	9.6%	13.7%	12.3%	27.4%	37.0%
	X2.2	8.2%	16.4%	16.4%	28.8%	30.1%
	X2.3	9.6%	13.7%	12.3%	27.4%	37.0%
	X2.4	9.6%	16.4%	13.7%	27.4%	32.9%
	X2.5	9.6%	16.4%	13.7%	27.4%	32.9%
Partisipasi Masyarakat	X3.1	0.0%	1.4%	6.8%	35.6%	56.2%
	X3.2	1.4%	4.1%	12.3%	27.4%	54.8%
	X3.3	0.0%	2.7%	11.0%	32.9%	53.4%
Pengelolaan Keuangan Desa	Y1.1	0.0%	1.4%	9.6%	37.0%	52.1%
	Y1.2	2.7%	4.1%	11.0%	32.9%	49.3%
	Y1.3	1.4%	2.7%	12.3%	30.1%	53.4%
	Y1.4	1.4%	2.7%	11.0%	31.5%	53.4%
	Y1.5	2.7%	4.1%	13.7%	27.4%	52.1%

Sumber : Data diolah peneliti, 2025

Berdasarkan Tabel 4.4 mengenai karakteristik jawaban responden, terlihat bahwa sebagian besar responden cenderung memberikan penilaian positif pada setiap variabel penelitian, baik akuntabilitas, transparansi, partisipasi masyarakat, maupun pengelolaan keuangan desa. Pada variabel akuntabilitas, meskipun masih terdapat persentase jawaban yang cukup besar pada kategori

sangat tidak setuju (16,4%–17,8%) dan *tidak setuju* (11,0%–24,7%), kecenderungan responden dominan mengarah pada kategori *setuju* dan *sangat setuju*, terutama pada indikator X1.5 yang mencapai 43,8% responden memilih *sangat setuju*. Sementara itu, pada variabel transparansi, persepsi responden juga relatif positif dengan dominasi jawaban *setuju* dan *sangat setuju* (27,4%–37,0%), yang menegaskan pentingnya keterbukaan informasi dalam tata kelola keuangan desa. Variabel partisipasi masyarakat menunjukkan kecenderungan sangat kuat ke arah positif, dengan dominasi pada kategori *sangat setuju* lebih dari 50% (53,4%–56,2%), yang berarti masyarakat menilai partisipasi publik memiliki peranan krusial dalam perencanaan dan pengawasan anggaran desa. Selanjutnya, pada variabel pengelolaan keuangan desa, responden juga mayoritas memilih *setuju* dan *sangat setuju* dengan proporsi lebih dari 49%, terutama pada indikator Y1.3 dan Y1.4 yang masing-masing mencatat 53,4% responden memilih *sangat setuju*. Secara keseluruhan, temuan ini mengindikasikan bahwa responden menaruh perhatian besar pada aspek transparansi dan partisipasi masyarakat sebagai faktor utama dalam mendorong peningkatan kualitas pengelolaan keuangan desa, sekaligus menunjukkan bahwa instrumen penelitian berhasil menangkap persepsi yang konsisten dan representatif.

C. Analisis dan Pengujian Hipotesis

1. Uji Instrumen Penelitian

a. Uji Validitas

Uji validitas adalah uji yang digunakan untuk menilai valid atau tidaknya suatu kuesioner dengan menghubungkan jumlah atau total dari masing masing pertanyaan dengan jumlah atau total dari respon yang diberikan responden yang berupa pertanyaan yang digunakan untuk setiap variabel. Untuk menentukan validitas sebuah instrumen, perbandingan r_{hitung} dan r_{tabel} dengan pengambilan keputusan berdasar pada taraf signifikan menggunakan *degree of freedom* (df). Dengan tingkat signifikan 5%, rumusnya adalah $df = n-2$. Instrumen dinyatakan valid jika $r_{hitung} > r_{tabel}$. Pada penelitian ini nilai n adalah jumlah sampel yakni 70 sehingga didapatkan $df = 68$ dengan signifikan sebesar 5%, sehingga diketahui r_{tabel} sebesar 0,235 sehingga ketika r_{hitung} nilainya lebih besar dari 0,235 dapat dikatakan valid.

Berikut ini adalah hasil pengujian validitas yang sudah peneliti lakukan;

**Tabel 4.5
Hasil Uji Validitas Variabel Akuntabilitas (X1)**

Correlations								
		X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	Total	
X1.1		Pearson Correlation	1	.823 **	.687 **	.545 **	.534 **	.872 **
		Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000	.000
		N	70	70	70	70	70	70
X1.2		Pearson Correlation	.823 **	1	.820 **	.658 **	.508 **	.922 **
		Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.000	.000
		N	70	70	70	70	70	70

X1.3	Pearson Correlation	.687 **	.820 **	1	.530 **	.423 **	.831 **
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000	.000
	N	70	70	70	70	70	70
X1.4	Pearson Correlation	.545 **	.658 **	.530 **	1	.524 **	.782 **
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.000	.000
	N	70	70	70	70	70	70
X1.5	Pearson Correlation	.534 **	.508 **	.423 **	.524 **	1	.728 **
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000		.000
	N	70	70	70	70	70	70
Total	Pearson Correlation	.872 **	.922 **	.831 **	.782 **	.728 **	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	70	70	70	70	70	70

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Sumber : Hasil pengolahan data dari SPSS 27.

Berdasarkan output yang telah dihasilkan diketahui bahwa pernyataan pertama didapatkan nilai sebesar $0,872 > 0,235$ yang menunjukkan bahwa pernyataan pertama dikatakan valid karena $r_{hitung} > r_{tabel}$. Pernyataan kedua didapatkan $0,922 > 0,235$ dinyatakan valid.

Pada pernyataan ketiga didapatkan $0,831 > 0,235$ dinyatakan valid.

Pernyataan keempat didapatkan $0,782 > 0,235$ dinyatakan valid.

Pernyataan kelima didapatkan $0,728 > 0,235$ dinyatakan valid. Bahwa

semua pernyataan variabel X1 yakni akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan desa dinyatakan valid.

Tabel 4.6
Hasil Uji Validitas Variabel Transparansi (X2)

Correlations							
		X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	Total
X2.1	Pearson Correlation	1	.823 **	.687 **	.545 **	.534 **	.872 **
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000	.000
	N	70	70	70	70	70	70
X2.2	Pearson Correlation	.823 **	1	.820 **	.658 **	.508 **	.922 **
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.000	.000
	N	70	70	70	70	70	70
X2.3	Pearson Correlation	.687 **	.820 **	1	.530 **	.423 **	.831 **
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000	.000
	N	70	70	70	70	70	70
X2.4	Pearson Correlation	.545 **	.658 **	.530 **	1	.524 **	.782 **
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.000	.000
	N	70	70	70	70	70	70
X2.5	Pearson Correlation	.534 **	.508 **	.423 **	.524 **	1	.728 **
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000		.000
	N	70	70	70	70	70	70
Total	Pearson Correlation	.872 **	.922 **	.831 **	.782 **	.728 **	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	70	70	70	70	70	70

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Sumber : Hasil pengolahan data dari SPSS 27.

Berdasarkan output yang telah dihasilkan diketahui bahwa pernyataan pertama didapatkan nilai sebesar $0,872 > 0,235$ yang menunjukkan bahwa pernyataan pertama dikatakan valid karena $r_{hitung} > r_{tabel}$. Pernyataan kedua didapatkan $0,922 > 0,235$ dinyatakan valid.

Pada pernyataan ketiga didapatkan $0,831 > 0,235$ dinyatakan valid.

Pada pernyataan keempat didapatkan $0,782 > 0,235$ dinyatakan valid.

Pada pernyataan kelima didapatkan $0,728 > 0,235$ dinyatakan valid.

Dapat ditarik kesimpulan bahwa semua pernyataan pada variabel X2

yakni transparansi terhadap pengelolaan keuangan desa dinyatakan valid.

Tabel 4.7
Hasil Uji Validitas Variabel Partisipasi Masyarakat (X3)

		Correlations			
		X3.1	X3.2	X3.3	Total
X3.1	Pearson Correlation	1	.587**	.670**	.870**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000
	N	70	70	70	70
X3.2	Pearson Correlation	.587**	1	.588**	.841**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000
	N	70	70	70	70
X3.3	Pearson Correlation	.670**	.588**	1	.876**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000
	N	70	70	70	70
Total	Pearson Correlation	.870**	.841**	.876**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	
	N	70	70	70	70

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Sumber : Hasil pengolahan data dari SPSS 27.

Berdasarkan output yang telah dihasilkan diketahui bahwa pernyataan pertama didapatkan sebesar $0,870 > 0,235$ yang menunjukkan bahwa pernyataan pertama dikatakan valid karena $r_{hitung} > r_{tabel}$. pernyataan kedua didapatkan $0,841 > 0,235$ dinyatakan valid. Pernyataan ketiga didapatkan $0,876 > 0,235$ dinyatakan valid. Dapat ditarik kesimpulan bahwa semua pernyataan yang ada pada variabel X3 yakni partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan keuangan desa dinyatakan valid.

Tabel 4.8
Hasil Uji Validitas Variabel Perangkat Keuangan Desa (Y)

Correlations							
		Y1	Y2	Y3	Y4	Y5	Total
Y1	Pearson Correlation	1	.203	.739**	.257*	.203	.608**
	Sig. (2-tailed)		.092	.000	.032	.092	.000
	N	70	70	70	70	70	70
Y2	Pearson Correlation	.203	1	.245*	.728**	1.000**	.839**
	Sig. (2-tailed)	.092		.041	.000	.000	.000
	N	70	70	70	70	70	70
Y3	Pearson Correlation	.739**	.245*	1	.404**	.245*	.683**
	Sig. (2-tailed)	.000	.041		.001	.041	.000
	N	70	70	70	70	70	70
Y4	Pearson Correlation	.257*	.728**	.404**	1	.728**	.836**
	Sig. (2-tailed)	.032	.000	.001		.000	.000
	N	70	70	70	70	70	70
Y5	Pearson Correlation	.203	1.000**	.245*	.728**	1	.839**
	Sig. (2-tailed)	.092	.000	.041	.000		.000
	N	70	70	70	70	70	70
Total	Pearson Correlation	.608**	.839**	.683**	.836**	.839**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	70	70	70	70	70	70

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Sumber : Hasil pengolahan data dari SPSS 27.

Berdasarkan output yang telah dihasilkan diketahui bahwa

pernyataan pertama didapatkan nilai sebesar $0,608 > 0,235$ yang menunjukkan bahwa pernyataan pertama dikatakan valid karena r_{hitung}

$> r_{tabel}$. Pernyataan kedua didapatkan $0,839 > 0,235$ dinyatakan valid.

Pernyataan ketiga didapatkan $0,683 > 0,235$ dinyatakan valid.

Pernyataan keempat didapatkan $0,836 > 0,235$ dinyatakan valid.

Pernyataan kelima didapatkan $0,839 > 0,235$ dinyatakan valid. Dapat

ditarik kesimpulan bahwa semua pernyataan yang ada pada variabel Y yakni pengelolaan keuangan desa dalam penelitian pengaruh akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan keuangan desa di kecamatan glenmore kabupaten banyuwangi dinyatakan valid.

b. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas adalah uji yang digunakan untuk mengevaluasi akurasi, ketepatan, serta konsistensi kuesioner dalam mengukur variabel. Dikatakan reliabel atau handal apabila suatu kuesioner jika jawaban respondennya konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Hanya indikator yang telah lulus pengujian validitas dan dinyatakan valid untuk diuji reliabilitas. Suatu variabel dianggap reliabel jika memiliki nilai *Cronbach Alpha* lebih dari 0,70, meskipun nilai antara 0,60 – 0,70 masih dapat diterima.

Dalam penelitian ini, tingkat signifikan atau taraf diukur dengan nilai 0,60. Nilai Alpha lebih dari 0,6 dianggap reliabel, dan nilai Alpha kurang dari 0,6 dianggap tidak reliabel atau tidak memenuhi syarat *Cronbach Alpha*. Hasil uji reliabilitas yang diperoleh peneliti dilampirkan disini:

Tabel 4.9
Uji Reliabilitas Variabel Akuntabilitas (X1)

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.884	5

Sumber : Hasil pengolahan data dari SPSS 27.

Dari output yang dihasilkan dapat diketahui nilai dari *cronbach alpha* adalah 0,884. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel Akuntabilitas X1 dalam penelitian pengaruh akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan keuangan desa di kecamatan glenmore kabupaten banyuwangi dinyatakan reliabel karena nilai *crobach alpha* > 0,60 yaitu 0,884.

Tabel 4.10
Uji Reliabilitas Variabel Transparansi (X2)

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.946	5

Sumber : Hasil pengolahan data dari SPSS 27.

Dari output yang dihasilkan dapat diketahui nilai dari *Cronbach Alpha* adalah 0,946. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel Transparansi X2 dalam penelitian pengaruh akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan keuangan desa di kecamatan glenmore kabupaten banyuwangi dinyatakan reliabel karena nilai *Cronbach Alpha* > 0,60 yaitu 0,946.

Tabel 4.11
Uji Reliabilitas Variabel Partisipasi Masyarakat (X3)

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.827	3

Sumber : Hasil pengolahan data dari SPSS 27.

Dari output yang dihasilkan dapat diketahui nilai dari *Cronbach Alpha* adalah 0,827. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel Partisipasi Masyarakat (X3) dalam penelitian pengaruh akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan keuangan desa di kecamatan glenmore kabupaten banyuwangi dinyatakan reliabel karena *Cronbach Alpha* > 0,60 yaitu 0,827.

**Tabel 4.12
Uji Reliabilitas Variabel Pengelolaan Keuangan Desa (Y)**

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.821	5

Sumber : Hasil pengolahan data dari SPSS 27.

Dari output yang dihasilkan dapat diketahui nilai dari *Cronbach Alpha* adalah 0,821. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel Pengelolaan Keuangan Desa (Y) dalam penelitian pengaruh akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan keuangan desa di kecamatan glenmore kabupaten banyuwangi dinyatakan reliabel karena *Cronbach Alpha* > 0,60 yaitu 0,821.

2. Uji Asumsi Klasik J E M B E R

Pengujian asumsi regresi liniar dilakukan untuk mencegah analisis data menjadi bias dan untuk mencegah kesalahan yang dibuat oleh model regresi linear yang digunakan. Uji normalitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas adalah beberapa contoh uji terhadap asumsi-asumsi regresi linear, yang juga dikenal sebagai uji asumsi klasik.

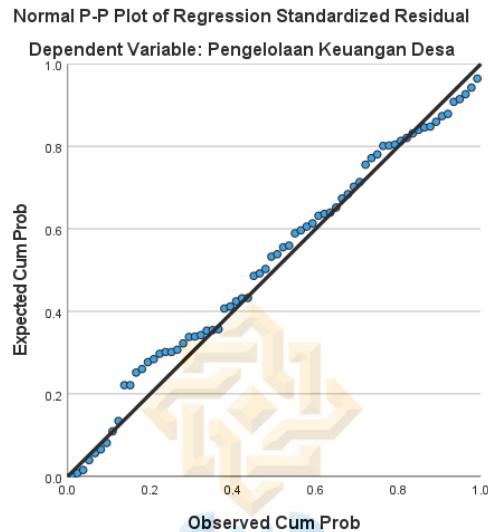
a. Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah residual data dari model regresi linear memiliki distribusi normal. Sebuah model regresi yang baik memiliki residual data dengan distribusi normal. Jika tidak, kesimpulan statistik akan menjadi tidak valid atau bias.

Dua metode digunakan untuk menguji normalitas penelitian ini dinyatakan plot probabilitas normal grafik dan uji statistik *One Sample Kolmogorov Smirnov*. Jika nilai signifikan $> 0,05$ diperoleh, yang dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian ini terdistribusi normal secara multivariate. Sedangkan untuk hasil uji normal probability plot menunjukkan bahwa titik-titik menyebar berhimpit pada sekitar garis diagonal dan searah mengikuti garis diagonal maka dapat disimpulkan bahwa residual data berdistribusi secara normal. Hasil uji normalitas peneliti dilampirkan disini

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Gambar 4.2
Uji grafik normal probability Plot



Sumber : Hasil pengolahan data dari SPSS 27.

Gambar 4.1 Uji Normalitas P-Plot

Hasil uji grafik normalitas P-Plot diatas menunjukkan bahwa data dalam penelitian ini terdistribusi secara normal karena titik-titik tersebar pada sekitar garis diagonal dan tidak jauh melebar dari garis diagonal.

Dapat disimpulkan berdasarkan hasil uji statistik Sample Kolmogorov Smirnov dan diuji grafik normalitas P-Plot bahwa pada uji normalitas mengenai pengaruh akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan keuangan desa di kecamatan glenmore kabupaten banyuwangi terdistribusi normal dan dapat melanjutkan tahapan uji selanjutnya.

Tabel 4.13
Uji Normalitas Kolmogrov-Smirnov
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

			Unstandardized Residual
N			70
Normal Parameters^{a,b}		Mean	.0000000
		Std. Deviation	1.15012825
Most Extreme Differences	Absolute		.090
	Positive		.045
	Negative		-.090
Test Statistic			.090
Asymp. Sig. (2-tailed)^c			.200 ^d
Monte Carlo Sig. (2-tailed)^e	Sig.		.169
	99% Confidence Interval	Lower Bound	.160
		Upper Bound	.179

a. Test distribution is Normal.
 b. Calculated from data.
 c. Lilliefors Significance Correction.
 d. This is a lower bound of the true significance.
 e. Lilliefors' method based on 10000 Monte Carlo samples with starting seed 2000000.

Sumber : Hasil pengolahan data dari SPSS 27.

Berdasarkan uji statistik One Sample Kolmogorov Smirnov yang sudah dilakukan diatas yang dilihat dari nilai Asymp. Sig. (2-tailed) dengan nilai sig 0,200. Hasil yang telah didapatkan menunjukkan bahwa nilai sig $0,200 > 0,05$.

b. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinearitas hanya dapat dilakukan dalam kasus dimana model regresi terdiri dari lebih dari satu variabel independen. Tujuan uji ini adalah untuk mengetahui apakah ada atau tidaknya korelasi antar variabel independen pada model regresi. Nilai *Tolerance* dan Variance Inflation Factor (VIF) dapat dilihat untuk mengetahui

apakah ada masalah multikolinearitas pada model regresi. Nilai Tolerance harus lebih dari ($>$) 0,10 dan nilai VIF tidak lebih dari ($>$) 10. Hasil uji multikolinearitas yang diperoleh peneliti dilampirkan di sini:

**Tabel 4.14
Uji Multikolinieritas**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error				Tolerance	VIF
1	(Constant)	-2.441	.761		-3.209	.002		
	Akuntabilitas X1	.039	.040	.046	.976	.332	.371	2.696
	Transparansi X2	.627	.036	.805	17.294	.000	.376	2.661
	Partisipasi Masyarakat X3	.736	.055	.385	13.262	.000	.969	1.032

a. Dependent Variable: Pengelolaan Keuangan Desa

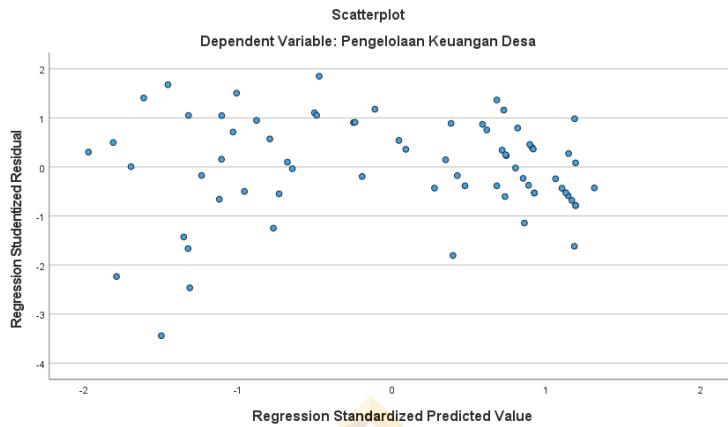
Sumber : Hasil pengolahan data dari SPSS 27.

Berdasarkan hasil output yang telah dilakukan diatas, bisa diketahui nilai *Tolerance* dan *VIF* variabel Akuntabilitas (X1) memiliki nilai *Tolerance* sebesar 0,371 dan nilai *VIF* sebesar 2,696. Pada variabel Transparansi (X2) diperoleh nilai *Tolerance* sebesar 0,376 dan nilai *VIF* sebesar 2,661. Pada variabel Partisipasi Masyarakat (X3) diperoleh nilai *Tolerance* sebesar 0,969 dan nilai *VIF* sebesar 1,032. Dapat disimpulkan nilai *Tolerance* dan *VIF* yang telah didapatkan dari setiap variabel independen Akuntabilitas, Transparansi da Partisipasi Masyarakat pada penelitian pengaruh akuntabilitas, transparansi dan

partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan keuangan desa di kecamatan glenmore kabupaten banyuwangi menunjukkan tidak terdapat masalah multikolinearitas karena nilai *Tolerance* dari setiap variabel independen $> 0,10$ dan VIF sebesar $< 0,10$ dengan hasil yang telah didapatkan, dapat dilanjutkan dengan uji berikutnya.

c. Uji Heterokedastisitas

Pengujian uji heteroskedastisitas dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat ketidaksamaan varians pada residual di seluruh pengamatan dalam model regresi. Heteroskedastisitas dapat mengganggu validitas model karena membuat hasil estimasi tidak efisien. Dalam penelitian ini, pengujian dilakukan dengan menggunakan scatterplot—yaitu dengan cara memetakan nilai residual terhadap nilai prediksi. Jika titik-titik residual menyebar secara acak dan tidak membentuk pola tertentu (seperti pola kipas atau lengkung), maka asumsi homoskedastisitas dianggap terpenuhi. Pengujian ini penting agar dapat dipastikan bahwa model regresi tidak mengandung kesalahan sistematis pada varians residualnya.



Sumber : Hasil pengolahan data dari SPSS 27.

Gambar 4.2

Uji Heterokedastisitas Scatterplot

Berdasarkan hasil analisis grafik diatas menunjukkan tidak terdapat pola yang jelas, seperti titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Regresi yang baik yakni yang tidak terjadi heteroskedastisitas.

3. Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda menunjukkan kekuatan hubungan antara dua variabel atau lebih, dan juga menunjukkan arah hubungan antara variabel dependen dan independen. Hubungan linier antara dua atau lebih variabel independen (X) dan variabel dependen (Y) diukur dalam analisis regresi linear berganda. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui apakah masing-masing dari variabel independen memiliki hubungan positif atau negatif dengan variabel dependen dan untuk memprediksi nilai variabel dependen jika nilainya positif atau negatif. Pada penelitian ini akan digunakan untuk menganalisis regresi linear berganda pada variabel Akuntabilitas (X1), Transparansi (X2) dan Partisipasi Masyarakat (X3)

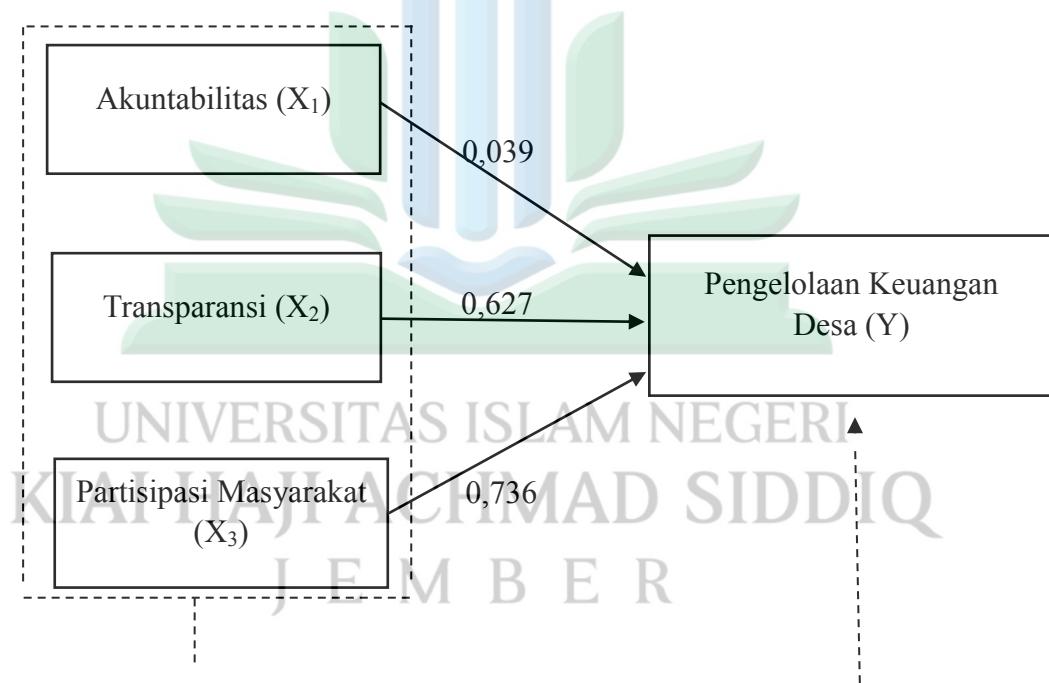
terhadap pengelolaan keuangan desa (Y). hasil pengujian regresi linear yang telah penulis lakukan adalah sebagai berikut:

Tabel 4.15
Analisis Regresi Linier Berganda

Model	Coefficients ^a			t	Sig.
	B	Unstandardized Coefficients	Standardized Coefficients		
		Beta			
1 (Constant)	-2.441	.761		-3.209	.002
Akuntabilitas	.039	.040	.046	.976	.332
Transparansi	.627	.036	.805	17.294	.000
Partisipasi Masyarakat	.736	.055	.385	13.262	.000

a. Dependent Variable: Pengelolaan Keuangan Desa

Sumber : Hasil pengolahan data dari SPSS 27.



Berdasarkan output yang telah didapatkan persamaan regresi linear berganda sebagai berikut:

$$Y = -2.441 + 0.039X_1 + 0.627X_2 + 0.736X_3 + e$$

Persamaan tersebut mengindikasikan bahwa nilai konstanta sebesar -2.441 menunjukkan bahwa apabila akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat tidak diterapkan (nilai = 0), maka nilai dasar pengelolaan keuangan desa adalah negatif atau dalam kondisi yang buruk atau tidak optimal. Nilai konstanta yang negatif menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan desa secara alamiah tidak akan berjalan dengan baik apabila tidak didukung oleh sistem akuntabilitas yang jelas, keterbukaan informasi (transparansi), serta keterlibatan aktif masyarakat. Dengan kata lain, keberadaan akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat merupakan faktor penting yang sangat dibutuhkan untuk mendorong pengelolaan keuangan desa ke arah yang lebih baik. Koefisien regresi untuk masing-masing variabel bebas memberikan gambaran bahwa untuk setiap peningkatan satu satuan pada masing-masing variabel independen, akan terjadi perubahan pada variabel dependen sebesar koefisien tersebut, dengan asumsi variabel lain dianggap tetap. Besarnya koefisien ini juga menunjukkan seberapa besar pengaruh masing-masing faktor dalam mendukung efektivitas pengelolaan keuangan desa.

Dari ketiga variabel independen yang paling dominan adalah transparansi, dengan nilai koefisien regresi sebesar 0.627 dan nilai signifikansi 0.000 (< 0.05), yang berarti pengaruhnya signifikan dan positif terhadap pengelolaan keuangan desa. Artinya, semakin tinggi tingkat keterbukaan informasi dan akses publik terhadap proses keuangan desa, maka semakin baik pula kualitas pengelolaan keuangan desa. Hal ini

menunjukkan bahwa transparansi menjadi elemen penting yang dipercaya masyarakat dalam menilai akuntabilitas keuangan di desa. Sementara itu, variabel partisipasi masyarakat juga memiliki pengaruh positif yang sangat signifikan dengan nilai koefisien sebesar 0.736 dan signifikansi 0.000. Ini menunjukkan bahwa ketika warga desa aktif terlibat dalam musyawarah, perencanaan, serta pengawasan program desa, maka pengelolaan keuangan menjadi lebih akurat, responsif, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Partisipasi publik memperkuat legitimasi keputusan pemerintah desa dan mendorong budaya tata kelola yang bertanggung jawab.

Berbeda dengan dua variabel tersebut akuntabilitas justru tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa. Hal ini ditunjukkan dengan nilai koefisien yang sangat kecil (0.039) dan nilai signifikansi sebesar 0.332 (> 0.05). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dalam konteks penelitian ini, persepsi masyarakat terhadap pertanggungjawaban pemerintah desa belum cukup kuat untuk secara langsung mendorong perubahan dalam pengelolaan keuangan. Hal ini dapat terjadi karena akuntabilitas yang dirasakan belum sepenuhnya diterjemahkan dalam bentuk pelaporan keuangan yang mudah dipahami, atau mungkin karena rendahnya literasi fiskal masyarakat terhadap indikator akuntabilitas itu sendiri. Maka dari itu, perlu adanya peningkatan mekanisme pelaporan dan pelibatan warga dalam proses evaluasi agar prinsip akuntabilitas dapat diinternalisasi dengan lebih baik dan

berkontribusi secara nyata terhadap peningkatan kualitas pengelolaan keuangan desa.

4. Uji Hipotesis

a. Uji t

Uji t (uji parsial) dilakukan dalam penelitian ini untuk mengetahui seberapa besar pengaruh masing-masing variabel independen secara individual terhadap variabel dependen, yaitu pengelolaan keuangan desa. Uji ini bertujuan untuk menguji hipotesis apakah akuntabilitas (X1), transparansi (X2), dan partisipasi masyarakat (X3) secara parsial memiliki pengaruh signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa (Y). Dalam pengujian ini, keputusan didasarkan pada nilai signifikansi (Sig.) dari masing-masing variabel. Adapun kriteria pengambilan keputusan adalah sebagai berikut:

1. Jika nilai $\text{Sig.} < 0,05$, maka variabel independen berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen.
2. Jika nilai $\text{Sig.} > 0,05$, maka variabel independen tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen.

Tabel 4.16**Uji t**

		Coefficients ^a				
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficient s	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-2.441	.761		-3.209	.002
	Akuntabilitas	.039	.040	.046	.976	.332
	Transparansi	.627	.036	.805	17.294	.000
	Partisipasi Masyarakat	.736	.055	.385	13.262	.000

a. Dependent Variable: Pengelolaan Keuangan Desa

Sumber : Hasil pengolahan data dari SPSS 27.

Hasil analisis uji t adalah sebagai berikut:

1. Pengaruh Akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan desa di kecamatan glenmore kabupaten banyuwangi

Hipotesis:

H1: Variabel akuntabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap terhadap pengelolaan keuangan desa di kecamatan glenmore kabupaten banyuwangi

Berdasarkan hasil output yang telah didapatkan, diperoleh nilai t_{hitung} ($0,976$) $<$ t_{tabel} ($3,136$), dengan nilai sig ($0,332$) $>$ ($0,05$) yang dapat disimpulkan H_0 diterima sedangkan H_a ditolak menjelaskan tidak terdapat keterkaitan secara signifikan dari variabel tersebut yang berarti tidak berpengaruh yang signifikan secara parsial variabel akuntabilitas (X_1) terhadap pengelolaan keuangan desa di kecamatan glenmore kabupaten banyuwangi.

2. Pengaruh Transparansi terhadap pengelolaan keuangan desa di kecamatan glenmore kabupaten banyuwangi

Hipotesis :

H2: Variabel transparansi berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa di kecamatan glenmore kabupaten banyuwangi

Berdasarkan hasil output yang telah didapatkan, diperoleh nilai t_{hitung} (17,294) $>$ t_{tabel} (3,136), dengan nilai sig (0,000) $<$ (0,05) yang dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_{a2} diterima, hal tersebut menjelaskan adanya keterkaitan secara signifikan dari variabel terikat yang berarti berpengaruh yang signifikan secara parsial variabel transparansi (X_2) terhadap pengelolaan keuangan desa di kecamatan glenmore kabupaten banyuwangi.

3. Pengaruh Partisipasi Masyarakat terhadap pengelolaan keuangan desa di kecamatan glenmore kabupaten banyuwangi

Hipotesis :

H3: Variabel partisipasi masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa di kecamatan glenmore kabupaten banyuwangi

Berdasarkan hasil output yang telah didapatkan, diperoleh nilai t_{hitung} (13,262) $>$ t_{tabel} (3,136), dengan nilai sig (0,000) $<$ (0,05) yang dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima, hal tersebut menjelaskan adanya keterkaitan secara signifikan dari

variabel terikat yang berarti berpengaruh yang signifikan secara parsial variabel transparansi (X_2) terhadap pengelolaan keuangan desa di kecamatan glenmore kabupaten banyuwangi.

b. Uji F

Tujuan dari uji F adalah untuk menentukan apakah semua variabel independen dalam model regresi mempengaruhi variabel dependen secara bersamaan atau tidak. Untuk uji t dasar pengambilan keputusan adalah sebagai berikut:

1. Semua variabel independen memiliki pengaruh signifikan secara bersamaan terhadap variabel dependen jika nilai signifikan < 0.05 atau $F_{hitung} > F_{tabel}$. Dengan demikian, H_0 ditolak dan H_a diterima.
2. Semua variabel independen tidak memiliki pengaruh signifikan secara bersamaan terhadap variabel dependen jika nilai signifikan < 0.05 atau $F_{hitung} > F_{tabel}$. Dengan demikian, H_0 diterima dan H_a ditolak.

Untuk uji f (simultan), berikut ini adalah hipotesis yang digunakan:
KIAI HAJI ACHIMAD SIDDIQ JEMBER
 H_4 : Variabel Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi Masyarakat berpengaruh secara signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa di kecamatan glenmore kabupaten banyuwangi.

Rumus F_{tabel} k; n-k digunakan untuk mendapatkan nilai F_{tabel} . Nilai k adalah jumlah variabel independen, yang berjumlah 3 dan nilai n adalah jumlah sampel yang digunakan, yang berjumlah 70 individu. Sehingga diperoleh nilai $F_{tabel} = 70-3-1 = 66$. Dapat

dilihat bahwa nilai F_{tabel} sebesar $66 = 3,136$. Hasil uji f (simultan) yang telah didapatkan peneliti adalah sebagai berikut:

Tabel 4.17

Uji F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1605.999	3	535.333	387.103	.000 ^b
	Residual	91.273	66	1.383		
	Total	1697.271	69			

a. Dependent Variable: Pengelolaan Keuangan Desa

b. Predictors: (Constant), Partisipasi Masyarakat, Transparansi, Akuntabilitas
Sumber : Hasil pengolahan data dari SPSS 27.

Berdasarkan output yang telah peneliti dapatkan diatas diketahui bahwa f_{hitung} sebesar 387.103 dan nilai signifikansi 0.000 yang dapat disimpulkan bahwa $f_{hitung} > f_{tabel}$ dengan nilai sebesar $387,103 > 3,136$ dan nilai signifikansi sebesar $0,00 < 0,05$ yang dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima yang artinya seluruh variabel independent yaitu akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat berpengaruh secara simultan terhadap pengelolaan keuangan desa di kecamatan glenmore kabupaten banyuwangi.

5. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji koefisien determinasi (R^2) dilakukan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan model regresi dalam menjelaskan variasi perubahan variabel dependen, yaitu pengelolaan keuangan desa, yang dipengaruhi oleh variabel independen akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat. Koefisien determinasi memberikan gambaran mengenai proporsi kontribusi semua variabel bebas terhadap variabel terikat. Semakin tinggi nilai R^2 , maka semakin besar pula variabilitas

pengelolaan keuangan desa yang dapat dijelaskan oleh model, dan sebaliknya jika nilai R^2 rendah, berarti banyak faktor lain di luar model yang mempengaruhi.

**Tabel 4.18
Uji Koefisien Determinasi R^2**

Model Summary^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.773 ^a	.746	.744	1.17598
a. Predictors:	(Constant), Partisipasi Masyarakat, Transparansi, Akuntabilitas			
b. Dependent Variable:	Pengelolaan Keuangan Desa			

Sumber : Hasil pengolahan data dari SPSS 27.

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi (R^2) pada Tabel 4.19 diperoleh nilai R Square sebesar 0,746 dan Adjusted R Square sebesar 0,744, yang berarti bahwa sebesar 74,6% variasi dalam pengelolaan keuangan desa dapat dijelaskan oleh tiga variabel independen yaitu akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat, sedangkan sisanya sebesar 25,4% dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian ini, seperti kapasitas sumber daya manusia aparatur desa, sistem pengawasan eksternal, maupun faktor sosial-politik di tingkat lokal. Nilai R^2 yang tinggi menunjukkan bahwa model regresi yang digunakan memiliki kemampuan prediktif yang kuat dalam menjelaskan hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa semakin baik penerapan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat, maka semakin meningkat pula efektivitas pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Glenmore. Hasil ini mempertegas pentingnya sinergi antara ketiga aspek tata kelola tersebut

dalam menciptakan sistem pengelolaan keuangan desa yang efisien, berintegritas, dan berorientasi pada kepentingan publik.

D. Pembahasan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel Akuntabilitas, Transparansi dan partisipasi Masyarakat terhadap pengelolaan keuangan desa di kecamatan glenmore kabupaten banyuwangi

1. Pengaruh Akuntabilitas (X1) terhadap Pengelolaan Keuangan Desa (Y) di Kecamatan Glenmore

Akuntabilitas merupakan prinsip fundamental dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang transparan, efektif, dan bertanggung jawab. Dalam konteks pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Glenmore, Kabupaten Banyuwangi, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas belum memberikan pengaruh signifikan terhadap peningkatan kualitas pengelolaan dana desa. Meskipun perangkat desa telah melakukan berbagai upaya administratif untuk mempertanggungjawabkan penggunaan dana, penerapan akuntabilitas tersebut masih belum sepenuhnya mampu memperbaiki transparansi, efektivitas, dan efisiensi pengelolaan keuangan desa secara menyeluruh. Praktik akuntabilitas yang ada masih cenderung berorientasi pada pemenuhan kewajiban formal terhadap regulasi, ketimbang membangun

mekanisme pertanggungjawaban publik yang sejati kepada masyarakat desa sebagai penerima manfaat langsung.⁶⁶

Berdasarkan hasil uji T (Parsial) dapat diketahui bahwa nilai koefisien sebesar (0,039) dengan nilai signifikan (0,332) > (0,05) yang mana dapat disimpulkan bahwa secara parsial variabel akuntabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa di kecamatan glenmore kabupaten banyuwangi.

Pada penelitian ini variabel Akuntabilitas mempunyai beberapa indikator yaitu: Transparansi ialah sebuah prinsip yang membuka jalan bagi perubahan besar. Setiap informasi anggaran kini mudah diakses oleh masyarakat, mulai dari papan informasi, laporan realisasi anggaran, hingga hasil musyawarah desa di kecamatan glenmore. Keterbukaan ini perlahan menumbuhkan kepercayaan publik, karena warga merasa dilibatkan dan mengetahui kemana arah penggunaan dana desa. Tak hanya itu, kualitas Pelayanan aparatur desa juga semakin membaik. Para perangkat desa bekerja lebih sigap dalam memberikan informasi dan membantu administrasi keuangan. Pelayanan yang baik membuat proses pencatatan keuangan menjadi lebih tertib, rapi, dan mudah dipertanggungjawabkan.

Selain itu Partisipasi warga di kecamatan glenmore kabupaten banyuwangi dalam perencanaan dan pengawasan anggaran membuat keputusan yang diambil pemerintah desa lebih tepat sasaran. Program-program desa menjadi lebih efektif karena benar-benar disusun

⁶⁶ Mita Suliyatin, Evada Dewata, Indra Satriawan.“Transparansi , Akuntabilitas Dan Pengelolaan Keuangan Desa,” *Journal Of Applied Accounting (JAA)* 4, no. 1 (2025): 1–6.

berdasarkan kebutuhan nyata yang diungkapkan masyarakat dalam musyawarah. Dan juga terdapat unsur yang sangat penting yaitu Profesionalisme aparat desa, dengan pemahaman yang baik tentang regulasi, kemampuan administratif yang mumpuni, dan kedisiplinan dalam mengikuti prosedur, aparat desa mampu menghindari berbagai kesalahan pencatatan. Laporan keuangan desa pun menjadi lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya Evaluasi baik oleh pemerintah desa sendiri maupun oleh pendamping desa dan kecamatan. Dari hasil evaluasi itulah aparat desa mengetahui kekurangan dan melakukan perbaikan. Langkah ini menjadi fondasi penting untuk menjaga kualitas tata kelola keuangan desa secara berkelanjutan. Hasil menunjukkan bahwa Transparansi, Pelayanan yang baik, Partisipasi masyarakat, Profesionalisme, dan Evaluasi yang konsisten adalah kunci menuju pengelolaan keuangan desa yang semakin akuntabel dan terpercaya.

Menurut teori keagenan Jensen dan Meckling, akuntabilitas dalam keuangan publik bukan sekadar kewajiban menyusun laporan, tetapi merupakan proses moral dan sosial yang menuntut hubungan dua arah antara pengelola dana dan masyarakat. Akuntabilitas yang efektif harus mencakup *answerability* (kewajiban menjelaskan tindakan), *responsibility* (tanggung jawab moral dan hukum), dan *enforcement* (penegakan jika terjadi pelanggaran). Dalam konteks desa di Kecamatan Glenmore, lemahnya pengaruh akuntabilitas disebabkan karena praktik yang dilakukan masih terbatas pada *answerability* formal melalui laporan

administrasi, sementara aspek *responsibility* dan *enforcement* belum berjalan. Akibatnya, meskipun laporan keuangan dibuat sesuai aturan, praktik pertanggungjawaban belum mampu menjamin keadilan, keterbukaan, dan kontrol sosial. Teori Jensen menegaskan bahwa akuntabilitas akan optimal apabila masyarakat terlibat aktif dalam menilai dan menegakkan tanggung jawab pemerintah desa, bukan hanya menerima informasi secara pasif.

Temuan penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Vidyasari, yang menunjukkan bahwa variabel akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa.⁶⁷ Selain itu adapun penelitian dari Yassir, yang hasilnya ialah akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa.⁶⁸ Dan juga penelitian oleh Alfiani, menyatakan bahwa akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa.⁶⁹

Dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas di Kecamatan Glenmore berpotensi meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan desa, namun masih terhambat oleh faktor struktural, kultural, dan keterbatasan aparatur. Karena itu, penguatan akuntabilitas perlu dilakukan melalui peningkatan kompetensi, penanaman nilai kejujuran dan keterbukaan, serta penguatan

⁶⁷ Febriana Nafi'ah Vidyasari and Bambang Suryono, "Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah," *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi* 10, no. 4 (2021): 1–24.

⁶⁸ Yassir, Mursalim, and Asriani Junaidi, "Pengaruh Akuntabilitas Keuangan, Pengawasan Keuangan Dan Transparansi Anggaran Terhadap Pengelolaan Keuangan," *YUME : Journal of Management* 5, no. 2 (2022): 477–494.

⁶⁹ Alfiani and Estiningrum, "Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi Dan Sistem Akuntansi Keuangan Desa Dalam Pengelolaan Keuangan Desa." *Ekuitas: Jurnal Pendidikan Ekonomi*, Vol 9, no 2 (2021), 222.

mekanisme pertanggungjawaban publik. Musyawarah terbuka, akses informasi keuangan, dan optimalisasi peran BPD menjadi langkah penting agar akuntabilitas diterapkan secara substantif, bukan sekadar administratif.

2. Pengaruh Transparansi (X2) terhadap Pengelolaan Keuangan Desa (Y) di Kecamatan Glenmore

Transparansi menjadi pilar utama dalam tata kelola keuangan desa yang baik dan berintegritas. Dalam konteks pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Glenmore, Kabupaten Banyuwangi, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa transparansi memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kualitas pengelolaan dana desa. Pemerintah desa yang menerapkan prinsip keterbukaan dalam setiap tahapan pengelolaan keuangan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan, cenderung menghasilkan pengelolaan keuangan yang lebih efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan. Transparansi membuka ruang bagi masyarakat untuk mengakses informasi yang relevan mengenai penggunaan dana desa, sehingga memungkinkan terjadinya pengawasan sosial yang lebih kuat dan mendorong akuntabilitas pemerintah desa dalam setiap penggunaan anggaran.⁷⁰

Berdasarkan hasil uji T (Parsial) dapat diketahui bahwa nilai koefisien sebesar (0,627) dengan nilai signifikan ($0,000 < (0,05)$) yang

⁷⁰ Kartika Novelina Br Purba, Abdul Gani, Khairutun Nazah, "Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Pada Desa Rumah Sumbul Kabupaten Deliserdang," *Jurnal Media Informatika (JUMIN)* 6, no. 2 (2024): 498–502.

mana dapat disimpulkan bahwa secara parsial variabel transparansi berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa di kecamatan glenmore kabupaten banyuwangi.

Pada penelitian ini variabel Transparansi mempunyai beberapa indikator yaitu Informasi yang baik menjadi fondasi penting bagi terciptanya tata kelola yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Ketika data anggaran disajikan secara terbuka, masyarakat memiliki kesempatan lebih luas untuk memahami alur penggunaan dana serta melakukan pengawasan secara efektif. Keterbukaan informasi ini kemudian berkaitan erat dengan Aksesibilitas, yaitu sejauh mana informasi tersebut dapat dijangkau oleh masyarakat yang ada di kecamatan glenmore. Semakin mudah warga memperoleh dan memahami dokumen anggaran, semakin besar pula peluang mereka untuk terlibat dalam proses pengawasan serta menilai apakah pengelolaan keuangan desa telah berjalan sesuai aturan. Selain itu Ketepatan ini mencakup kesesuaian antara kebutuhan prioritas masyarakat dengan keputusan yang diambil pemerintah desa, sehingga setiap program atau kegiatan yang direncanakan benar-benar memberikan manfaat dan meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan desa di kecamatn glenmore kabupaten banyuwangi.

Dan Akuntabilitas sebagai tolok ukur utama yang menggabungkan keseluruhan proses tersebut. Melalui mekanisme pelaporan anggaran yang transparan, keterlibatan masyarakat dalam pengawasan, kepatuhan aparatur terhadap prosedur, serta ketepatan data dalam

pertanggungjawaban keuangan desa dapat menunjukkan bahwa setiap keputusan diambil secara bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Ketika indikator ini berjalan secara konsisten, maka kepercayaan publik terhadap pemerintah desa akan semakin kuat. Seluruh proses ini diperkuat oleh sistem pengelolaan keuangan yang jelas dan terstruktur meliputi transparansi, akurasi data, dan pengawasan publik yang memastikan bahwa setiap tahapan berjalan secara tertib dan sesuai ketentuan. Dengan demikian, keterpaduan antara informasi yang baik, aksesibilitas, ketepatan, akuntabilitas, dan sistem yang mendukung akan menciptakan pengelolaan keuangan desa yang berkualitas, terbuka, dan mampu memenuhi harapan masyarakat.⁷¹ Dari kelima indikator yaitu informasi, aksesibilitas, ketepatan, akuntabilitas, dan sistem, seluruhnya saling mendukung karena secara bersama-sama membentuk mekanisme pengelolaan yang efektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga setiap proses pengelolaan keuangan desa berjalan tertib, terkontrol, dan sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik.

Menurut teori keagenan (agency theory) oleh Jensen dan Meckling, transparansi dalam tata kelola keuangan publik merupakan elemen penting yang membangun kepercayaan dan legitimasi antara pemerintah dan masyarakat. Transparansi tidak hanya berarti menyampaikan informasi, tetapi juga memberikan hak kepada masyarakat untuk mengetahui dan memahami bagaimana sumber daya publik dikelola. Tiga prinsip utama

⁷¹ Aries Iswahyudi, Iwan Triyuwono, M. Achsin, "Value For and Empiris Hubungan Pemahaman Akuntabilitas , Money Dan Good Governance (Studi Empiris pada SKPD di Kabupaten Lumajang)" *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, Vol 1, no,2 (2016): 151-166"

transparansi menurut Jensen meliputi clarity (kejelasan informasi), accessibility (kemudahan akses data), dan timeliness (ketepatan waktu penyampaian informasi).

Dalam pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Glenmore, transparansi yang baik informasi yang jelas, akurat, dan tepat waktu mendorong masyarakat untuk aktif mengawasi, menilai, dan memberikan masukan terhadap kebijakan desa. Namun, apabila transparansi hanya dilakukan secara formalitas atau terbatas pada forum tertentu, maka tujuan utamanya tidak akan tercapai. Oleh karena itu, transparansi di tingkat desa harus berkembang menjadi sistem komunikasi publik yang inklusif, sehingga masyarakat dapat berperan sebagai mitra aktif dalam setiap tahapan pengelolaan keuangan desa.

Temuan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Faizzatus, yang menunjukkan bahwa transparansi berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.⁷² Dalam penelitian lain oleh Liana, menunjukkan bahwa transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa.⁷³ Dan penelitian oleh

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KAI HAJI ACHIMAD SIDDIQ
J E M B E R**

⁷² Faizzatus Solihah, Biana Adha Inapty, and Adhitya Bayu Suryantara, “Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas Dan Peran Perangkat Desa Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Empiris Pada Desa Se-Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur),” *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi* 2, no. 1 (2022): 136–154.

⁷³ S.A Liana and Nugroho. W.S, “Pengaruh Transparansi, Kompetensi Aparatur Desa, Partisipasi Masyarakat, Dan Pengawasan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Empiris Pada Desa Di Kecamatan Kaliangkrik),” *Business and Economics Conference in Utilization of Modern Technology*, no. 2828–0725 (2022): 1–15.

Yanti, menunjukkan bahwa transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa.⁷⁴

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa transparansi berperan penting dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Glenmore. Semakin terbuka informasi, semakin besar partisipasi masyarakat dalam pengawasan, sehingga pengelolaan dana desa menjadi lebih akuntabel, efektif, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

3. Pengaruh Partisipasi Masyarakat (X3) Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa (Y) di Kecamatan Glenmore

Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa merupakan aspek yang tidak dapat dipisahkan dari konsep demokratisasi pembangunan dan tata kelola pemerintahan desa yang inklusif. Di Kecamatan Glenmore, Kabupaten Banyuwangi, partisipasi warga menjadi salah satu indikator penting dalam mengukur sejauh mana pengelolaan keuangan desa telah memenuhi prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keberpihakan terhadap kepentingan publik. Berdasarkan temuan penelitian ini, partisipasi masyarakat terbukti memiliki pengaruh yang kuat dan signifikan terhadap efektivitas pengelolaan keuangan desa. Keterlibatan warga dalam proses perencanaan, pengawasan, dan evaluasi keuangan desa mendorong terciptanya sistem pengelolaan yang lebih

⁷⁴ Elisa Rama Yanti, Wiralestari, and Wiwik Tiswiyanti, “Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus Pada Desa Di Kecamatan Tanah Kampung Kota Sungai Penuh),” *Jurnal Manajemen Terapan Dan Keuangan* 12, no. 01 (2023): 53–64.

responsif, terbuka, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat setempat.⁷⁵

Berdasarkan hasil uji T (Parsial) dapat diketahui bahwa nilai koefisien sebesar (0,736) dengan nilai signifikan ($0,000 < 0,05$) yang mana dapat disimpulkan bahwa secara parsial variabel partisipasi masyarakat berpengaruh signifikan dan positif terhadap pengelolaan keuangan desa di kecamatan glenmore kabupaten banyuwangi.

Pada penelitian ini variabel Partisipasi Masyarakat Mempunyai 3 indikator yaitu Forum keaktifan masyarakat menjadi indikator penting dalam mewujudkan akuntabilitas, karena melalui forum tersebut warga dapat mengawasi realisasi anggaran, memberi masukan, serta menuntut transparansi sehingga proses pengambilan keputusan berjalan lebih partisipatif dan mendukung pengelolaan keuangan desa. Dan juga Keterlibatan masyarakat di kecamatan glenmore menjadi faktor penentu efektivitas transparansi dan pengawasan publik, sebab partisipasi yang aktif memastikan bahwa keputusan anggaran benar-benar sesuai dengan kebutuhan warga sekaligus memperkuat kontrol sosial agar setiap alokasi dana dapat dipertanggungjawabkan dengan baik. Selain itu, Akses terhadap informasi publik mulai dari ketersediaan data, kemudahan masyarakat dalam berpartisipasi, hingga kemampuan warga memahami laporan keuangan menjadi elemen yang meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kualitas pengawasan publik. Dengan adanya akses yang

⁷⁵ Eri Nofriza Andika Subandra, Usdeldi, "Pengaruh Transparansi Akuntabilitas Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa," *JAAB: Jurnal of Applied Accounting And Business* 4, no. 2 (2022) Hal 41-48.

baik dan keterlibatan masyarakat yang aktif, aparatur desa dapat melaksanakan pengelolaan keuangan secara terbuka, sehingga setiap tahapan perencanaan dan pelaksanaan anggaran dapat dipantau bersama dan pada akhirnya memperkuat integritas tata kelola keuangan desa. Dari ketiga indikator, yaitu forum, keterlibatan, dan partisipasi aktif masyarakat di Glenmore, semuanya saling mendukung secara bersama-sama untuk membentuk mekanisme pengawasan yang efektif, memperkuat akuntabilitas, serta memastikan pengelolaan keuangan desa berjalan transparan dan sesuai kebutuhan warga.

Dalam penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Irmawati, yang menyatakan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa.⁷⁶ Dan penelitian oleh Juniarti, yang menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa.⁷⁷ Penelitian Liana, juga menyebutkan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa.⁷⁸

Dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat merupakan faktor penting dalam mewujudkan pengelolaan keuangan desa yang transparan, akuntabel, dan sesuai kebutuhan warga. Di Kecamatan Glenmore,

⁷⁶ Irmawati, “Pengaruh Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa,” *Jurnal Ilmiah Administrasita*’ 13, no. 1 (2022): 1–13.

⁷⁷ Ulvia Juniarti, Biana Adha Inapty, and Intan Rakhmawati, “Pengaruh Kompetensi Aparatur, Partisipasi Masyarakat, Terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Labuhan Haji Dengan Pemanfaatan Teknologi Informasi Sebagai Variabel Intervening,” *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi* 2, no. 3 (2022): 608–620.

⁷⁸ Liana and Nugroho. W.S, “Pengaruh Transparansi, Kompetensi Aparatur Desa, Partisipasi Masyarakat, Dan Pengawasan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Empiris Pada Desa Di Kecamatan Kaliangkrik).” *Business and Economics Conference in Utilization of Modern Technology*, (2022), 1–15

partisipasi yang didukung keterbukaan informasi, responsivitas pemerintah desa, dan kapasitas warga terbukti meningkatkan kualitas tata kelola keuangan. Dengan memperluas partisipasi yang bermakna, pengelolaan keuangan desa dapat menjadi instrumen pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

4. Pengaruh Akuntabilitas (X1), Transparansi (X2), dan Partisipasi Masyarakat (X3) Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa (Y) di Kecamatan Glenmore

Hasil uji F (Simultan) yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa nilai Fhitung > Ftabel yaitu sebesar (387.103) dan nilai signifikan (0.00) < (0,05) yang berarti Ho ditolak dann Ha diterima, dalam penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan, variabel Akuntabilitas (X1), Transparansi (X2), dan Partisipasi Masyarakat (X3) bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Glenmore, Kabupaten Banyuwangi. Adapun nilai Ajusted R Square diperoleh nilai sebesar 74,6% variasi dalam pengelolaan keuangan desa dapat dijelaskan oleh tiga variabel independen yaitu akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat, sedangkan sisanya sebesar 25,4% dipengaruhi oleh faktor lain.

Temuan ini menegaskan bahwa keberhasilan dalam pengelolaan keuangan desa tidak hanya ditentukan oleh satu faktor tunggal, melainkan merupakan hasil dari keterpaduan berbagai elemen tata kelola yang saling melengkapi. Ketika prinsip-prinsip tata kelola desa dijalankan secara

terpadu yakni adanya tanggung jawab (akuntabilitas), keterbukaan informasi (transparansi), serta keterlibatan aktif warga (partisipasi)—maka efektivitas dan efisiensi dalam perencanaan, pelaksanaan, serta pelaporan anggaran desa dapat tercapai secara optimal.

Hasil dalam uji parsial variabel akuntabilitas tidak berpengaruh signifikan, hasil simultan justru memperlihatkan bahwa akuntabilitas tetap memiliki kontribusi ketika dikombinasikan dengan dua variabel lainnya. Hal ini menandakan bahwa akuntabilitas tidak dapat berdiri sendiri, melainkan lebih efektif ketika didukung oleh sistem transparansi yang baik dan partisipasi masyarakat yang aktif. Transparansi memungkinkan masyarakat memperoleh informasi yang relevan dan akurat, sementara partisipasi masyarakat memperkuat kontrol sosial dan legitimasi kebijakan desa. Dalam sinergi yang solid, ketiga variabel ini menciptakan fondasi tata kelola keuangan desa yang sehat dan berorientasi pada kepentingan publik.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa model regresi yang digunakan dalam penelitian ini mampu menjelaskan hubungan antara variabel independen dan dependen secara signifikan dan substansial. Hal ini tercermin dari nilai F hitung yang sangat tinggi dan signifikansi di bawah tingkat probabilitas 0,05, yang mengindikasikan bahwa secara bersama-sama, akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat berperan penting dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan desa. Oleh karena itu, pendekatan holistik yang melibatkan berbagai dimensi tata

kelola perlu dikembangkan secara berkelanjutan di setiap desa. Pemerintah desa perlu membangun sistem yang tidak hanya fokus pada satu dimensi, tetapi justru memperkuat sinergi antara pertanggungjawaban administratif, keterbukaan informasi, dan peran aktif masyarakat dalam seluruh proses pembangunan dan penganggaran desa.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa transparansi dan partisipasi masyarakat memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Glenmore, Kabupaten Banyuwangi, sementara akuntabilitas tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan secara statistik. Temuan ini mengindikasikan bahwa dalam konteks lokal Glenmore, keterbukaan informasi dan keterlibatan aktif masyarakat lebih menentukan efektivitas tata kelola anggaran desa dibandingkan faktor akuntabilitas formal yang dijalankan oleh aparatur desa. Hal ini juga menunjukkan bahwa nilai-nilai demokratis dan partisipatif memiliki peran lebih kuat dalam mengarahkan kebijakan anggaran yang tepat sasaran dan berpihak pada kebutuhan masyarakat.

1. Akuntabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun tanggung jawab formal dalam pelaporan dan pertanggungjawaban anggaran telah dilakukan, namun belum mampu memberikan dampak nyata terhadap efektivitas pengelolaan keuangan desa. Kemungkinan besar, akuntabilitas di tingkat desa masih bersifat administratif dan belum sepenuhnya diterjemahkan dalam tindakan nyata yang berdampak langsung pada masyarakat. Lemahnya pengawasan internal dan rendahnya kesadaran masyarakat terhadap

pentingnya pertanggungjawaban publik juga dapat menjadi faktor penghambat akuntabilitas yang efektif.

2. Transparansi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa. Keterbukaan dalam menyampaikan informasi anggaran, penggunaan media informasi desa, serta ketersediaan data publik telah mendorong terciptanya kepercayaan masyarakat terhadap aparatur desa. Transparansi juga meningkatkan kesadaran publik untuk melakukan kontrol sosial terhadap penggunaan anggaran desa, sehingga memperkecil potensi penyimpangan.
3. Partisipasi masyarakat juga berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa. Keterlibatan aktif warga dalam musyawarah desa, perencanaan program, serta pengawasan anggaran menciptakan sistem tata kelola yang lebih demokratis dan akomodatif terhadap kebutuhan lokal. Partisipasi ini berkontribusi terhadap ketepatan sasaran program pembangunan dan memperkuat legitimasi sosial dari kebijakan desa.
4. Secara simultan, transparansi dan partisipasi masyarakat, bersama dengan akuntabilitas, secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa. Meskipun akuntabilitas secara parsial tidak signifikan, keberadaannya tetap penting sebagai fondasi tata kelola pemerintahan desa yang harus terus diperkuat. Model regresi yang digunakan dalam penelitian ini secara keseluruhan layak dan mampu menjelaskan hubungan variabel secara komprehensif.

Dengan demikian untuk mewujudkan pengelolaan keuangan desa yang lebih efektif di Kecamatan Glenmore, pemerintah desa perlu memperkuat aspek transparansi dan memperluas ruang partisipasi masyarakat secara substansial. Sementara itu, aspek akuntabilitas perlu dievaluasi ulang agar tidak hanya bersifat prosedural, tetapi benar-benar dapat memberikan dampak nyata terhadap sistem pengelolaan anggaran desa.

B. Saran

Peneliti dapat memberikan saran-saran sebagai berikut berdasarkan hasil penelitian, pembahasan, dan simpulan diatas:

1. Bagi pemerintah desa disarankan untuk memperkuat akuntabilitas melalui pelaporan yang lebih tertib dan sesuai regulasi, meningkatkan transparansi dengan menyediakan akses informasi anggaran yang mudah dan diperbarui secara berkala, serta mendorong partisipasi masyarakat yang lebih aktif dalam perencanaan dan pengawasan anggaran. Upaya ini perlu didukung oleh peningkatan kapasitas aparatur desa, pemanfaatan teknologi informasi, serta edukasi kepada masyarakat agar mampu terlibat secara efektif sehingga pengelolaan keuangan desa berjalan lebih terbuka, akurat, dan responsif terhadap kebutuhan warga.
2. Bagi Pihak Kampus dan Lembaga Penelitian ini diharapkan mendorong riset tentang akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa. Melalui penelitian, pengabdian, dan kerja sama dengan pemerintah desa, perguruan tinggi dapat menjadi mitra strategis dalam menciptakan tata kelola desa yang transparan dan

partisipatif. Selain itu, perlu disediakan forum akademik seperti seminar dan pelatihan agar hasil penelitian dapat diterapkan langsung untuk mendukung pembangunan desa yang efektif dan berkelanjutan.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Jabar, Evi Yuniarni. "Penerapan Prinsip Akuntabilitas Dalam Pelayanan Publik Untuk Mewujudkan Good Governance." *Jurnal Ekonomi Manajemen Bisnis Dan Akuntansi: EMBA* 4, no. 1 (2025): 131–146.
- Abdul Latif, Enni Savitri, Susilatri. "Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi Dan Kualitas Sumber Daya Manusia Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Empiris Pada Pemerintah Desa Di Kabupaten Solok, Sumatra Barat)." *Jurnal Ilmiah Akuntansi* 5, no. 2 (2021): 183–192.
- Abdullah, Karimuddin. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. (Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2022).
- Abdullah, Wulandari, Hartati Tuli, and Nurnaryati Panigoro. "Pengaruh Akuntabilitas Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Pada Desa Di Kecamatan Dungaliyo Kabupaten Gorontalo)." *JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi)* 9, no. 5 (2023): 2186–2194.
- Aldo, Rahbila, Rusman Soleman, and Kasim Sinen. "Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Partisipasi Masyarakat, Komitmen Organisasi, Penerapan Sistem Informasi Keuangan Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa." *Da'watuna: Journal of Communication and Islamic Broadcasting* 4, no. 2 (2023): 571–581.
- Alfiani, Anggi, and Sri Dwi Estiningrum. "Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi Dan Sistem Akuntansi Keuangan Desa Dalam Pengelolaan Keuangan Desa." *Ekuitas: Jurnal Pendidikan Ekonomi* 9, no. 2 (2021), 222.
- Andika Subandra, Usdeldi, Eri Nofriza. "Pengaruh Transparansi Akuntabilitas Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa." *JAAB : Jurnal of Applied Accounting And Business* 4, no. 2 (2022).
- Anggi Risma Warni, Edfan Darlis, Al Azhar. "Membangun Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Melalui Kompetensi, Kejelasan Sasaran Anggaran, Dan Sistem Pelaporan." *Jurnal Kajian Akuntansi Dan Bisnis Terkini* 6, no. 2 (2025): 272–285.
- Aries Iswahyudi, Iwan Triyuwono, M. Achsin. "Hubungan Pemahaman Akuntabilitas , Money Dan Good Governance." *Jurnal Ilmiah Akuntansi* 1, no. 2 (2016): 151–166.
- Balady, Mohammad Haris. "Analisis Sikap, Norma Subyektif, Kontrol Perilaku Dan Pengalaman Penggunaan Internet Terhadap Niat Dan Perilaku Berbelanja Online Di Kota Malang," *Jurnal Aplikasi Manajemen* 9, no 4, (2020).

Bilatula, Rahmawati, Nilawaty Yusuf, M Si, Muliyani Mahmud, S Pd, and Dana Desa. "Pengaruh Akuntabilitas , Transparansi , Partisipasi Masyarakat Dan Pengawasan Terhadap Pengelolaan Dana Desa Terhadap Pengelolaan Dana Desa Dalam Mewujudkan Good Governance." *SEIKO: Journal of Management & Business* 6, no. 2 (2023): 326–335.

Dasilva Romedios Wakman, Zakaria, Fahrudin Pasolo, Abdul Rasyid, Ridwan Rumasukun. "Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pengelolaan Keuangan Dana Desa Distrik Elelim Kabupaten Yalimo." *Economics and Digital Business Review* 6, no. 2 (2025): 1287–1301.

Elvera and Yesita Astarina. "Metodologi Penelitian (Yogyakarta: Penerbit ANDI, 2021).

Erna Puspitasari, Nur Ika Mauliyah, Anam Miftakhul Huda. "Mewujudkan Prinsip Good Governance Dalam Pengelolaan Akuntabilitas Dana Desa." *Jurnal Pemikiran & Penelitian Ekonomi* Vol. 07, no. 01 (2019): 17–26.

Fadilah, H, A W Lubis, and Nurlaila. "Analisis Penerapan Pengelolaan Perencanaan, Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018." *SEIKO: Journal of Management & Business* 6, no. 2 (2020): 28–40.

Faizzatus Solihah, Biana Adha Inapty, Adhitya Bayu Suryantara. "Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas Dan Peran Perangkat Desa Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Empiris Pada Desa Se-Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur)." *Risma* 2 (2022): 136–154.

Faizzatus Solihah, Biana Adha Inapty, and Adhitya Bayu Suryantara. "Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas Dan Peran Perangkat Desa Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Empiris Pada Desa Se-Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur)." *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi* 2, no. 1 (2022): 136–154.

Fajri, Ridha, and Julita Julita. "Pengaruh Transparansi, Partisipasi Masyarakat, Kompetensi Aparatur Desa, Dan Pemahaman Regulasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa." *Jurnal Al-Iqtishad* 17, no. 2 (2021): 209.

Firdaus, Anita, Suharno Suharno, and Sunarti Sunarti. "Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Sidoharjo Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen." *Jurnal Akuntansi Dan Sistem Teknologi Informasi* 15, no. 3 (2020): 291–300.

Fora Susanti, Yenny Ernitawati, Roni Roni. "Analysis Of Transparency , Accountability And Role Of Village Officials In Village Financial Management (Case Study In Wanásari District , Brebes Regency)." *Jurnal Ekonomi* 12, no. 03 (2023): 1706–1718.

- Haikal, Muhammad Fikri. "Akuntabilitas Dan Transparansi Dalam Pelayanan Publik (Studi Kasus Pelayanan E-KTP Di Kantor Kecamatan Tallo Makassar)." *Jurnal Administrasi Negara* 28, no. April (2022): 89–112.
- Hermanus Reo, Yuliana Sedho. "Sistem Akuntansi Keuangan Desa Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus Pada Desa Ulupulu Kecamatan Nangaroro, Kabupaten Ngeneo)." *JSE: Jurnal Sharia Economica* 4, no. 4 (2025).
- Imaduddin, Ahmad Khoirul, Maslichah, and Dwiyani Sudaryanti. "Analisis Akuntabilitas, Efektivitas Dan Efisiensi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Pemerataan Pemberdayaan Masyarakat (Studi Di Desa Pucanggarum Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro)." *E-Jra* 11, no. 05 (2022): 69–82.
- Irmawati. "Pengaruh Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa." *Jurnal Ilmiah Administrasita'* 13, no. 1 (2022): 1–13.
- Juniarti, Ulvia, Biana Adha Inapy, and Intan Rakhmawati. "Pengaruh Kompetensi Aparatur, Partisipasi Masyarakat, Terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Labuhan Haji Dengan Pemanfaatan Teknologi Informasi Sebagai Variabel Intervening." *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi* 2, no. 3 (2022): 608–620.
- Kaiwai, Hans Z., Vanessa Irene Mayor, Charley M. Bisai, and Tince Rumalutur. "Analisis Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Dana Desa Di Kampung Enggros Kota Jayapura." *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Studi Pembangunan* 7, no. 1 (2022): 1–19.
- Kristi Geovani Tumanger, Muhammad Salman, Nasrul Kahfi Lubis. "Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas Dan Peran Perangkat Desa Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa Di Kecamatan Tinada." *Jurnal Mahasiswa Akuntansi Samudra (JMAS)* 6, no. 5 (2025): 293–308.
- Liana, S.A., and Nugroho. W.S. "Pengaruh Transparansi, Kompetensi Aparatur Desa, Partisipasi Masyarakat, Dan Pengawasan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Empiris Pada Desa Di Kecamatan Kaliangkrik)." *Business and Economics Conference in Utilization of Modern Technology*, no. 2828–0725 (2022): 1–15.
- Maina, Nita, Johny Subarkah, and Yuwita Ariessa Pravasanti. "Pengaruh Akuntabilitas , Transparansi Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Dana Desa Se- Kecamatan Sambi Boyolali." *Jurnal Ilmiah Keuangan Akuntansi Bisnis* 1, no. 2 (2022): 51–59.
- Making, Andreani Avellyni Leda. "Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi Dan Pengawasan Terhadap Pengelolaan Dana Desa." *Jurnal Riset Manajemen Dan Bisnis* 6, no. 1 (2021): 11–18.
- Mardiasmo. "Akuntansi Sektor Publik" (Yogyakarta: Andi, 2009).

- Misnaini, Achmad dan. "Akuntabilitas Dan Trasparansi Pengelolaan Dana Desa Di Desa Duwet Panarukan Situbondo." *Jurnal Al-Idarah* 2, no. 2 (2021): 45–58.
- Nasirwan, Mahle Muhammad Ridwan. "Akuntabilitas Dan Transparansi Berbasis Bagi Hasil (Analisis Terhadap Karyawan Toko Di Kota Beureunuen)." *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 2, no. 2 (2017): 1–20.
- Normina, "Partisipasi Masyarakat Dalam Pendidikan." *Ittihad* 14, no. 26 (2016): 71–85.
- Novelina, Kartika, Br Purba, Abdul Gani, and Khairatun Nazah. "Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Pada Desa Rumah Sumbul Kabupaten Deliserdang." *Jurnal Media Informatika (JUMIN)* 6, no. 2 (2024): 498–502.
- Penyusun, Tim. "Pedoman Karya Tulis Ilmiah (JEMBER: Uin Kiai Haji Achmad Siddiq Jember)," 2021.
- Prihasantyo Siswo Nugroho, Panca Wahyuningsih, Siti Alliyah. "Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pada 10 Pemerintah Desa Di Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara)." *Jurnal Akuntansi Dan Pajak* 1, no 2, (2022).
- Rahayu, Sri. "Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi Masyarakat, Dan Efektivitas Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa Pada Desa Se-Kecamatan Maospati Kabupaten Magetan.,," (Skripsi Universitas Muhammaadiyah Ponorogo, 2021).
- Rifkhan. "Metodologi Penelitian" (Yogyakarta: cv Andi Offset, 2019).
- Riswati. "Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa." *JEKP (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Publik)* 8, no. 1 (2021): 13–31.
- Ritonga, Pardomuan. "Transparansi Dan Akuntabilitas: Peran Audit Dalam Meningkatkan Kepercayaan Stakeholder." *Equilibrium: Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi* 13, no. 2 (2024): 323–336.
- Rizqiana, Sandra Nuzulia. "Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Sistem Akuntansi Keuangan Desa Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Empiris Pada Desa Tanjungmojo, Kecamatan Kangkung, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah), (Skripsi: Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2023).
- Rosidah, Idah, Priatna Kesumah, and Royke Bahagia Rizka. "Transparasi Dan Akuntabilitas Dalam Pencegahan Fraud Diinstansi Pemerintah (Studi Kasus Kantor Kec. Ciwidey)." *Jurnal Ekonomi Manajemen Bisnis Dan Akuntansi: EMBA* 2, no. 1 (2023): 137–156.

- Saputra, Yusranda, Mitra, Meita Sekar Sari, and Darwin Warisi. "Pengaruh Transparansi Dan Kompetensi Aparatur Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Pada Pemerintah Desa Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan) Yusranda Saputra Meita Sekar Sari Darwin Warisi." *Jurnal Ilmiah Akutansi* 5 (2024): 56–70.
- Septiawati, Septiawati, Achmad Hizazi, and Fitriani Mansur. "Akuntabilitas Dan Transparansi Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus Pada Aparat Desa Di Kecamatan Tabir Barat Kabupaten Merangin)." *Jambi Accounting Review (JAR)* 2, no. 1 (2022): 14–29.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013).
- Siregar, Oktarini Khamilah, Hasrul Azwar Hasibuan, Astri Natasi, and Janu Erhan. "Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Sekolah Terhadap Kinerja Guru Di Smp Negeri 1 Tanjungbalai." *Jurnal Akuntansi Bisnis & Publik* 10, no. 1 (2019): 57–71.
- Siti Nurbadaliah, Safrul Rijali. "Transparansi Pelayanan Publik Di Desa Kapar Kecamatan Murung." *Jurnal Akuntansi Bisnis & Publik* 6, no. 1 (2023): 276–279.
- Sudaryono, "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan Mix Method," (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017).
- Sugiyono. "Metode Kuantitatif Kualitatif Dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2013).
- Sugiyono, "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2019).
- Suliyatini, Mita, Indra Satriawan, Jurusan Akuntansi, and Politeknik Negeri Sriwijaya. "Transparansi , Akuntabilitas Dan Pengelolaan." *Journal Of Applied Accounting (Jaa)* 4, No. 1 (2025): 1–6.
- Theodorus L. "Partisipasi Masyarakat Pada Pelaksanaan Dana Desa Di Desa Tuabatu Kecamatan Tampanamma Kabupaten Kepulauan Talaud," *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, (2019), 31–41.
- Syarif Hafni Sahir. "Metodologi Penelitian" (Bojonegoro: KBM Indonesia, 2021).
- Syofian Siregar, "Metode Penelitian Kuantitatif, 4th Ed. (Jakarta: Kencana, 2017).
- Tahir, Sofiyah Yatimah, Evi Malia, and Imam Agus Faisol. "Pengaruh Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat, Pengetahuan Kepala Desa, Dan Transparansi Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Desa Di Kabupaten Pamekasan." *Journal of Accounting and Financial Issue (JAFIS)* 1 (2021): 20–29.

Vidyasari, Febriana Nafi'ah, and Bambang Suryono. "Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah." *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi* 10, no. 4 (2021): 1–24.

Wuriasih, Anik. "Akuntabilitas Finansial, Transparansi Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa." *JFRES: Journal of Fiscal and Regional Economy Studies* 4, no. 2 (2021): 8–14.

Yanti, Elisa Rama, Wiralestari, and Wiwik Tiswiyanti. "Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus Pada Desa Di Kecamatan Tanah Kampung Kota Sungai Penuh)." *Jurnal Manajemen Terapan Dan Keuangan* 12, no. 01 (2023): 53–64.

Yassir, Mursalim, and Asriani Junaidi. "Pengaruh Akuntabilitas Keuangan, Pengawasan Keuangan Dan Transparansi Anggaran Terhadap Pengelolaan Keuangan." *YUME : Journal of Management* 5, no. 2 (2022): 477–494.

Zahriyah Aminatus, Suprianik, Agung Parmono, Mustofa, "Ekonometrika: Teknik Dan Aplikasi Dengan SPSS, (Jember: Mandala Press, 2021)



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Siti Kholidah

NIM : 212105030086

Program Studi : Akuntansi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur plagiat karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali secara tertulis di kutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur plagiat dan terdapat klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 19 November 2025

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER**


Siti Kholidah
NIM. 212105030086

MATRIKS PENELITIAN

Judul	Variabel	Indikator	Sumber data	Metode Penelitian	Hipotesis
Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa di Kecamatan Glenmore Kabupaten Banyuwangi	Akuntabilitas (X ₁)	1. Transparansi 2. Pelayanan 3. Partisipasi 4. Profesionalisme 5. Evaluasi	1.Data primer (kuisioner) pada perangkat desa di kecamatan glenmore kabupaten banyuwangi	1.Pendekatan kuantitatif 2.Jenis penelitian asosiatif kausal 3.teknik sampel yang digunakan adalah sampel jenuh 4.Menggunakan skala linkert 5. Analisis data; a. Uji Validitas b.Uji Reliabilitas c.Uji Asumsi Klasik d.Uji Normalitas e.Uji Multikolinearitas f.Uji Heteroskedastisitas g. Uji hipotesis h. Uji T i. Uji F j. Uji R ² k. Analisis Regresi Linier Berganda	1.Apakah akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa di kecamatan glenmore kabupaten banyuwangi? 2. Apakah transparansi berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa di kecamatan glenmore kabupaten banyuwangi? 3. Apakah partisipasi masyarakat berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa di kecamatan glenmore kabupaten banyuwangi? 4.Apakah akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa di kecamatan glenmore kabupaten banyuwangi?
	Transparansi (X ₂)	1. Informasi 2. Aksesibilitas 3. Ketepatan 4. Akuntabilitas 5. Sistem			
	Partisipasi Masyarakat (X ₃)	1. Forum 2. Keterlibatan 3. Akses			
	Pengelolaan keuangan desa (X ₄)	1. Perencanaan 2. Pelaksanaan 3. Penatausahaan 4. Pelaporan 5. Pertanggung jawaban			

LAMPIRAN**KUESIONER PENELITIAN**

Saudara/i responden yang terhormat, Sehubungan dengan penyelesaian tugas akhir skripsi yang sedang saya lakukan di Program Studi S1 Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, saya sedang melakukan penelitian dengan judul:

**PENGARUH AKUNTABILITAS, TRANSPARANSI, DAN PARTISIPASI
MASYARAKAT TERHADAP PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DI
KECAMATAN GLENMORE, KABUPATEN BANYUWANGI**

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data dan informasi yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa dari perspektif perangkat desa. Oleh karena itu, saya mohon kesediaan dan partisipasi Saudara/i untuk meluangkan waktu mengisi kuesioner ini dengan sejujur-jujurnya, sesuai dengan pengetahuan, pengalaman, dan persepsi pribadi.

Segala informasi dan jawaban yang diberikan akan dijamin kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk keperluan akademik dalam rangka penyusunan tugas akhir.

Atas perhatian dan kesediaan Saudara/i, saya ucapkan terima kasih.

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R**

Data Responden

Nama :
 Jenis Kelamin :
 Usia :
 Jabatan di Pemerintahan Desa :
 Lama Menjabat :
 Pendidikan Terakhir :

Petunjuk Pengisian Kuesioner

- Bacalah setiap pernyataan dengan cermat.
- Pilih jawaban berdasarkan pengalaman dan pendapat pribadi Anda.
- Jawaban diberikan dengan memberi **Angka** pada salah satu pilihan skala berikut:

1 = Sangat Tidak Setuju

2 = Tidak Setuju

3 = Ragu-ragu

4 = Setuju

5 = Sangat Setuju

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
 J E M B E R

Akuntabilitas X1

No	Pernyataan	SS	S	N	TS	STS
1	Saya mengetahui bahwa pemerintah desa secara terbuka menyampaikan laporan keuangan kepada warga					
2	Menurut saya pelayanan administrasi keuangan dari aparatur desa sudah dilakukan secara profesional					
3	Saya pernah dilibatkan dalam proses perencanaan anggaran desa					
4	Menurut saya aparatur desa memiliki kemampuan teknis yang cukup dalam mengelola dana desa					
5	Saya mengetahui bahwa pemerintah desa rutin melakukan evaluasi terhadap penggunaan dana desa					

Transparansi X2

No	Pernyataan	SS	S	N	TS	STS
1	Saya mengetahui bahwa pemerintah desa secara terbuka menyampaikan laporan keuangan kepada warga					
2	Saya mengetahui adanya media informasi publik seperti papan pengumuman atau website desa					
3	Saya mengetahui bahwa laporan anggaran desa disampaikan secara tepat waktu					
4	Saya percaya bahwa pemerintah desa bertanggung jawab terhadap semua anggaran yang telah digunakan					
5	Saya mengetahui bahwa sistem pengelolaan keuangan desa telah menggunakan aplikasi seperti Siskeudes					

Partisipasi Masyarakat X3

No	Pernyataan	SS	S	N	TS	STS
1	Menurut saya, masyarakat sering diundang untuk mengikuti musyawarah desa terkait perencanaan keuangan					
2	Saya pernah memberikan usulan dalam penyusunan program pembangunan desa					
3	Saya merasa memiliki akses terhadap informasi dan hasil keputusan musyawarah desa					

Pengelolaan Keuangan Desa Y

No	Pernyataan	SS	S	N	TS	STS
1	Saya mengetahui bahwa pemerintah desa menyusun perencanaan anggaran berdasarkan kebutuhan masyarakat					
2	Saya melihat bahwa penggunaan dana desa sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan					
3	Saya menilai proses pencatatan dan pembukuan keuangan desa dilakukan secara sistematis dan rapi					
4	Saya mengetahui bahwa laporan realisasi keuangan desa disusun secara transparan dan akurat					
5	Saya mendapatkan informasi bahwa pemerintah desa memberikan laporan pertanggungjawaban kepada warga					

JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

Nama : Siti Kholifah

Nim : 212105030086

Judul : Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Keungan Desa Di Kecamatan Glenmore Kabupaten Banyuwangi

No	Tanggal	Uraian Kegiatan
1	18 Oktober 2024	Pengajuan judul skripsi
2	15 November 2024	Acc judul skripsi
3	14 Januari 2025	Penyusunan proposal
4	09 April 2025	Acc proposal
5	28 April 2025	Seminar proposal
6	19 Mei 2025	Penyebaran kuisioner
7	26 Juli 2025	Analisis data
8	28 Agustus 2025	Penyusunan naskah skripsi
9	19 November 2025	Acc skripsi



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R**



Tabulasi Olah Data Responden

X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	X1	X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	X2	X3.1	X3.2	X3.3	X3	Y1.1	Y1.2	Y1.3	Y1.4	1.5	Y1
3	3	3	3	4	16	4	3	4	4	4	19	5	5	5	15	5	4	5	4	4	22
4	4	4	4	2	18	2	2	2	2	2	10	3	4	2	9	3	2	4	2	2	13
4	5	4	4	4	21	4	3	4	4	4	19	3	4	4	11	3	4	4	4	4	19
4	4	5	2	3	18	3	3	3	3	3	15	4	4	5	13	4	3	4	3	3	17
4	5	5	4	5	23	5	5	5	5	5	25	4	5	4	13	4	5	5	5	5	24
5	5	4	3	5	22	5	5	5	5	5	25	3	3	4	10	3	5	3	5	5	21
4	4	5	5	5	23	5	5	5	4	4	23	4	5	4	13	4	4	5	5	4	22
4	5	4	5	4	22	4	5	4	4	4	21	5	5	5	15	5	4	5	4	4	22
5	5	4	4	5	23	5	5	5	4	4	23	4	2	3	9	4	4	2	5	4	19
4	5	5	4	5	23	5	4	5	4	4	22	5	5	5	15	5	4	5	5	4	23
5	4	5	4	4	22	4	5	4	4	4	21	5	5	5	15	5	4	5	4	4	22
5	5	4	4	5	23	5	4	5	4	4	22	5	5	4	14	5	4	5	5	4	23
1	1	3	4	4	13	4	5	4	4	4	21	5	5	5	15	5	4	5	4	4	22
3	3	2	4	5	17	5	5	5	4	4	23	5	5	5	15	5	4	5	5	4	23
1	1	2	4	2	10	2	3	2	1	1	9	5	5	5	15	5	1	5	2	1	14
1	3	3	4	1	12	1	2	1	1	1	6	5	5	5	15	5	1	5	1	1	13
1	1	3	1	3	9	3	2	3	2	2	12	5	5	4	14	5	2	5	3	2	17
2	1	2	1	2	8	2	3	2	1	1	9	3	2	2	7	3	1	2	2	1	9
1	2	3	2	3	11	3	2	3	2	2	12	4	4	4	12	4	2	4	3	2	15
3	2	2	1	2	10	2	1	2	3	3	11	5	5	5	15	5	3	5	2	3	18
2	1	2	2	2	9	2	3	2	1	1	9	4	2	2	8	4	1	2	2	1	10
1	2	3	3	1	10	1	2	1	2	2	8	4	4	4	12	4	2	4	1	2	13
1	1	2	1	3	8	3	1	3	2	2	11	5	5	5	15	5	2	5	3	2	17
2	1	1	2	3	9	3	3	3	2	2	13	4	4	4	12	4	2	4	3	2	15
1	2	2	2	1	8	1	2	1	2	2	8	5	4	5	14	5	2	4	1	2	14
2	2	1	2	1	8	1	1	1	2	2	7	5	5	5	15	5	2	5	1	2	15



X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	X1	X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	X2	X3.1	X3.2	X3.3	X3	Y1.1	Y1.2	Y1.3	Y1.4	1.5	Y1
2	1	2	2	2	9	2	1	2	1	1	7	4	3	11	4	1	4	2	1	12	
3	4	4	2	2	15	2	1	2	1	1	7	5	4	14	5	1	5	2	1	14	
2	2	2	1	1	8	1	2	1	2	2	8	5	5	15	5	2	5	1	2	15	
3	4	4	1	5	17	5	4	5	5	5	24	4	4	12	4	5	4	5	5	23	
3	3	3	2	4	15	4	5	4	4	4	21	5	5	14	5	4	5	4	4	22	
5	5	5	4	24	4	5	4	5	5	5	23	4	4	12	4	5	4	4	5	22	
5	5	5	4	4	23	4	5	4	5	5	23	5	5	15	5	5	5	4	5	24	
5	5	4	5	4	23	4	5	4	4	4	21	4	4	12	4	4	4	4	4	20	
5	4	4	5	5	23	5	5	5	5	5	25	3	3	8	3	5	3	5	5	21	
5	5	4	4	5	23	5	5	5	4	4	23	4	4	12	4	4	4	5	4	21	
4	5	4	5	5	23	5	5	5	4	4	23	5	5	15	5	4	5	5	4	23	
5	4	4	4	4	21	4	5	4	2	2	17	5	5	15	5	2	5	4	2	18	
4	5	4	4	5	22	5	5	5	5	5	25	4	4	10	4	5	4	5	5	23	
5	4	4	2	5	20	5	5	5	4	4	23	5	5	15	5	4	5	5	4	23	
5	5	4	5	4	23	4	4	4	4	4	20	5	5	15	5	4	5	4	4	22	
3	2	1	4	5	15	5	5	4	4	4	23	5	5	15	5	4	5	5	4	23	
2	1	1	4	5	13	5	5	5	4	4	23	3	4	10	3	4	4	5	4	20	
2	3	2	4	4	15	4	4	4	4	4	20	5	5	15	5	4	5	4	4	22	
3	2	1	4	5	15	5	1	5	3	3	17	4	4	12	4	3	4	5	3	19	
2	3	2	4	5	16	5	5	5	1	1	17	1	2	4	1	1	2	5	1	10	
1	2	3	3	5	14	5	5	5	3	3	21	5	5	15	5	3	5	5	3	21	
3	2	1	1	5	12	5	5	5	4	4	23	5	5	15	5	4	5	5	4	23	
2	1	2	3	3	11	3	3	3	3	3	15	5	4	13	5	3	4	3	3	18	
1	3	2	4	4	14	4	4	4	4	4	20	4	4	13	4	4	4	4	4	20	
3	3	2	3	5	16	5	4	5	4	4	22	5	1	9	5	4	1	5	4	19	
2	1	2	4	4	13	4	4	4	5	5	22	2	2	7	2	5	2	4	5	18	
5	5	5	5	5	25	5	4	5	5	5	24	5	5	14	5	5	5	5	5	25	



X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	X1	X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	X2	X3.1	X3.2	X3.3	X3	Y1.1	Y1.2	Y1.3	Y1.4	1.5	Y1
5	5	4	5	5	24	5	5	5	4	4	23	5	4	4	13	5	4	5	5	4	23
5	4	4	4	4	21	4	4	4	5	5	22	4	4	4	12	4	5	4	4	5	22
5	5	4	5	5	24	5	4	5	4	4	22	5	5	4	14	5	4	5	5	4	23
4	5	4	5	5	23	5	5	5	4	4	23	5	5	5	15	5	4	5	5	4	23
5	4	4	4	5	22	5	4	5	5	5	24	5	5	5	15	4	5	5	5	5	24
4	5	4	5	4	22	4	5	4	5	5	23	3	4	5	12	5	5	4	4	5	23
5	4	4	4	5	22	5	5	5	4	4	23	5	5	5	15	4	4	5	5	4	22
5	5	4	5	1	20	1	1	1	3	3	9	5	5	3	13	5	3	1	1	3	13
3	2	1	2	3	11	3	3	3	2	2	13	2	3	4	9	2	2	3	3	2	12
2	1	1	1	1	6	1	1	1	2	2	7	3	4	3	10	1	2	1	1	2	7
2	3	2	3	3	13	3	1	3	3	3	13	4	4	4	12	3	3	3	3	3	15
3	2	1	2	1	9	1	1	3	3	9	3	5	3	11	2	3	1	1	3	10	
2	3	2	3	1	11	1	2	1	2	2	8	4	3	5	12	3	2	1	1	2	9
1	2	3	2	2	10	2	1	2	3	3	11	4	3	3	10	2	3	2	2	3	12
3	2	1	2	2	10	2	3	2	2	2	11	1	4	2	7	2	2	2	2	2	10
2	1	2	1	1	7	1	2	1	2	2	8	4	2	5	11	1	2	1	1	2	7
1	3	2	3	2	11	2	1	2	3	3	11	4	4	5	13	3	3	2	2	3	13

Karakteristik Responden

Karakteristik	Kategori	Frekuensi (n = 70)	Persentase (%)
Usia	< 30 tahun	8	11.4
	30–39 tahun	21	30.0
	40–49 tahun	24	34.3
	≥ 50 tahun	17	24.3
Pendidikan Terakhir	SMP/Sederajat	6	8.6
	SMA/Sederajat	28	40.0
	Diploma	15	21.4
	Sarjana	18	25.7
	Pascasarjana	3	4.3
Lama Menjabat	< 1 tahun	7	10.0
	1–3 tahun	19	27.1
	4–6 tahun	25	35.7
	> 6 tahun	19	27.1



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Uji Validitas

X1

Correlations						
	Akuntabilitas	Akuntabilitas	Akuntabilitas	Akuntabilitas	Akuntabilitas	Akuntabilitas
Akuntabilitas	Pearson Correlation	1	.823**	.687**	.545**	.534**
	Sig. (2-tailed)		<.001	<.001	<.001	<.001
	N	70	70	70	70	70
Akuntabilitas	Pearson Correlation	.823**	1	.820**	.658**	.508**
	Sig. (2-tailed)	<.001		<.001	<.001	<.001
	N	70	70	70	70	70
Akuntabilitas	Pearson Correlation	.687**	.820**	1	.530**	.423**
	Sig. (2-tailed)	<.001	<.001		<.001	<.001
	N	70	70	70	70	70
Akuntabilitas	Pearson Correlation	.545**	.658**	.530**	1	.524**
	Sig. (2-tailed)	<.001	<.001	<.001		<.001
	N	70	70	70	70	70
Akuntabilitas	Pearson Correlation	.534**	.508**	.423**	.524**	1
	Sig. (2-tailed)	<.001	<.001	<.001	<.001	
	N	70	70	70	70	70
Akuntabilitas	Pearson Correlation	.872**	.922**	.831**	.782**	.728**
	Sig. (2-tailed)	<.001	<.001	<.001	<.001	
	N	70	70	70	70	70

**: Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

X2

Correlations						
	Transparansi	Transparansi	Transparansi	Transparansi	Transparansi	Transparansi
Transparansi	Pearson Correlation	1	.812**	1.000**	.728**	.728**
	Sig. (2-tailed)		<.001	.000	<.001	<.001
	N	70	70	70	70	70
Transparansi	Pearson Correlation	.812**	1	.812**	.652**	.652**
	Sig. (2-tailed)	<.001		<.001	<.001	<.001
	N	70	70	70	70	70
Transparansi	Pearson Correlation	1.000**	.812**	1	.728**	.728**
	Sig. (2-tailed)	.000	<.001		<.001	<.001
	N	70	70	70	70	70
Transparansi	Pearson Correlation	.728**	.652**	.728**	1	1.000**
	Sig. (2-tailed)	<.001	<.001	<.001		.000
	N	70	70	70	70	70
Transparansi	Pearson Correlation	.728**	.652**	.728**	1.000**	1
	Sig. (2-tailed)	<.001	<.001	<.001		<.001
	N	70	70	70	70	70
Transparansi	Pearson Correlation	.946**	.874**	.946**	.890**	.890**
	Sig. (2-tailed)	<.001	<.001	<.001	<.001	
	N	70	70	70	70	70

**: Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

X3

		Correlations				
			Partisipasi Masyarakat	Partisipasi Masyarakat	Partisipasi Masyarakat	Partisipasi Masyarakat
Partisipasi Masyarakat	Pearson Correlation	1	.587**	.670**	.870**	
	Sig. (2-tailed)		<.001	<.001	<.001	
	N	70	70	70	70	
Partisipasi Masyarakat	Pearson Correlation	.587**	1	.588**	.841**	
	Sig. (2-tailed)	<.001		<.001	<.001	
	N	70	70	70	70	
Partisipasi Masyarakat	Pearson Correlation	.670**	.588**	1	.876**	
	Sig. (2-tailed)	<.001	<.001		<.001	
	N	70	70	70	70	
Partisipasi Masyarakat	Pearson Correlation	.870**	.841**	.876**	1	
	Sig. (2-tailed)	<.001	<.001	<.001		
	N	70	70	70	70	

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Y

		Correlations					
		Pengelolaan Keuangan Desa					
Pengelolaan Keuangan Desa	Pearson Correlation	1	.203	.739**	.257*	.203	.608**
	Sig. (2-tailed)		.092	<.001	.032	.092	<.001
	N	70	70	70	70	70	70
Pengelolaan Keuangan Desa	Pearson Correlation	.203	1	.245*	.728**	1.000**	.839**
	Sig. (2-tailed)	.092		.041	<.001	.000	<.001
	N	70	70	70	70	70	70
Pengelolaan Keuangan Desa	Pearson Correlation	.739**	.245*	1	.404**	.245*	.683**
	Sig. (2-tailed)	<.001	.041		<.001	.041	<.001
	N	70	70	70	70	70	70
Pengelolaan Keuangan Desa	Pearson Correlation	.257*	.728**	.404**	1	.728**	.836**
	Sig. (2-tailed)	.032	<.001	<.001		<.001	<.001
	N	70	70	70	70	70	70
Pengelolaan Keuangan Desa	Pearson Correlation	.203	1.000**	.245*	.728**	1	.839**
	Sig. (2-tailed)	.092	<.001	.041	<.001		<.001
	N	70	70	70	70	70	70
Pengelolaan Keuangan Desa	Pearson Correlation	.608**	.839**	.683**	.836**	.839**	1
	Sig. (2-tailed)	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001	
	N	70	70	70	70	70	70

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Uji Reliabilitas

X1

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.884	5

X2

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.946	5

X3

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.827	3

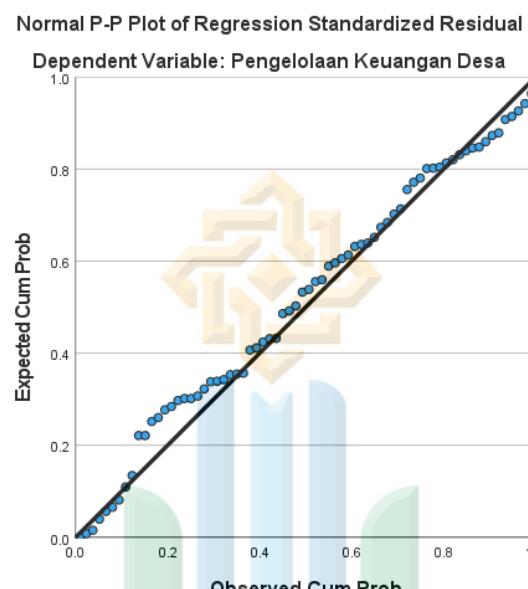
Y

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.821	5

Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

	Unstandardized Residual
N	70
Normal Parameters ^{a,b}	Mean .0000000
	Std. Deviation 1.15012825
Most Extreme Differences	Absolute .090
	Positive .045
	Negative -.090
Test Statistic	.090
Asymp. Sig. (2-tailed) ^c	.200 ^d
Monte Carlo Sig. (2-tailed) ^e	Sig. .169
	99% Confidence Interval Lower Bound .160
	Upper Bound .179

- a. Test distribution is Normal.
 b. Calculated from data.
 c. Lilliefors Significance Correction.
 d. This is a lower bound of the true significance.
 e. Lilliefors' method based on 10000 Monte Carlo samples with starting seed 2000000.

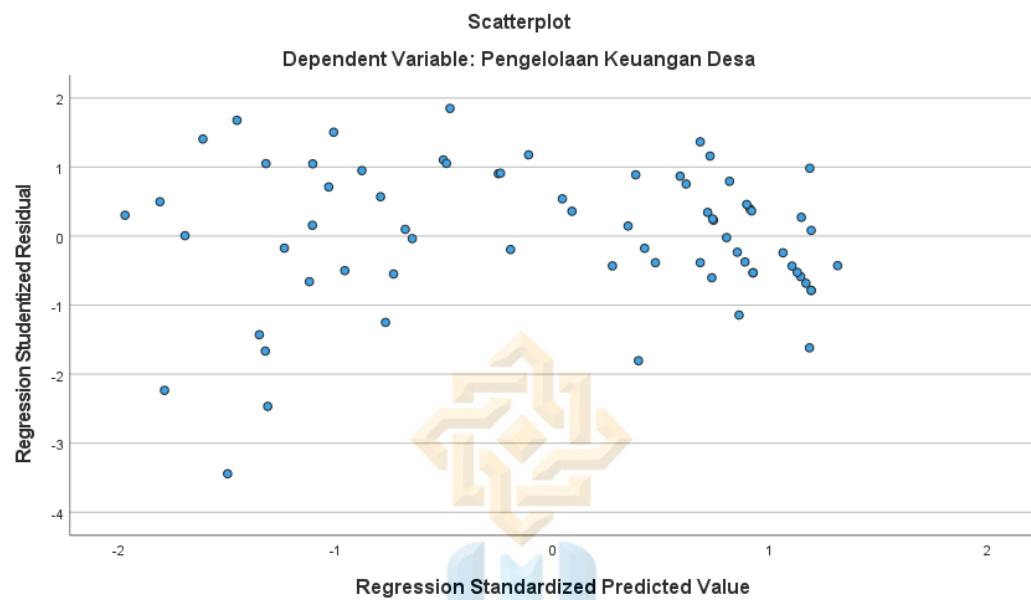
2. Uji Multikolinieritas

Model	Coefficients ^a						
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		Collinearity Statistics		
	B	Std. Error	Beta	t	Sig.	Tolerance	VIF
1	(Constant)	-2.441	.761	-3.209	.002		
	Akuntabilitas	.039	.040	.046	.976	.332	.371
	Transparansi	.627	.036	.805	17.294	<.001	.376
	Partisipasi Masyarakat	.736	.055	.385	13.262	<.001	.969
							1.032

a. Dependent Variable: Pengelolaan Keuangan Desa

J E M B E R

3. Uji Heterokedastisitas



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Analisis Regresi Linier Berganda

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
		B	Std. Error			
1	(Constant)	-2.441	.761		-3.209	.002
	Akuntabilitas	.039	.040	.046	.976	.332
	Transparansi	.627	.036	.805	17.294	<.001
	Partisipasi Masyarakat	.736	.055	.385	13.262	<.001

a. Dependent Variable: Pengelolaan Keuangan Desa



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Uji t dan F

		Coefficients^a			
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	
Model		B	Std. Error	Beta	t
1	(Constant)	-2.441	.761		-3.209
	Akuntabilitas	.039	.040	.046	.976
	Transparansi	.627	.036	.805	17.294
	Partisipasi Masyarakat	.736	.055	.385	13.262

a. Dependent Variable: Pengelolaan Keuangan Desa

ANOVA^a					
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F
1	Regression	1605.999	3	535.333	387.103
	Residual	91.273	66	1.383	
	Total	1697.271	69		

a. Dependent Variable: Pengelolaan Keuangan Desa

b. Predictors: (Constant), Partisipasi Masyarakat, Transparansi, Akuntabilitas

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R**

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.773 ^a	.746	.744	1.17598

a. Predictors: (Constant), Partisipasi Masyarakat, Transparansi, Akuntabilitas

b. Dependent Variable: Pengelolaan Keuangan Desa



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Dokumentasi Penyebaran Kuesioner

Desa Margomulyo



Desa Tulungrejo



Desa Karangharjo



Desa Sepanjang



Desa Bumiharjo



Desa Sumbergondo



Desa Tegalharjo



Surat Izin Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550
Fax (0331) 427005 e-mail: febi@uinkhas.ac.id Website: <https://febi.uinkhas.ac.id/>



Nomor : B-257 /Un.22/7.a/PP.00.9/03/2025
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian

07 Maret 2025

Kepada Yth.

Kepala Camat Glenmore

Jl. Jember, Karangharjo, Kecamatan Glenmore, Kabupaten Banyuwangi

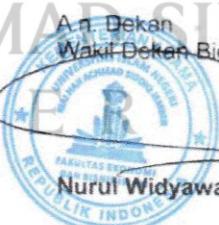
Disampaikan dengan hormat bahwa, dalam rangka menyelesaikan tugas Skripsi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka bersama ini mohon diizinkan mahasiswa berikut :

Nama	:	Siti Kholidah
NIM	:	212105030085
Semester	:	8 (Delapan)
Jurusan	:	Ekonomi Islam
Prodi	:	Akuntansi Syariah

Guna melakukan Penelitian/Riset mengenai Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa di Kecamatan Glenmore Kabupaten Banyuwangi di lingkungan/lembaga wewenang Bapak/Ibu.

Demikian atas perkenan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



Nurul Widyawati Islami Rahayu



Surat Selesai Penelitian



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
KECAMATAN GLENMORE
 Jalan Raya Glenmore Nomor 89 **(0333) 821445 Fax (0333) 823135** **68466**
<http://www.banyuwangikab.go.id> e-mail : kec_glenmore@banyuwangikab.go.id
BANYUWANGI

Glenmore, 15 Agustus 2025

Nomer : 072/271/429.520/2025
 Sifat : Penting
 Lampiran : -
 Perihal : **Permohonan Selesai Penelitian**
Mahasiswa UIN KH Achmad Siddiq

Kepada Yth.
 Sdr. Kepala Desa
 Se-Kecamatan Glenmore
 di-
GLENMORE



Berdasarkan Surat Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Nomor : B-252/UN.22/7.a/PP.00.9/03/2025 Tanggal 7 Maret 2025 perihal tersebut pokok surat, bersama ini kami merekomendasikan kepada :

NO	NAMA	NIM	JURUSAN
1	Siti Khalifah	212105030086	Akuntansi Syariah

Tujuan : Desa Se- Kecamatan Glenmore
 Waktu : Sejak surat ini dikeluarkan—selesai
 Judul : " Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi Masyarakat Terhadap pengelolaan Keuangan Desa di Kecamatan Glenmore Kabupaten Banyuwangi"

Sehubungan tersebut mohon Saudara memberikan tempat dan data yang diperlukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku yang tidak ada dampak negatif yang diperkirakan akan timbul mengganggu kondisi diwilayah, dengan ketentuan :

1. Peserta wajib mentaati peraturan dan tata tertib yang ada;
2. Peserta wajib menjaga situasi dan kondisi yang kondusif di wilayah;
3. Melaporkan hasilnya kepada Camat Glenmore.

Demikian atas perhatian dan kerjasama yang baik disampaikan terima kasih.

Plt. CAMAT GLENMORE



EKO YULIANTO, S.STP,M.Si
 Pembina
 NIP.198007022000121001

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



Dokumen ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSxE)

Surat Keterangan Lulus Plagiasi



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550
 Fax (0331) 427005 e-mail: febi@uinkhas.ac.id Website: <http://uinkhas.ac.id>



SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI

Bagian Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam menerangkan bahwa :

Nama	:	SITI KHLIFAH
NIM	:	212105030086
Program Studi	:	AKUNTANSI SYARIAH
Judul	:	PENGARUH AKUNTABILITAS, TRANSPARANSI DAN PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DI KECAMATAN GLENMORE KABUPATEN BANYUWANGI

Adalah benar-benar telah lulus pengecekan plagiasi dengan menggunakan aplikasi Turnitin, dengan tingkat kesamaan dari Naskah Publikasi Tugas Akhir pada aplikasi Turnitin kurang atau sama dengan 25%.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 24 November 2025

Operator Turnitin

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

(Mariyah Ulfah, MEI)

197709142005012004



Surat Keterangan Selesai Bimbingan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550
Fax (0331) 427005 e-mail: febi@uinkhas.ac.id Website: <http://febi.uinkhas.ac.id>



SURAT KETERANGAN

Nomor : 4054/Un.22/D.5.KP.2/KM.05.00/10/2025

Yang bertandatangan di bawah ini Koordinator program Studi Akuntansi Syariah,
menerangkan bahwa :

Nama : Siti Khalifah
NIM : 212105030086
Semester : IX (Sembilan)

Berdasarkan keterangan dari Dosen Pembimbing telah dinyatakan selesai
bimbingan skripsi. Oleh karena itu mahasiswa tersebut diperkenankan mendaftarkan
diri untuk mengikuti Ujian Skripsi.

Jember, 25 November 2025
A.n. Dekan
Koordinator Prodi. Akuntansi Syariah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Dr. Nur Ira Mauliyah, S.E., M.Ak
NIP. 198803012018012001



Surat Kelengkapan Naskah



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
 Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550
 Fax (0331) 427005 e-mail: febi@uinkhas.ac.id Website: <https://febi.uinkhas.ac.id/>



SURAT KETERANGAN

Kami selaku pembimbing skripsi dengan ini menerangkan bahwa:

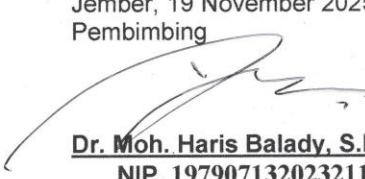
Nama : Siti Khalifah
 NIM : 212105030086
 Program Studi/Fakultas : Akuntansi Syariah
 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
 UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Telah melengkapi lampiran naskah skripsi sesuai ketentuan buku pedoman akademik dan berhak diverifikasi untuk mendaftar ujian skripsi, antara lain :

No	Lampiran	Ada	Tidak
1	Lembar persetujuan Pembimbing	✓	
2	Matrik Penelitian	✓	
3	Surat Pernyataan Keaslian Bermaterai dan ditandatangani	✓	
4	Pedoman Wawancara/ Angket Penelitian	✓	
5	Surat Izin Penelitian	✓	
6	Surat Keterangan Selesai Penelitian	✓	
7	Jurnal Kegiatan Penelitian	✓	
8	Dokumentasi Penelitian (Kualitatif dan Kuantitatif Data Primer)	✓	
9	Lampiran Data Sekunder (Hasil penghitungan SPSS dll atau penelitian kuantitatif data sekunder)	✓	
10	Surat keterangan screening turnitin 25% (Bagian Akademik)	✓	
11	Surat Keterangan Selesai Bimbingan Skripsi	✓	
12	Mensitasi 5 artikel jurnal dosen FEBI (sesuai dengan topik penelitian)	✓	
13	Biodata	✓	

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 19 November 2025
 Pembimbing


Dr. Moh. Haris Balady, S.E., M.M.
 NIP. 197907132023211007



BIODATA PENULIS



Data Pribadi

Nama	:	Siti Kholifah
NIM	:	212105030086
Tempat, Tanggal Lahir	:	Banyuwangi, 06 April 2002
Alamat	:	Dusun Kampungbaru RT 01/ RW 01 Desa Margomulyo Kecamatan Glenmore Kabupaten Banyuwangi
Agama	:	Islam
Program Studi	:	Akuntansi Syariah
Fakultas	:	Ekonomi dan Bisnis Islam
Jenis Kelamin	:	Perempuan
No. Hp	:	+6282337914115
Email	:	sitikholifah06123@gmail.com

Pendidikan

TK	:	TK islam Al-Hikmah
SD	:	SDN 3 Margomulyo
MTs	:	MTs Al-Qodiri 1 Jember
MA	:	SMK Al-Qodiri 1 Jember
Perguruan Tinggi	:	Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember